

PENGEMBANGAN KURIKULUM: Teori dan Praktik

Penulis:

Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.

Karten Halirat, S.Pd., M.Pd.

Siti Nur Fikriyah, M.Pd.

Khairul Hasni, S.H., M.A.

Qiyadah Robbaniyah, M.Pd.I.

Dr. Epi Supriyani Siregar, M.Pd.

Dr. Nasarudin, S.Pd.I., M.Pd.

Widiyanto, S.Pd., M.Pd.

Muh. Shulthon Rachmandhani, S. Pd. I., M. Pd.



GET PRESS INDONESIA

PENGEMBANGAN KURIKULUM: Teori dan Praktik

Penulis :

Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.
Karten Halirat, S.Pd., M.Pd.
Siti Nur Fikriyah, M.Pd.
Khairul Hasni, S.H., M.A.
Qiyadah Robbaniyah, M.Pd.I.
Dr. Epi Supriyani Siregar, M.Pd.
Dr. Nasarudin, S.Pd.I., M.Pd.
Widiyanto, S.Pd., M.Pd.

ISBN :

Editor : Nanny Mayasari, S.Pd., M.Pd., CQMS.

Penyunting: Yuliatr M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : Get Press Indonesia

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik Air Pacah RT 001 RW 006
Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : globaleksekitifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, September 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, dalam Rahmat dan petunjuk-Nya dapat menyelesaikan buku dengan judul **“PENGEMBANGAN KURIKULUM: Teori dan Praktik”** Buku ini merupakan panduan yang komprehensif tentang esensi, landasan, prinsip, dan paraktik terkait dengan pengembangan kurikulum dalam konteks pendidikan masa kini. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pedoman yang di rancang untuk mengatur dan mengarahkan proses pendidikan.

Buku ini membahas tentang hakikat dari kurikulum dari mulai konsep dasar dan pentingnya kurikulum dalam pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum, menemukan dasar-dasar teoritis yang menjadi pijakan bagi pengembangan kurikulum yang efektif. Prinsip pengembangan kurikulum, menguraikan prinsip yang harus di perhatikan dalam merancang kurikulum yang berkualitas. Perencanaan kurikulum, Langkah praktis dalam perencanaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Sosialisasi kurikulum, komunikasi kurikulum kepada semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman yang luas. Implementasi kurikulum, Langkah-langkah pelaksanaan kurikulum dalam lingkungan pendidikan. Evaluasi kurikulum, menguraikan beragam metode dan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas kurikulum. Penyempurnaan kurikulum, pentingnya keberlanjutan dalam pengembangan kurikulum dan bagaimana melaksanakan perbaikan berdasarkan umpan balik dan evaluasi.

Buku ini sangat relevan untuk berbagai kalangan yang terlibat dalam pendidikan, baik sebagai sumber bahan studi, referensi, atau panduan praktis. Buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam pengembangan kurikulum. Semoga menjadi ladang pahala para penulisnya.

Padang, September 2023
Editor

Nanny Mayasari, S.Pd., M.Pd, CQMS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 <u>HAKIKAT KURIKULUM</u>.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Sejarah Kurikulum di Indonesia.....	3
1.3. Pentingnya Kurikulum di Indonesia	6
1.3.1. Fungsi Kurikulum	7
1.3.2. Desain Kurikulum	9
1.4. Evaluasi Kurikulum	11
1.5. Implementasi Kurikulum	14
1.6. Kesimpulan.....	17
DAFTAR PUSTAKA	20
BAB 2 <u>LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM</u>.....	25
2.1. Pendahuluan	25
2.2. Landasan Filsafat.....	26
2.2.1. Landasan Filsafat Idealisme.....	26
2.2.2. Landasan Filsafat Realisme	27
2.2.3. Landasan Filsafat Pragmatisme.....	28
2.2.4. Landasan Filsafat Eksistensialisme.....	29
2.3. Landasan Psikologis.....	30
2.3.1. Psikologi Perkembangan Peserta Didik	30
2.3.2. Psikologi Belajar Peserta Didik.....	33
2.4. Landasan Sosial Budaya	36
2.5. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	37
DAFTAR PUSTAKA	39
BAB 3 <u>PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM</u>.....	41
3.1. Pendahuluan	41
3.2. Sumber Prinsip Pengembangan Kurikulum	42
3.3. Prinsip-prinsip Perkembangan Kurikulum	43
DAFTAR PUSTAKA	49
BAB 4 <u>PEMBAHARUAN KURIKULLUM</u>	51
4.1. Introduction	51

4.2. Pembaharuan Kurikulum Upaya Pengembangan Belajar	53
4.3. Kemajuan Pendidik Indonesia.....	56
4.3.1. Ksetaraan Gender Dalam Pendidikan	61
4.3.2. Milinial dan Tehnology.....	63
4.3.3. Kurikulum Negara Lain.....	64
4.4. Dampak Pergantian Kurikulum Baru	68
4.5. Menuju Kurikulum Merdeka.....	70
DAFTAR PUSTAKA	75
BAB 5 PERENCANAAN KURIKULUM	79
5.1. Pendahuluan	79
5.2. Kurikulum	80
5.2.1. Urgensi Perencanaan Kurikulum	81
5.2.2. Model Perencanaan Kurikulum	82
5.2.3. Asas Perencanaan Kurikulum	84
5.2.4. Perencanaan Kurikulum Pesantrean	86
5.3. Tahapan Perencanaan Kurikulum	88
5.3.1. Langkah Penyusunan Silabus	90
5.3.2. Langkah Penyusunan RPP	92
5.3.3. Program Tahunan (Prota).....	94
5.3.4. Promes (Program Semesteran)	95
5.4. Isi Kurikulum	96
5.4.1. Isi Kurikulum Pesantrean	97
5.4.2. Isi Kurikulum Tahfidz.....	99
5.5. Perencanaan Kurikulum di Era Modern.....	100
5.5.1. Problematika Perencanaan Kurikulum	101
DAFTAR PUSTAKA	103
BAB 6 SOSIALISASI KURIKULUM	105
6.1. Pendahuluan	105
6.2. Pengertian Sosialisasi Kurikulum	107
6.2.1. Jenis Sosialisasi Kurikulum	108
6.3. Manfaat Sosialisasi Kurikulum.....	110
6.4. Indikator Sosialisasi Kurikulum	112
6.4.1. Faktor Faktor Sosialisasi Kurikulum	113
6.5. Kekurangan Dan Kelebihan Sosialisasi Kurikulum.....	115
6.5.1. Kelebihan sosialisasi kurikulum:	115
6.5.2. Kekurangan Sosialisasi Kurikulum.....	116
6.6. Langkah Langkah Sosialisasi Kurikulum.....	116

DAFTAR PUSTAKA	121
BAB 7 IMPLEMENTASI KURIKULUM.....	123
7.1. Pendahuluan	123
7.2. Hakikat Implementasi Kurikulum	124
7.2.1. Konsep Kurikulum.....	124
7.2.2. Konsep Implementasi.....	127
7.3. Tahapan Implentasi Kurikulum.....	129
7.4. Model-Model Implementasi Kurikulum	130
7.5. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	132
DAFTAR PUSTAKA	134
BAB 8 EVALUASI KURIKULUM.....	137
8.1. Pendahuluan	137
8.2. Pengertian.....	137
8.3. Landasan.....	138
8.3.1. Akuntabilitas Legal	138
8.3.2. Akuntabilitas Akademik	139
8.3.3. Akuntabilitas Finansial	139
8.3.4. Akuntabilitas Pemberian Jasa	139
8.3.5. Akuntabilitas Dampak.....	140
8.4. Tujuan Evaluasi Kurikulum.....	140
8.5. Fungsi Evaluasi Kurikulum	141
8.6. Kriteria Evaluasi Kurikulum	142
8.7. Model-Model Evaluasi Kurikulum.....	145
DAFTAR PUSTAKA	161
BAB 9 PENYEMPURNAAN KURIKULUM.....	163
9.1. Pendahuluan	163
9.2. Perubahan Kurikulum Dari Masa Orde Lama Menuju Orde Baru	164
9.2.1. Analisis Perubahan Kurikulum Dari Masa Orde Lama Hingga Orde Baru.....	165
9.2.2. Perubahan Kurikulum dari Masa Orde Baru Hingga Masa Reformasi.....	171
9.2.3. Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Sebagai Penyempurnaan Kurikulum 1994.	171
9.2.4. Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 Sebagai Penyempurna Kurikulum KBK 2004.....	174

9.2.5. Penerapan Kurikulum 2013 Sebagai Penyempurnaan Kurikulum KTSP 2006	176
9.2.6. Penerapan Kurikulum Merdeka Sebagai Penyempurnaan Kurikulum 2013	181
DAFTAR PUSTAKA	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Kurikulum di Indonesia	4
Gambar 1.2 Langkah-Langkah dalam Mengevaluasi Kurikulum di Indonesia	12
Gambar 7.1 Guru Sebagai Pembuat Keputusan dalam pembelajaran	130
Gambar 7.2 Posisi Kurikulum dalam Proses Penerapan Penerapan Kurikulum (diadopsi dari Miller & Siller)	130
Gambar 8.1 Prosedur Evaluasi CIPP	154
Gambar 8.2 peristiwa dalam model responsif	160
Gambar 9.1 SNP dalam PP No 19 Tahun 2005	175
Gambar 9.2 Pengaruh Teknologi dalam Dunia Pendidikan	177

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	84
-----------------	----

BAB 1

HAKIKAT KURIKULUM

Oleh Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.

1.1. Pendahuluan

Kurikulum (Nidawati, 2021), adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum (Movitaria, Amnillah and Anirah, 2022) dapat meliputi beberapa komponen seperti standar kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut. Kurikulum juga dapat bersifat formal, non-formal, maupun informal tergantung dari institusi atau lembaga yang menyusun dan melaksanakannya.

Berikut adalah pengertian kurikulum menurut beberapa ahli:

1. Kemmis dan McTaggart menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian pengalaman yang diorganisasi dan dipilih untuk maksud pendidikan.
2. Tyler menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana untuk pembelajaran yang merinci apa yang akan dicapai siswa, bagaimana hal itu akan dicapai, dan bagaimana hasil pembelajaran akan dievaluasi.
3. Tanner dan Tanner menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang menentukan apa yang harus diajarkan, bagaimana mengajar, dan

bagaimana mengukur keberhasilan siswa.

4. Hilda Taba menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat pengalaman yang diorganisir untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
5. Elliot W. Eisner menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat praktik pendidikan yang menyajikan kepada para siswa pengalaman yang terorganisasi dengan baik, sehingga dapat mengekspresikan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.

Secara umum, pengertian kurikulum (Darmansah, 2022) adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengatur apa yang harus diajarkan, bagaimana mengajar, dan bagaimana mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merujuk pada seperangkat rencana dan pengaturan yang dirancang untuk mengatur dan mengarahkan proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan, seperti sekolah atau perguruan tinggi. Ini adalah dokumen yang menjelaskan tujuan, isi, metode, dan penilaian pembelajaran yang akan dilakukan dalam konteks pendidikan.

Pengertian kurikulum (Arifandi and Billah, 2022), (Movitaria, Amnillah and Anirah, 2022), (Darman, 2021) dan (Chamisijatin and Permana, 2020) meliputi berbagai elemen, termasuk:

1. Tujuan Pendidikan, kurikulum menggambarkan tujuan dan cita-cita pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang ingin dikembangkan pada peserta didik.
2. Isi Pembelajaran, kurikulum juga menetapkan konten atau materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Ini mencakup berbagai mata pelajaran, topik, konsep, dan fakta yang perlu dipelajari oleh peserta didik.
3. Metode Pengajaran, kurikulum mencakup strategi dan metode pengajaran yang akan digunakan untuk

mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Ini bisa meliputi ceramah, diskusi kelompok, praktik lapangan, eksperimen, proyek, dan berbagai pendekatan pembelajaran lainnya.

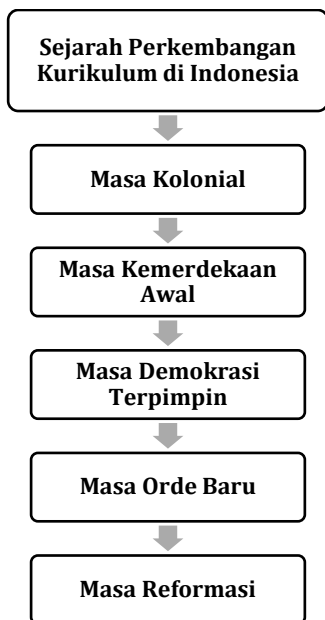
4. Penilaian pembelajaran, kurikulum juga menjelaskan bagaimana penilaian akan dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian peserta didik. Ini mencakup metode penilaian, seperti ujian, tugas, presentasi, dan penilaian formatif atau sumatif.
5. Waktu dan jangka waktu, kurikulum merinci alokasi waktu yang diberikan untuk setiap topik atau mata pelajaran, serta jangka waktu pelaksanaan kurikulum itu sendiri.
6. Prinsip pedagogis, kurikulum mungkin mencakup prinsip-prinsip pendekatan pedagogis yang akan digunakan dalam pembelajaran, seperti pendekatan berbasis masalah, pembelajaran aktif, kolaboratif, atau menggunakan teknologi.
7. Adaptasi dan pembaruan, kurikulum perlu dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, proses pembaruan dan penyesuaian secara berkala mungkin diperlukan untuk menjaga relevansi dan efektivitas kurikulum.

Kurikulum dapat disusun oleh lembaga pendidikan itu sendiri, pemerintah, atau kelompok pakar pendidikan. Kurikulum juga bisa berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, tergantung pada kebijakan, nilai-nilai, dan visi masing-masing institusi pendidikan.

1.2. Sejarah Kurikulum di Indonesia

Sejarah kurikulum (Manurung, 2019), (Insani, 2019), (Pratiwi, 2019), dan (Jeflin and Afriansyah, 2020) di Indonesia dimulai sejak masa kolonial hingga saat ini, mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Berikut pada

gambar 1.1 adalah gambaran umum tentang perkembangan kurikulum di Indonesia:



Gambar 1.1 Perkembangan Kurikulum di Indonesia

1. Masa Kolonial, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia didominasi oleh kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kepentingan kolonial. Pendidikan diberikan kepada kalangan tertentu dengan fokus pada penguasaan bahasa Belanda dan pelatihan untuk jabatan-jabatan administratif kolonial.
2. Masa Kemerdekaan Awal, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, upaya dilakukan untuk mengubah kurikulum secara fundamental agar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai nasional. Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air, dan memperkuat identitas Indonesia.
3. Masa Demokrasi Terpimpin, pada era Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno,

terjadi perubahan dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum berfokus pada pemahaman dan implementasi dasar-dasar ideologi Pancasila sebagai landasan negara.

4. Pada era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi penstandaran dan sentralisasi kurikulum. Pemerintah mengeluarkan Kurikulum 1968 yang menekankan pada pembinaan nilai-nilai kepatuhan, disiplin, dan keterampilan teknis.
5. Masa Reformasi, setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, terjadi reformasi pendidikan yang signifikan. Kurikulum disesuaikan dengan semangat demokrasi, partisipasi, dan penekanan pada pengembangan kreativitas, kritis, dan kemampuan berpikir mandiri.

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia meluncurkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai upaya untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, KTSP menghadapi tantangan implementasi yang kompleks. Pada tahun 2013, pemerintah meluncurkan Kurikulum 2013 (K-13) yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi holistik peserta didik. K-13 menekankan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, menyenangkan, dan berbasis pada pengembangan karakter peserta didik. Pada tahun 2020, pemerintah meluncurkan Kurikulum 2013 Revisi (K-13 Revisi) dengan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan. K-13 Revisi juga memperkenalkan Pendidikan Abad ke-21, yang menekankan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi digital.

Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka diluncurkan oleh Mendikbudristek pada Februari 2022 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar (Isnaini and Surawan, 2022), (Arnes, Musparidi and Yusmanila, 2023), (Jannah and Rasyid, 2023) dan (Suryaman, 2020) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan pembelajaran dan kualitas lulusan. Perkembangan kurikulum di Indonesia terus

berlanjut sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan tantangan global. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kurikulum agar relevan, responsif, dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tuntutan zaman.

1.3. Pentingnya Kurikulum di Indonesia

Kurikulum (Darmansah, 2022), (Suratno, Sari and Bani, 2022), (Jeflin and Afriansyah, 2020) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kurikulum di Indonesia dianggap penting:

1. Mengatur Proses Pembelajaran, kurikulum menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengatur proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Ini membantu guru dan siswa dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan tujuan yang jelas.
2. Menentukan Tujuan Pendidikan, kurikulum menggambarkan tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui pendidikan. Hal ini membantu dalam menentukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang perlu dikembangkan pada peserta didik. Kurikulum membantu mengarahkan pendidikan ke arah yang diinginkan dan memastikan konsistensi dalam mencapai tujuan tersebut.
3. Menjamin Kualitas Pendidikan, kurikulum berperan penting dalam menjamin kualitas pendidikan. Dengan menyediakan standar dan pedoman yang jelas, kurikulum membantu memastikan bahwa materi yang diajarkan dan metode pembelajaran yang digunakan relevan, akurat, dan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan.
4. Mengembangkan Kompetensi Peserta Didik, kurikulum merancang dan menyusun pengalaman pembelajaran

yang membantu peserta didik mengembangkan berbagai kompetensi yang diperlukan, termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Kurikulum membantu menciptakan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang secara holistik.

5. Menyediakan Konsistensi.

Kurikulum memastikan adanya konsistensi dalam pendidikan antara sekolah, kelas, dan guru yang berbeda. Dengan menggunakan kurikulum yang sama, peserta didik akan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang setara dan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang konsisten.

6. Responsif terhadap Perubahan.

Kurikulum juga harus responsif terhadap perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Dengan memperbarui dan menyesuaikan kurikulum, pendidikan dapat tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini. Kurikulum yang responsif membantu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tuntutan dunia yang terus berubah.

Secara keseluruhan, kurikulum berperan penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran, mengarahkan pendidikan ke arah yang diinginkan, dan memastikan kualitas pendidikan yang baik. Kurikulum membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik.

1.3.1. Fungsi Kurikulum

Di Indonesia, kurikulum (Saufi and Hambali, 2019), (Ananda and Hudaidah, 2021), (Hamdi, 2020), dan (Adnan, 2019) memiliki beberapa fungsi penting. Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi-fungsi tersebut:

1. Mengatur dan Mengarahkan Pembelajaran.

Fungsi utama kurikulum adalah mengatur dan mengarahkan proses pembelajaran di lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi. Kurikulum memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, kurikulum membantu guru dan siswa dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan pembelajaran.

2. Menentukan Standar Pendidikan.

Kurikulum memiliki fungsi penting dalam menentukan standar pendidikan di Indonesia. Ini mencakup standar pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan peserta didik capai. Kurikulum menetapkan standar tersebut agar kualitas pendidikan dapat terjamin dan konsisten di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.

3. Mengembangkan Kompetensi Peserta Didik.

Salah satu fungsi utama kurikulum adalah mengembangkan kompetensi peserta didik. Kurikulum dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi, akademik, dan profesional. Dengan kurikulum yang tepat, peserta didik dapat memperoleh keterampilan yang relevan dan kompetitif sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Mengintegrasikan Nilai-Nilai dan Karakter.

Kurikulum juga memiliki peran dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan karakter yang diinginkan dalam pendidikan. Di Indonesia, kurikulum mencakup pengembangan karakter, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Kurikulum membantu dalam membentuk sikap, perilaku, dan moralitas peserta didik.

5. Membangun Keterampilan Abad ke-21.

Kurikulum di Indonesia juga memiliki peran dalam membangun keterampilan abad ke-21 pada peserta didik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan keterampilan seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, kritis berpikir, kreativitas, pemecahan masalah, literasi digital, dan kemampuan adaptasi. Hal ini penting untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dunia yang terus berubah dan globalisasi.

6. Responsif terhadap Perubahan.

Kurikulum juga harus responsif terhadap perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum perlu diperbarui dan disesuaikan secara berkala agar tetap relevan dan up-to-date. Fungsi ini memastikan bahwa kurikulum selalu mengikuti perkembangan terkini dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tuntutan masa depan.

Secara keseluruhan, kurikulum di Indonesia memiliki fungsi penting dalam mengatur, mengarahkan, dan meningkatkan pembelajaran serta mengembangkan kompetensi, nilai-nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik untuk berhasil dalam kehidupan.

1.3.2. Desain Kurikulum

Desain kurikulum (Rojii *et al.*, 2019), (Aprilia, 2020), dan (Utami, 2020) adalah bagaimana merancang dan mengembangkan kurikulum yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Desain kurikulum merupakan proses merancang dan mengembangkan kurikulum yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Desain ini melibatkan pemikiran yang teliti, analisis mendalam, dan pengambilan keputusan yang cermat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang desain kurikulum (Arifandi and Billah, 2022),

(Fauzan and Arifin, 2022), (Darman, 2021),(Rosyadi, 2021), dan (Fatimah, 2021) :

1. Analisis Kebutuhan.

Desain kurikulum dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan. Hal ini melibatkan memahami tujuan pendidikan, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan di mana kurikulum akan diterapkan. Analisis kebutuhan membantu dalam menentukan apa yang perlu diajarkan dan dipelajari oleh siswa agar relevan dengan kebutuhan mereka dan masyarakat di sekitarnya.

2. Menyusun Tujuan Pembelajaran.

Setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran harus mempertimbangkan standar pendidikan, kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa, dan kebutuhan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan. Tujuan tersebut menjadi panduan dalam merancang pengalaman pembelajaran yang tepat supaya tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dan mencapai sasaran tujuan pendidikan nasional.

3. Menentukan Struktur dan Komponen Kurikulum.

Desain kurikulum melibatkan penentuan struktur dan komponen kurikulum yang akan digunakan. Ini termasuk pemilihan mata pelajaran, pengaturan urutan pembelajaran, pembagian waktu, dan penentuan metode dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Desain juga melibatkan penentuan tingkat kesulitan, ruang lingkup pembelajaran, dan keterkaitan antara berbagai komponen kurikulum.

4. Pemilihan Materi Pembelajaran.

Desain kurikulum melibatkan pemilihan materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi

pembelajaran harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang penting dalam bidang studi yang dipelajari. Pemilihan materi harus mempertimbangkan kebaruan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tren terkini dalam masyarakat.

5. Mengembangkan Metode dan Strategi Pembelajaran.

Desain kurikulum juga melibatkan pengembangan metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Metode pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik siswa, memfasilitasi pemahaman yang mendalam, dan mendorong partisipasi aktif siswa. Desain juga mempertimbangkan penggunaan teknologi dan sumber daya pendukung lainnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

6. Evaluasi dan Penyesuaian.

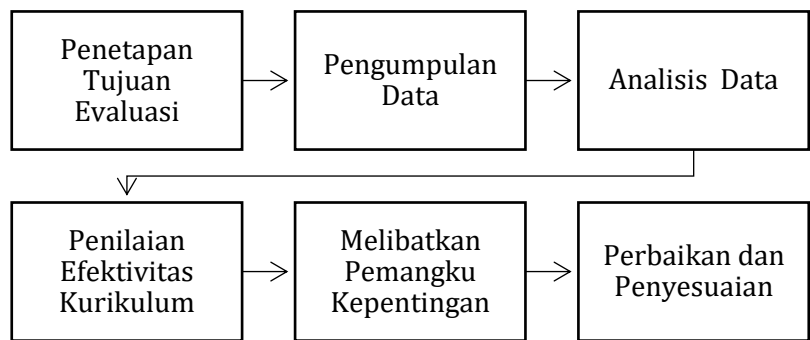
Proses desain kurikulum tidak berakhir setelah implementasi. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan agar kurikulum tetap relevan dan efektif seiring dengan perubahan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Desain kurikulum yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan siswa, tujuan pendidikan, standar pendidikan, serta perkembangan terkini dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan. Desain ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan, menarik, dan bermakna bagi siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan.

1.4. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum (Laksono and Izzulka, 2022) merupakan proses penting untuk memastikan keberhasilan dan keefektifan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang

telah ditetapkan. Di Indonesia, evaluasi kurikulum (Anas, 2022), (Muttaqin, 2020), (Farid, 2020), (Fuadi and Anas, 2019), dan (Busthomi and A'dlom, 2019) dilakukan melalui beberapa langkah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berikut gambar 1.2. adalah langkah-langkah rinci dalam mengevaluasi kurikulum di Indonesia:



Gambar 1.2 Langkah-Langkah dalam Mengevaluasi Kurikulum di Indonesia

1. **Penetapan Tujuan Evaluasi.**
Langkah pertama adalah menetapkan tujuan evaluasi yang jelas. Tujuan ini dapat berupa menilai pencapaian tujuan pembelajaran, efektivitas metode pembelajaran, relevansi materi pembelajaran, responsivitas terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat, atau aspek-aspek lain yang dianggap penting dalam kurikulum.
2. **Pengumpulan Data.**
Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data yang relevan untuk evaluasi. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi kelas, wawancara dengan siswa dan guru, survei siswa dan orang tua, analisis dokumen kurikulum, dan tes hasil belajar. Data ini akan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi berbagai aspek kurikulum.
3. **Analisis Data.**
Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data secara komprehensif. Data yang

terkumpul dievaluasi untuk melihat pencapaian tujuan pembelajaran, kecocokan antara tujuan dan metode pembelajaran, pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, serta responsivitas kurikulum terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Analisis data membantu dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kurikulum yang dievaluasi.

4. Penilaian Efektivitas Kurikulum.

Evaluasi juga melibatkan penilaian efektivitas kurikulum. Efektivitas dapat dinilai berdasarkan hasil belajar siswa, tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, dan pengaruh kurikulum terhadap perkembangan kompetensi siswa. Evaluasi juga dapat melibatkan perbandingan antara kurikulum dengan standar pendidikan nasional atau internasional untuk mengukur tingkat keberhasilan.

5. Melibatkan Pemangku Kepentingan.

Evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, ahli pendidikan, dan pihak terkait lainnya. Pemangku kepentingan memberikan masukan dan umpan balik tentang pengalaman mereka dengan kurikulum yang dievaluasi. Hal ini membantu dalam memperoleh perspektif yang beragam dan holistik tentang kualitas dan efektivitas kurikulum.

6. Perbaikan dan Penyesuaian.

Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pada kurikulum yang dievaluasi. Temuan evaluasi menjadi dasar bagi penyusunan rencana perbaikan yang lebih baik. Perubahan yang diperlukan dapat dilakukan pada struktur kurikulum, metode pembelajaran, materi pembelajaran, atau komponen lainnya. Perbaikan dan penyesuaian kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas kurikulum terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat.

Dalam konteks evaluasi kurikulum di Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud (Balitbang Kemendikbud) serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPMP) merupakan lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum.

1.5. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum di Indonesia (Hutahaean, 2021), (Aslam, Handayani and ..., 2021), (Fuadi and Anas, 2019), dan (Arnes, Musparidi and Yusmanila, 2023) melibatkan beberapa langkah penting. Mengimplementasikan kurikulum dengan cara yang efektif dan efisien, termasuk dalam hal penggunaan sumber daya dan teknologi yang tepat. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana mengimplementasikan sebuah kurikulum di Indonesia:

1. Penyusunan Panduan Implementasi.

Langkah pertama dalam implementasi kurikulum adalah penyusunan panduan implementasi. Panduan ini berisi petunjuk, prosedur, dan pedoman praktis yang membantu guru dan lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum dengan tepat. Panduan tersebut mencakup informasi tentang tujuan kurikulum, struktur kurikulum, metode pembelajaran, materi pembelajaran, penilaian, dan sumber daya yang diperlukan.

2. Pelatihan dan Pengembangan Guru.

Guru merupakan aktor kunci dalam implementasi kurikulum. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan guru sangat penting. Guru perlu diberikan pelatihan yang relevan untuk memahami kurikulum baru, metode pembelajaran yang efektif, dan penggunaan sumber daya pendukung. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh Balai Pengembangan Pendidikan (BPP) atau lembaga pendidikan lainnya yang berwenang.

3. Rencana Pembelajaran.

Setelah memahami kurikulum, guru merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan konten kurikulum. Rencana pembelajaran meliputi penentuan materi yang akan diajarkan, metode pembelajaran yang digunakan, penilaian yang akan dilakukan, dan sumber

daya yang diperlukan. Rencana pembelajaran ini diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan siswa di setiap kelas.

4. Implementasi di Kelas.

Kurikulum diimplementasikan melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Guru menggunakan rencana pembelajaran yang telah disusun untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Mereka menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Selama implementasi, guru memberikan bimbingan, mendukung, dan memfasilitasi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

5. Pemantauan dan Evaluasi.

Implementasi kurikulum perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala. Pemantauan dilakukan untuk melihat sejauh mana kurikulum dijalankan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, efektivitas metode pembelajaran, dan respons siswa terhadap kurikulum. Pemantauan dan evaluasi ini dapat melibatkan penggunaan instrumen penilaian, observasi kelas, serta umpan balik dari siswa, guru, dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Penyempurnaan dan Perbaikan.

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan kurikulum. Temuan evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam implementasi kurikulum. Perubahan dan penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan meningkatkan hasil pembelajaran siswa.

7. Kolaborasi dan Sinergi.

Implementasi kurikulum di Indonesia juga melibatkan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, guru, orang tua, komunitas, dan pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan keberlanjutan implementasi kurikulum di semua tingkatan pendidikan.

Dengan melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kurikulum di Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum di Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dengan beberapa faktor pendukung yaitu sebuah kebijakan dan Pedoman Jelas. Adanya kebijakan dan pedoman yang jelas dari pemerintah mendukung implementasi kurikulum. Kebijakan ini meliputi penetapan standar pendidikan nasional, panduan implementasi, dan rencana strategis pendidikan. Pedoman yang jelas memberikan arahan yang tegas kepada lembaga pendidikan dan guru dalam melaksanakan kurikulum.

Dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan guru. Guru memiliki peran sentral dalam implementasi kurikulum. Pelatihan dan pengembangan guru yang memadai membantu mereka memahami kurikulum yang baru, menguasai metode pembelajaran yang efektif, dan menggunakan sumber daya pendukung dengan baik. Dengan adanya pelatihan yang berkualitas, guru dapat mengajar dengan lebih baik sesuai dengan tujuan kurikulum. Implementasi kurikulum yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk buku teks, materi pembelajaran, alat bantu mengajar, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memastikan ketersediaan sumber daya tersebut agar guru dan siswa dapat menggunakan mereka secara optimal dalam proses pembelajaran. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus dilakukan untuk mengukur efektivitas implementasi kurikulum. Dengan pemantauan yang baik, dapat terdeteksi masalah atau hambatan dalam implementasi yang dapat segera ditindaklanjuti. Evaluasi berkala membantu dalam memperbaiki dan mengadaptasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Kolaborasi antara pemangku kepentingan. Implementasi kurikulum yang sukses juga membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, guru, orang tua, komunitas, dan pemerintah. Kolaborasi ini

memungkinkan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya untuk mendukung implementasi yang efektif. Responsivitas terhadap perubahan dan kemajuan.

Kurikulum perlu responsif terhadap perubahan dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan global. Fleksibilitas dalam merespons perubahan memungkinkan kurikulum untuk tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, dan dukungan yang memadai, kurikulum di Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, yaitu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi, nilai-nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan.

1.6. Kesimpulan

Kurikulum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Kurikulum yang baik dan efektif dapat memberikan pedoman yang jelas bagi guru dan siswa, menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna, serta mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Implementasi yang baik dari kurikulum membutuhkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, guru, orang tua, komunitas, dan pemerintah. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Dengan dukungan yang memadai, kurikulum di Indonesia dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan mempersiapkan siswa untuk sukses dalam kehidupan.

Berdasarkan paparan sebelumnya, berikut adalah beberapa saran terkait kurikulum di Indonesia:

1. Perkuat Pelatihan dan Pengembangan Guru.

Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pelatihan dan

pengembangan guru secara teratur. Guru perlu diberikan pelatihan yang berkualitas tentang kurikulum baru, metode pembelajaran inovatif, dan penggunaan teknologi pendidikan. Hal ini akan membantu guru dalam melaksanakan kurikulum dengan lebih baik.

2. Tinjau dan Perbarui secara Berkala.

Kurikulum perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan kebutuhan siswa. Proses tinjauan harus melibatkan para ahli pendidikan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kurikulum terus berkembang dan sesuai dengan tuntutan zaman.

3. Tingkatkan Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan.

Kolaborasi yang erat antara lembaga pendidikan, guru, orang tua, komunitas, dan pemerintah sangat penting dalam implementasi dan evaluasi kurikulum. Dibutuhkan forum diskusi, pertemuan rutin, dan saling berbagi pengalaman untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi dalam pelaksanaan kurikulum.

4. Tingkatkan Ketersediaan Sumber Daya.

Penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti buku teks, materi pembelajaran, teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya. Sumber daya yang memadai akan membantu guru dalam melaksanakan kurikulum dengan baik dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik kepada siswa.

5. Tingkatkan Pemantauan dan Evaluasi.

Proses pemantauan dan evaluasi kurikulum perlu ditingkatkan. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus melaksanakan pemantauan yang berkala, menggunakan instrumen penilaian yang sesuai, serta memperoleh umpan balik dari siswa, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi ini harus digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyesuaian kurikulum.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan kurikulum di Indonesia dapat terus meningkat dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, yaitu menciptakan peserta didik yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, G. (2019) *Hakikat Pembelajaran Sains dalam Inovasi Kurikulum Karakter*. repository.ar-raniry.ac.id. Available at: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14060/>.
- Ananda, A. P. and Hudaidah, H. (2021) 'Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa', ... *Sejarah dan* Available at: <https://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/1192>.
- Anas, M. H. (2022) 'Evaluasi Kurikulum MIS TI Al-Mushthafawiyah', *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan* Available at: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/article/view/12935>
- Aprilia, W. (2020) 'Organisasi dan Desain Pengembangan Kurikulum', *Islamika*. Available at: <https://www.ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/711>.
- Arifandi, A. and Billah, M. E. M. (2022) 'Pengembangan Kurikulum Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian* Available at: <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/KYM/article/view/1498>.
- Arnes, A., Muspardi, M. and Yusmanila, Y. (2023) 'Analisis Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Oleh Guru PPKn untuk Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka', *Edukatif: Jurnal Ilmu* Available at: <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/4647>.
- Aslam, A., Handayani, S. L. and ... (2021) 'Peningkatan Kemampuan Guru Sdn Ngargogondo Magelang dalam Melakukan Penilaian melalui Workshop Evaluasi Kurikulum 2013', *JMM (Jurnal Masyarakat* Available at: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5246>.

- Busthomi, Y. and A'dlom, S. (2019) 'Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum Pendidikan Di Pondok Pesantren Desa Ganjaran Gondanglegi Malang', *Jurnal Pendidikan Islam*. Available at: <http://journal.stitmupaciran.ac.id/ojs/index.php/ojs/article/view/60>.
- Chamisijatin, L. and Permana, F. H. (2020) *Telaah Kurikulum*. books.google.com. Available at: https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=cJzzDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=hakikat+kurikulum%5C&ots=HWwET_BCCn%5C&sig=rZG_0HCm1ZRj0RaE6G36tVHAav4.
- Darman, R. A. (2021) *Telaah Kurikulum*. books.google.com. Available at: <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=ndpMEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA126%5C&dq=hakikat+kurikulum%5C&ots=N62NNms4W4%5C&sig=ZsQvZHGCQARmd19lOtzFjU8yHo>.
- Darmansah, D. (2022) 'Model Evaluasi Kurikulum dalam Pembelajaran', *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. Available at: <http://eprints.umsida.ac.id/9585/>.
- Farid, A. (2020) 'Analisis Evaluasi Kurikulum Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta', *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*. Available at: <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alhikmah/article/view/3963>.
- Fatimah, I. F. (2021) 'Strategi Inovasi Kurikulum', *EduTeach: Jurnal Edukasi dan Teknologi* Available at: <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/eduteach/article/view/2412>.
- Fauzan, M. A. and Arifin, F. (2022) *Desain Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21*. books.google.com. Available at: <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=q0x1EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA72%5C&dq=hakikat+kurikulum%5C&ots=UeyulFb3R5%5C&sig=cmFx>

2vslie4CEc08qdjPina68Qg.

- Fuadi, A. S. and Anas, M. (2019) 'Implementasi Model CIPP dalam Evaluasi Kurikulum 2013 Pendidikan Ekonomi', *Prosiding Seminar Pendidikan dan* Available at: <http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/4080>.
- Hamdi, M. M. (2020) 'Evaluasi kurikulum pendidikan', *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Hutahaean, B. (2021) *Pengembangan Model Evaluasi Kurikulum Multidimensi untuk Kurikulum Berbasis Kompetensi*. books.google.com. Available at: <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=k3w9EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR1%5C&dq=evaluasi+kurikulum%5C&ots=q3aKcYG8TA%5C&sig=mPeljyp9AfHBuWy3w3SJlQH7xnU>.
- Insani, F. D. (2019) 'Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam* Available at: <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/132>.
- Isnaini, L. and Surawan, S. (2022) 'Analisis Perencanaan Kurikulum Merdeka Ma Manbail Futuh Kabupaten Tuban', *Prosiding SNasPPM*. Available at: <http://prosiding.unirow.ac.id/index.php/SNasPPM/article/view/1438>.
- Jannah, M. M. and Rasyid, H. (2023) 'Kurikulum Merdeka: Persepsi Guru Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia* Available at: <https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/3800>.
- Jeflin, H. and Afriansyah, H. (2020) *Pengertian Kurikulum, Proses Administrasi Kurikulum Dan Peran Guru Dalam Administrasi Kurikulum*. osf.io. Available at: <https://osf.io/kge3m/download>.
- Laksono, T. A. and Izzulka, I. F. (2022) 'Evaluasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*.

- Available at:
<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/2776>.
- Manurung, L. (2019) 'Sejarah Kurikulum di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Available at:
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/98>.
- Movitaria, M. A., Amnillah, M. and Anirah, A. (2022) *Pengembangan kurikulum*. repository.uindatokarama.ac.id. Available at:
[http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1966/1/PCX - Report buku pengembangan kurikulum.pdf](http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1966/1/PCX-Report%20buku%20pengembangan%20kurikulum.pdf).
- Muttaqin, M. E. (2020) 'Evaluasi Kurikulum Pendidikan Islam', *Prosiding Nasional*. Available at:
<http://iainkediri.ac.id/prosiding/index.php/pascasarjana/article/view/49>.
- Nidawati, N. (2021) 'Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam', *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan* Available at:
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/8427>.
- Pratiwi, I. (2019) 'Efek program PISA terhadap kurikulum di Indonesia', *Jurnal pendidikan dan Kebudayaan*. Available at:
<http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/1157>.
- Rojii, M. et al. (2019) 'Desain Kurikulum Sekolah Islam Terpadu (Studi Kasus di SMPIT Insan Kamil Sidoarjo)', *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen* Available at:
<https://core.ac.uk/download/pdf/270264906.pdf>.
- Rosyadi, F. I. (2021) 'Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan Islam: Kajian Teoritis Filosofis', *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education*. Available at: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/HJIE/article/view/4529>.
- Saufi, A. and Hambali, H. (2019) 'Menggagas Perencanaan Kurikulum Menuju Sekolah Unggul', *Al-Tanzim: Jurnal*

Manajemen Pendidikan Available at:
<http://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/497>.

Suratno, J., Sari, D. P. and Bani, A. (2022) 'Kurikulum dan Model-model Pengembangannya', *Jurnal Pendidikan Guru Available at:*
<http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/matematika/article/view/4129>.

Suryaman, M. (2020) 'Orientasi pengembangan kurikulum merdeka belajar', *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Available at:*
<https://ejournal.unib.ac.id/semiba/article/view/13357>.

Utami, R. L. (2020) 'Desain Kurikulum Bahasa Arab di Indonesia', *EL-IBTIKAR: Jurnal Pendidikan Available at:*
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1725254%5C&val=11625%5C&title=Desain Kurikulum Bahasa Arab di Indonesia>.

BAB 2

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Oleh Karten Halirat, s.Pd., M.Pd.

2.1. Pendahuluan

Salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan proses Pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan dasar pijakan pelaksanaan pendidikan karena merupakan deskripsi dari visi, misi dan tujuan suatu bangsa sehingga kurikulum diposisikan sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Seiring perkembangan dunia yang mengakibatkan banyak terjadinya dinamika perubahan sosial maka kurikulum pun mutlak harus fleksibel dan futuristik sehingga output pendidikan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan dapat beradaptasi dengan dinamika kehidupan yang terjadi. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pemerintah, tokoh maupun pemerhati pendidikan perlu untuk mengikuti setiap episode perubahan sosial sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendesain dan mengembangkan kurikulum.

Mengingat begitu krusialnya peran kurikulum dalam pendidikan maka pengembangan kurikulum tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Artinya, harus didasarkan pada berbagai pertimbangan atau landasan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Apabila kurikulum tidak didasarkan pada pijakan yang kuat, maka akan mudah terombang-ambing sehingga akan mengorbankan

manusia yang dihasilkan dari pendidikan itu sendiri (Mubarok *et al.*, 2021)

Dalam (Aliyyah *et al.*, 2019) dikemukakan empat landasan utama pengembangan kurikulum, diantaranya: landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosial-budaya dan landasan ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.2. Landasan Filsafat

Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan filsafat karena filsafat secara mendasar membahas tentang hakikat atau eksistensi Tuhan, manusia dan alam semesta beserta segala isinya. Kurikulum tanpa kehadiran filsafat adalah sesuatu yang tidak berguna atau sia-sia artinya filsafat dan kurikulum pada hakekatnya dipakai untuk menjawab pertanyaan "manusia atau anak didik akan dibentuk seperti apa setelah diimplementasikan suatu kurikulum apakah anak menjadi manusia yang memiliki iman, ketaqwaan, akhlak yang mulia, memiliki kecakapan, kecerdasan, kreatifitas ataukah menjadi pengangguran intelektual (Rachman, 2018).

John Goodlad dalam (Rachman, 2018) diungkapkan bahwa filsafat dalam kurikulum digunakan untuk menentukan tujuan akhir pembelajaran, proses, metode, pemilihan fakta-fakta, konsep, prinsip, pengalaman, budaya serta perilaku peserta didik yang dirasakan penting dalam proses pendidikan. Aliran filsafat yang dijadikan sebagai landasan pengembangan kurikulum adalah aliran idealisme, Realisme, pragmatisme dan eksistensialisme.

2.2.1. Landasan Filsafat Idealisme

Aliran filsafat idealisme dikemukakan oleh Plato yang didasarkan pada ide-ide atau gagasan. Filsafat idealisme menekankan bahwa moral, spiritual, kebenaran dan nilai merupakan sesuatu yang absolute dan berlaku secara universal serta kebenarannya tidak dibatasi oleh waktu Ide atau pikiran adalah tetap, teratur dan tertib sehingga untuk mengetahui ide

yang bersifat laten atau ide bawaan adalah dengan cara berpikir sehingga tugas guru adalah membangun pengetahuan peserta didik dengan cara mengembangkan keterampilan berpikir atau belajar adalah cara untuk melatih pikiran. Filsafat idealisme menghendaki pengembangan serta pengimplementasian kurikulum dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi lebih ditekankan pada pentingnya pengabdian nilai-nilai (*value*) dan moral. Nilai dan moral adalah sesuatu yang abadi, tidak mudah lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas. Pegangan hidup berupa nilai dan moral yang diajarkan kepada peserta didik bersumber dari agama, budaya dan filsafat hidup yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu. Aliran filsafat idealisme selain bersifat normatif, juga lebih menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir melalui belajar matematika.

Penerapan aliran filsafat idealisme dalam pendidikan dapat terlihat pada proses belajar mengajar (PBM) lebih didominasi oleh guru artinya guru menjadi pusat sumber pengetahuan bagi siswa. Siswa hanya menerima apa yang diajarkan oleh guru sehingga siswa menjadi pasif selama PBM berlangsung. Selain itu, evaluasi hasil belajar siswa cenderung kuantitatif, artinya pengembangan intelektual menempati posisi tertinggi bila dibandingkan dengan pengembangan keterampilan dan sikap. Sumbangan terbesar aliran idealisme terhadap kurikulum terlihat setiap lembaga pendidikan mewajibkan adanya pembelajaran matematika, nilai-nilai moral, kecerdasan spiritual dan agama. Menurut Plato, pendidikan memiliki tujuan akhir untuk menciptakan siswa yang mencintai kebijaksanaan. Pengembangan kecerdasan berpikir merupakan sumbangan filsafat idealisme terhadap pendidikan (Juanda, 2014).

2.2.2. Landasan Filsafat Realisme

Perbedaan antara landasan filsafat idealisme dan filsafat realisme adalah landasan filsafat idealisme memiliki keyakinan bahwa pengetahuan didasarkan pada ide bawaan dan kebenarannya bersifat universal sedangkan filsafat realisme

memiliki pandangan bahwa pengetahuan dan kebenaran diperoleh dari sains.

Dampak filsafat realisme terhadap pengembangan kurikulum pada berbagai tingkat pendidikan adalah lebih mengutamakan penelitian ilmiah untuk memperoleh kebenaran ilmu yang didasarkan pada kebenaran atau fakta yang dapat diamati oleh panca indera serta dapat diukur secara matematis. Hal ini dapat terlihat dari adanya pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sebagai mata pelajaran yang mempelajari tentang kebendaan. Dalam filsafat realisme, kebenaran nilai dan norma dilihat dari tindakan seseorang yang dapat diamati secara kasat mata. Artinya, baik atau buruknya perilaku seseorang, benar atau salah, jujur atau bohong serta perilaku lainnya dapat diukur, Sukmadinata, 2006 dalam (Rachman, 2018)

Penerapan filsafat idealisme dalam proses belajar mengajar di kelas pada prinsipnya sama dengan filsafat idealisme yaitu proses belajar mengajar yang bersifat *teacher centered learning (TCL)* atau pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga guru lebih aktif dibandingkan dengan siswa. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar selain lebih ditekankan pada hasil riset, ditekankan juga pada kemampuan rasio (akademik).

2.2.3. Landasan Filsafat Pragmatisme

Landasan filsafat pragmatisme identik dengan filsafat eksperimentalisme yang menuntut adanya perubahan (*change*), proses (*process*), dan relativitas (*realtivity*). Filsafat pragmatisme menekankan bahwa dalam memperoleh pengetahuan maka perlu dikonstruksi melalui proses dan didasarkan pada keadaan yang menuntut perubahan secara konsisten. Proses memperoleh pengetahuan perlu melibatkan pemecahan masalah sehingga terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Perubahan sosial menurut aliran filsafat pragmatisme dihasilkan dari adanya interaksi antara manusia dengan dunia sosial atau dengan lingkungan bukan didasarkan pada keyakinan dan kebenaran universal seperti yang dimaksud filosof tradisional (Idealisme dan Realisme).

Metode mengajar menurut filsafat pragmatisme tidak berkaitan dengan mencerdaskan pola pikir, tetapi mengajar lebih menekankan pada penemuan dan menjelaskan. Metode mengajar lebih penting dari pada materi yang diajarkan. Metode mengajar diorientasikan untuk mencerdaskan intelegensi peserta didik agar mereka menjadi ahli saintis sehingga kaum pragmatistis memandang metode penyelidikan (*investigation*) merupakan suatu metode yang baik, Juanda, 2014 dalam (Rachman, 2018).

Implikasi paham pragmatisme dalam kurikulum adalah untuk merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik atau progresif. Idealnya suatu kurikulum selain menekankan pada pengalaman belajar siswa juga harus diarahkan pada minat yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masa mendatang. Proses belajar mengajar yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki pengalaman belajar siswa berdasarkan metode ilmiah sehingga PBM yang dilaksanakan lebih didasarkan pada pengelompokan dibandingkan dengan individual serta lebih menekankan pada pemecahan masalah.

2.2.4. Landasan Filsafat Eksistensialisme

Aliran eksistensialisme berkeyakinan bahwa persoalan yang dihadapi oleh seseorang dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri. Artinya, seseorang mampu menentukan pilihannya sendiri dalam situasi tertentu baik dalam menghadapi masalah kecil maupun masalah besar.

Kaum eksistensialis berpandangan bahwa peserta didik bebas memilih apa yang ingin dipelajarinya menurut pilihannya sendiri. Pentingnya pengetahuan untuk setiap orang sesuai dengan pilihannya sehingga tugas pendidikan adalah mengembangkan kesadaran kebebasan dalam menentukan pilihan yang bermakna bagi setiap individu. Maka kehidupan suatu bangsa atau suatu kelompok bebas untuk menentukan norma, kekuasaan, membangun tataran sosial, politik, agama dan sebagainya.

Kurikulum dipandang sebagai sesuatu yang meliputi pengetahuan serta materi pelajaran yang telah disediakan dengan jelas kepada setiap peserta didik sehingga pembelajaran dilakukan dengan cara "dialog dan tindakan untuk ditentukan oleh peserta didik. Artinya, pelajaran yang disajikan oleh guru kepada siswa dapat mengandung unsur estetika, filsafat, sastra, drama, film, seni dan lain sebagainya yang penting bagi peserta didik dan mereka diberi kebebasan untuk menentukan sesuai pilihan mereka sendiri.

Juanda, 2014 dalam (Rachman, 2018) mengungkapkan bahwa dampak filsafat eksistensialisme terhadap pengembangan kurikulum yaitu, setiap lembaga pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keadaan sekolah asalkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya dalam proses pembelajaran, kebebasan memilih bukan berarti peserta didik bebas melakukan pelanggaran moral, tetapi atas dasar bimbingan guru, peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah.

2.3. Landasan Psikologis

Dalam mengembangkan kurikulum, ada dua disiplin ilmu psikologis yang dapat digunakan oleh pengembang kurikulum, diantaranya: psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Ilmu Psikologis perkembangan meninjau perkembangan peserta didik dari aspek perkembangan fisiknya sedangkan ilmu psikologi belajar meninjau perkembangan peserta didik dari model serta cara peserta didik dalam belajar. Berikut dijelaskan psikologi perkembangan dan psikologi belajar yang dijadikan sebagai landasan pengembangan kurikulum.

2.3.1. Psikologi Perkembangan Peserta Didik

Dalam upaya memahami peserta didik, harus didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya: 1). Setiap anak memiliki tahapan tertentu dalam proses perkembangan; 2). Keberhasilan dan kesuksesan peserta didik ditentukan oleh tahapan

perkembangannya; 3). Pemahaman yang baik tentang peserta didik akan membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan, (Safaruddin, 2020)

Perkembangan merupakan rangkaian proses perubahan yang terjadi secara progresif sebagai akibat dari kematangan dan pengalaman. Perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua hal yang berbeda. Perkembangan cenderung bersifat kepribadian seperti sikap, kematangan dalam berpikir dan sebagainya, sedangkan pertumbuhan lebih berkaitan dengan fisik manusia. Robert J. Harvighust dalam (Ahmad Nur Kholik, 2019) membagi perkembangan manusia ke dalam enam tahapan. Dalam setiap tahapan tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut disebut sebagai *development task*.

Berikut tahapan perkembangan manusia menurut Robert J. Harvighust:

1. Masa Kanak-kanak (3-12 tahun)

Periode perkembangan pada masa ini dibagi dalam 2 tahapan yaitu, masa kanak yang periode perkembangannya sejak anak berusia (3-8 tahun) dan masa anak yang periode perkembangannya 8-12 tahun). Tugas-tugas perkembangan manusia pada tahapan ini, diantaranya: 1). Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan umum; 2) membangun sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh; 3) belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya; 4) mulai mengembangkan peran sosial; 5) mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis dan berhitung; 6) mengembangkan kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan keseharian; 7) membentuk kata hati, moralitas, dan nilai-nilai; memperoleh kebebasan diri, serta 8) mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial

2. Masa Remaja

Perkembangan manusia pada masa remaja mulai berlangsung sejak anak berumur 12-18 tahun dengan

perkembangan yang pada umumnya terjadi adalah anak mulai mengalami pubertas yakni perubahan fisik dan perangai yang sudah mulai terbentuk dan akan mencapai puncaknya pada usia dewasa.

Tugas-tugas perkembangan manusia pada tahapan ini adalah: 1) mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya; 2) mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita; 3) menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif. 4) mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab; 5) mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa; 6) mempersiapkan karir ekonomi; 7) mempersiapkan perkawinan dan membentuk keluarga; 8) memperoleh peringkat nilai dan sistem etika sebagai dasar perilaku dalam mengembangkan ideologi.

3. Masa Dewasa

Masa dewasa berlangsung dimulai umur 18 tahun sampai 40 tahun. Beberapa tugas perkembangan pada masa dewasa yaitu: 1). Mulai bekerja; 2) memilih pasangan untuk berumah tangga; 3) belajar hidup bersama tunangan; 4) mulai membina keluarga; 5) mengasuh anak; 6) mengelola rumah tangga; 7) mengambil tanggung jawab sebagai warga negara dan (8) mencari kelompok yang menyenangkan

4. Masa Tua

Perkembangan manusia dalam tahapan ini, dibagi menjadi dua fase yakni fase usia pertengahan (40-60 tahun), dan fase lanjut usia yaitu pada usia 60 tahun ke atas. Pada usia pertengahan, manusia memiliki tanggung jawab perkembangan sebagai berikut: 1) mencapai tanggungjawab sosial sebagai warga negara dewasa; 2) membantu anak-anak dan remaja belajar untuk menuju kedewasaan; 3) pengembangan kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang; 4) menghubungkan diri dengan pasangan hidup sebagai individu; 5) menerima serta melakukan penyesuaian diri dengan perubahan fisiologi yang berlangsung; 6) mencapai serta mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karier pekerjaan.

Selanjutnya, pada usia lanjut bentuk tanggungjawab perkembangan sebagai berikut: 1) melakukan penyesuaian diri berkenaan menurunnya kekuatan dan kesehatan; 2) menyuasakan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya pendapatan keluarga; 3) menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidupnya; 4) membangun hubungan dengan orang-orang seusianya; 5) mengatur kehidupan fisik yang memuaskan; 6) menyesuaikan diri dengan peran sosial.

2.3.2. Psikologi Belajar Peserta Didik

Hal mendasar yang menjadi alasan perlu diperhatikan psikologi belajar peserta didik dalam mengembangkan kurikulum adalah setiap anak memiliki karakter yang berbeda dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga untuk memetakan kondisi-kondisi belajar peserta didik maka beberapa teori belajar ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan kondisi belajar peserta didik, diantaranya:

1. Teori Behaviorisme

Teori behaviorisme dipelopori oleh B.F. Skinner dan didasarkan pada karya Pavlov, Thorndike, Hull dan Spence. Teori ini pada hakekatnya adalah sebuah teori yang fokus kajiannya pada stimulus dan respon dari peserta didik. Hasil penelitian Pavlov menunjukkan bahwa tiap bentuk kelakuan spesifik (R) dapat dibangkitkan bila diberikan stimulus yang sepadan (S). Selanjutnya, Skinner melakukan penelitian lagi dengan kesimpulan penelitian adalah manusia akan lebih mudah untuk belajar apabila mendapatkan reinforcement yang bersifat positif, bukan negatif.

Dalam teori ini, peserta didik dipandang sebagai organisme yang memberikan respon terhadap stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya sehingga guru sebagai aktor utama dalam mendesain proses belajar mengajar perlu memberikan stimulus-stimulus yang bersifat positif ketika mengimplementasikan rencana pembelajaran yang dibuat maka peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Adapun proses belajar peserta didik menurut teori behaviorisme adalah:

- a. Reinforcement positif yang berupa pujian dan angka baik
- b. Hukuman, celaan atau tidak memberi penghargaan kepada peserta didik yang masih gagal
- c. Memberikan contoh melalui demonstrasi untuk ditiru
- d. Latihan atau ulangan dapat diberikan sehingga stimulus dan respon dapat dimantapkan lagi. (Safaruddin, 2020)

2. Teori Gestalt

Teori ini dinamakan juga dengan teori lapangan (*field theory*) dengan asumsi bahwa segala sesuatu yang disajikan secara keseluruhan lebih bermanfaat daripada disajikan per bagian. Tokoh dari teori ini adalah Max Wertheimer, Kurt Lewin dan John Dewey. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses untuk mengembangkan *insight* (lompatan) pada anak dengan memperhatikan hubungan antara setiap situasi problematis sehingga mereka dapat melihat makna baru dari situasi tersebut. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik diarahkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, imajinasi, dan berpikir kreatif. Berikut prinsip-prinsip yang dimunculkan oleh teori ini dalam proses pembelajaran yaitu:

- a. Materi ajar disajikan dalam bentuk masalah yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik
- b. Proses dalam kegiatan *problem solving* lebih diutamakan daripada hasil
- c. Belajar dimulai dari penyajian materi secara keseluruhan menuju bagian-bagian
- d. Belajar memerlukan insight atau pemahaman
- e. Belajar adalah proses reorganisasi pengalaman yang dilakukan secara terus-menerus

3. Teori Perkembangan Kognitif

Agar dapat mengakomodir pemahaman peserta didik pada ranah kognitif maka dalam mengembangkan kurikulum salah teori yang dapat digunakan adalah teori perkembangan kognitif Piaget. Teori pengembangan kognitif memandang peserta didik dari segi kematangan mental yang tumbuh secara bertahap

sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, peserta didik harus dibimbing secara cermat dan bahan ajar yang diberikan harus seimbang dengan tingkat perkembangan kognitifnya, (Ahmad Nur Kholik, 2019)

Piaget menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan pokok dalam perkembangan kognitif-intelektual, diantaranya:

a. Tahap Sensori-Motoris (0-2 tahun)

Pada tahap ini, anak mulai mengenal lingkungannya dengan alat indera, Piaget menyebutnya dengan istilah kemampuan primitif artinya kemampuan anak masih berdasarkan perilaku terbuka. Kemampuan kognitif pada masa ini, sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak pada masa perkembangan selanjutnya

b. Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun)

Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak pada tahap ini, ditandai dengan ciri-ciri: hadirnya kesadaran dalam diri anak tentang suatu objek; mulai berkembangnya kemampuan anak dalam berbahasa; anak mulai dapat membedakan objek-objek sebagai bagian individu atau kelasnya; memiliki pandangan terhadap dunia yang hidup; anak mulai mengamati serta memahami situasi lingkungan.

c. Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun)

Pada tahap perkembangan kognitif ini, anak mulai memacu pola pikirnya ketika menjumpai benda-benda yang dirinya temui langsung berdasarkan hasil inderanya serta mampu mengombinasikan berbagai hasil pengamatannya dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan matematika.

d. Tahap Operasional Formal (11-14 tahun)

Dalam tahap perkembangan ini, kemampuan anak untuk berpikir secara sistematis sudah matang yang dapat meliputi rangkaian proses yang kompleks. Aktivitas berpikir pada anak sudah mirip dengan cara berpikir orang dewasa serta mulai memahami hal-hal yang abstrak, (Safaruddin, 2020).

2.4. Landasan Sosial Budaya

Urgensi landasan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum adalah peserta didik berasal masyarakat sehingga mereka memperoleh pendidikan, baik pendidikan formal, informal dan nonformal sehingga peserta didik perlu dipersiapkan sehingga mereka mampu untuk menjalani kehidupannya di tengah masyarakat. Dengan tujuan itu, maka tujuan, isi, maupun proses yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi, karakteristik kekayaan dan perkembangan masyarakat tersebut, (Winarso Widodo, 2015). Secara substansial, landasan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu sisi masyarakat dan kurikulum serta unsur kebudayaan dan kurikulum (Sukirman, 2011)

1. Masyarakat dan kurikulum

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang mengorganisasikan diri sendiri ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Dalam kelompok itu, sudah tentunya memiliki kebudayaan tersendiri sehingga dapat membedakan kelompok satu dengan lainnya. Perbedaan antar kelompok ini diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan menjadi semakin kompleks sehingga terjadi peningkatan tuntutan hidup masyarakat. Dalam menghadapi realitas ini, maka kurikulum perlu mengakomodir setiap perubahan yang terjadi. Berikut disajikan fungsi sosial pendidikan, diantaranya: a) Mengajar keterampilan; Mentransmisikan budaya; mendorong adaptasi lingkungan; membentuk kedisiplinan; dorong untuk bekerja secara kelompok; peningkatan perilaku etik; serta pemilihan bakat dan pemberian penghargaan berprestasi (Ngalim, 2008).

2. Kebudayaan dan Kurikulum

Kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan ide atau gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, serta nilai yang sudah disepakati oleh masyarakat. Kebudayaan adalah bagian yang penting bagi kehidupan bermasyarakat

sehingga dalam pengembangan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal:

- a. Sejak lahir, anak tidak memiliki budaya baik dalam kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Semuanya ini dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya sehingga sekolah memiliki peran untuk memberikan pengalaman-pengalaman pengembangan budaya kepada peserta didik.
- b. Kurikulum pada prinsipnya harus mengakomodir aspek-aspek sosial dan budaya yang beragam seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan dan lain sebagainya sehingga pendidikan perlu mendidik anggota masyarakat (peserta didik) agar dirinya dapat berinteraksi serta menyesuaikan diri dengan anggota masyarakat lainnya sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidupnya sebagai makhluk yang berbudaya.
- c. Nilai-nilai yang telah disepakati dan dijalankan secara bersama oleh masyarakat disebut kebudayaan oleh karena itu, kebudayaan dapat dipahami sebagai suatu konsep dengan kompleksitas yang tinggi, (Ngalim, 2008)

2.5. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dengan pesat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, pendidikan dan lainnya sehingga peserta didik perlu dipersiapkan sejak dini ketika berada di bangku pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan terkuat pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Implikasi perkembangan IPTEK dalam pengembangan kurikulum, antara lain:

1. Dengan mengembangkan kurikulum dengan landasan IPTEK maka diharapkan terjadi peningkatan dan pengembangan kemampuan berpikir peserta didik sehingga mereka dapat menghasilkan teknologi yang baru sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia;
2. Dengan berlandaskan IPTEK dalam pengembangan kurikulum maka peserta didik diharapkan mampu untuk mengenali serta melakukan revitalisasi produk teknologi yang telah lama digunakan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK itu sendiri;
3. Implikasi landasan IPTEK terhadap pengembangan kurikulum mencakup pengembangan isi/materi pelajaran, penggunaan media dan strategi pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi sehingga peserta didik mampu menggunakan teknologi dalam memecahkan suatu masalah.

Perkembangan IPTEK dalam pengembangan kurikulum dapat berdampak positif maupun negatif dalam pelaksanaan pendidikan.

1. Dampak positif
 - a. Dapat dilakukan pembelajaran jarak jauh
 - b. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang dapat memudahkan siswa dan guru dalam PBM
 - c. Pengaksesan informasi/pengetahuan yang akurat secara cepat dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar
 - d. Hadirnya media-media pembelajaran dalam bentuk audio-visual yang interaktif sehingga memudahkan guru dalam menjelaskan materi serta memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan
2. Dampak Negatif
 - a. Penyalahgunaan teknologi yang lainnya adalah pengetahuan untuk melakukan tindak kriminal yang tidak dibenarkan
 - b. Menurunnya motivasi dan prestasi belajar siswa
 - c. Besarnya kecenderungan anak meniru perilaku negatif dari tokoh/idola dalam sosial media, film, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nur Kholik (2019) 'Landasan Psikologis Pengembangan Kurikulum ABAD 21', *As-Salam I*, VIII, pp. 65–86.
- Aliyyah, R.R. *et al.* (2019) *Manajemen Lembaga Pendidikan*.
- Juanda, A. (2014) *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik KTSP*. Cirebon: Nurjati Press.
- Mubarok, A.A. *et al.* (2021) 'Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia', *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), pp. 103–125. Available at: <https://doi.org/10.47467/jdi.v3i2.324>.
- Ngalim, P.M. (2008) *Ilmu Pendidikan: Teoritis dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rachman, T. (2018) *Landasan Kurikulum, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Safaruddin, S. (2020) 'Landasan Pengembangan Kurikulum', *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 7(2), pp. 98–114. Available at: <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v7i2.195>.
- Sukirman, D. (2011) *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: PT. Rajawali Pers.
- Winarso Widodo (2015) *Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Cirebon: CV. Confident.

BAB 3

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Oleh Siti Nur Fikriyah, M.Pd

3.1. Pendahuluan

Kurikulum merupakan perangkat yang berpengaruh terhadap kemajuan perkembangan lembaga pendidikan. Kurikulum menjadi salah satu sistem perencanaan belajar yang menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan dengan berisikan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran sebagai pedoman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan bangsa.

Kurikulum ialah berisikan mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Oemar Hamalik, 2015). Kurikulum memiliki suatu niat dan harapan-harapan yang dituangkan berupa rencana maupun program pendidikan untuk dilaksanakan oleh para pendidik pada lembaga pendidikan (Nana Sudjana Tahun, 2005). Adanya kurikulum dalam Lembaga Pendidikan itu mempermudah semua manusia yang dilibatkan dan terlibat dalam proses kegiatan-kegiatan belajar dan mempermudah proses mencapai tujuan pembelajaran. Dengan begitu tidak ada lagi kebingungan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Indonesia merupakan negara yang mengalami beberapa perubahan dan pengembangan kurikulum. Pergantian kurikulum memiliki perubahan disetiap tahunnya dimulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif 1984, kurikulum 1994, kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, hingga kurikulum 2013 (Wahyuni, 2020). Berdasarkan hasil survei oleh Programme for International Student Assessment bahwa Indonesia menempati peringkat 72 dari 77 negara. Data ini menjelaskan Indonesia berada pada peringkat enam terbawah dan berada jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam. Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan dunia berdasarkan kemampuan membaca, matematika, dan sains (Hamami, 2020).

Perkembangan kurikulum telah memiliki banyak perubahan disetiap periodenya dengan mengikuti perkembangan zaman. Pada hakikatnya dalam proses perkembangan kurikulum, ada salah satu komponen yang harus diketahui oleh semua pihak terlibat langsung dengan kurikulum yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip ini merupakan prinsip paling dasar dalam penyusunan sebuah kurikulum.

Prinsip kurikulum dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari jantungnya kurikulum, jika tidak ada prinsip dalam sebuah kurikulum artinya kurikulum itu tidak bermakna. Agar perkembangan kurikulum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan, maka harus didasarkan dengan adanya prinsip kurikulum yang berlaku. Prinsip pengembangan kurikulum juga harus selalu ada evaluasi sebagai usaha pembenahan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirancang.

3.2. Sumber Prinsip Pengembangan Kurikulum

Menurut sukmadinata, sumber prinsip itu berisikan tentang kehidupan dan pekerjaan seseorang, budaya, masyarakat, anak, nilai, kekuasaan sosial-politik, dan pengalaman penyusunan kurikulum. Dikatakan sebagai

kehidupan bahwa isi kurikulum akan disesuaikan dalam mempersiapkan anak untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan menjadikannya dewasa yang akan bekerja. Pada budaya dan masyarakat ini anak akan tumbuh pada lingkungan yang berbeda, maka diperlukan sebuah analisis untuk mengetahui dan mengarahkan anak sesuai dengan budaya dan kebiasaan bermasyarakat yang beragama (Sukmadinata, 2004).

Anak merupakan sumber, penyusunan kurikulum ini akan dipersembahkan untuk mendukung perkembangan anak baik dari segi keilmuan, keagamaan, dan beragam pengetahuan lainnya. Berdasarkan nilai dan kekuasaan sosial-politik pada penyusunan kurikulum merupakan bentuk lembaga kebijakan dan produk politik yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Sehingga dapat menentukan isi dalam sebuah kurikulum dengan aturannya. Peter F Olivia mengemukakan pada prinsip kurikulum setidaknya ada 4 sumber acuan dalam pengembangan kurikulum yaitu: data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada didalamnya dan pemahaman bersama dalam bermasyarakat (Prasetyo, 2020).

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa sumber prinsip itu harus menjadi sebuah pertimbangan sebagai tambahan sumber yang harus diketahui dalam prinsip-prinsip pada penyusunan kurikulum. Jika sumber prinsip tidak digunakan semua tapi sebagai seorang yang menyusun kurikulum haruslah mengetahuinya.

3.3. Prinsip-prinsip Perkembangan Kurikulum

Setiap jenjang pendidikan pasti memiliki pedoman pelaksanaan pembelajaran. Pedoman itu disebut dengan kurikulum. Pada penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan itu harus disusun berdasarkan prinsip perkembangan kurikulum. Seorang kurikulum dapat menggunakan beberapa prinsip yang akan dipegang sebagai acuan guna menghasilkan sebuah kurikulum yang sesuai harapan dan tujuan pendidikan (Hamalik, 2008).

Menurut Oemar Hamalik, prinsip-prinsip perkembangan kurikulum yaitu:

1. Peberbagai keputusan berupa konten dan proses rencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman setiap peserta didik.
2. Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan Perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman para siswa.
3. Perencanaan kurikulum mengandung berbagai keputusan tentang isu dan topik.
4. Perencanaan kurikulum melibatkan banyak orang/kelompok.
5. Perencanaan kurikulum dilaksanakan sesuai level (tingkatan).
6. Perencanaan kurikulum merupakan suatu proses yang berkelanjutan.

Terdapat berbagai prinsip yang dapat digunakan dalam perkembangan kurikulum. Prinsip kurikulum ini terbagi menjadi 2 yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum itu biasanya digunakan oleh seluruh lembaga pendidikan dalam proses penyusunan kurikulum. Sedangkan untuk prinsip khusus itu biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan hanya berlaku di lembaga pendidikan tertentu saja.

A. Prinsip umum

1. Prinsip Relevansi

Istilah relevansi dalam pendidikan berupa kesesuaian pendidikan dengan tuntunan kehidupan. Pendidikan akan dikatakan relevan apabila hasil dari pendidikan mampu berguna bagi kehidupan setiap orang. Permasalahan relevansi pendidikan dengan kehidupan dapat ditinjau dari 4 aspek, yaitu relevansi pendidikan terhadap lingkungan belajar, relevansi pendidikan terhadap kehidupan selanjutnya (mendatang), relevansi pendidikan terhadap dunia kerjaan, relevansi pendidikan terhadap keilmuan.

Prinsip relevansi terdiri terbagi 2. pertama relevansi keluar berupa kesesuaian isi, tujuan, dan proses kegiatan belajar yang termuat dalam kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan. Sedangkan relevansi dalam mengacu pada konsistensi kesesuaian antara komponen kurikulum seperti isi, tujuan, proses kegiatan belajar dan evaluasi belajar (sanjaya, 2009).

Kesimpulannya, bahwa pada prinsip relevansi mengharuskan adanya kesesuaian antara isi, tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar dan evaluasi yang dibutuhkan agar mutu pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dalam lembaga pendidikan dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan bangsa. Ilmu pengetahuan yang akan diajarkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman.

2. Prinsip fleksibel

Fleksibel artinya adanya kebebasan untuk memilih. Prinsip fleksibel terbagi kedalam 2 macam, yaitu fleksibel dalam pengembangan program mengajar dan fleksibel dalam pemilihan program pendidikan. Prinsip fleksibel berarti dalam pelaksanaan harus disesuaikan dengan kondisi, waktu, kemampuan dan latar belakang peserta didik serta dapat menawarkan berbagai program pilihan dalam kegiatan ekstrakurikuler (Ayudia, 2003). Adanya prinsip fleksibel ini memudahkan semua yang terlibat dalam kemajuan pendidikan, sehingga apa saja yang dibutuhkan peserta didik dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

3. Prinsip efektifitas

Prinsip efektifitas ialah sejauh mana tujuan yang diterpkan itu telah bagus atau tidak. Salah satu tujuannya yaitu menunjukkan kegiatan belajar yang telah dirancang terlaksana dengan baik dan sudah sampai mana kegiatan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Sehingga semuanya membuahkan sebuah hasil yang bagus. Namun jika belum sesuai

dapat diusahakan dengan perbaikan jika ada kesalahan atau ada tujuan dan rancangan yang belum sesuai.

4. Prinsip kontinuitas

Prinsip kontinuitas menunjukkan perkembangan dan proses pendidikan harus berkesinambungan dan terus menerus, dengan begitu semua bisa dipastikan untuk bahan dan materi ajar. Adanya hubungan saling keterkaitan dan terus menerus juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Sehingga tidak ada tumpang tindih materi yang disampaikan dalam proses kegiatan belajar.

5. Prinsip tujuan dan kompetensi

Tujuan ini dimaksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan besisikan semua aspek kegiatan peserta didik berupa afektif, psikomotorik dan kognitifnya. Kemudian ada kompetensi yang berisikan semua perpaduan keilmuan berupa ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan ilmu keterampilan dan ilmu bersikap yang tertuang kedalam proses berpikir dan bertindak.

6. Prinsip sinkronisasi

Prinsip ini digunakan untuk mengusakan semua kegiatan baik intrakulikuler dan ekstrakulikuler dapat terhubung dengan baik. Jangan sampai pengalaman belajar pada intrakulikuler mengganggu perkembangan belajar pada ekstrakulikuler, begitupun sebaliknya. Sehingga semuanya dapat serasi, seimbang, satu arah, dan satu tujuan.

7. Prinsip efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan usaha yang ingin dicapai dalam kegiatan pendidikan berupa efisiensi, waktu, peralatan, tenaga pendidik, sarana, biaya dan lainnya. Semua itu tergantung kepada pemanfaatan dalam prosesnya, bukan hanya pada barang mahal saja tapi pada penggunaan barang bekas atau murah pemeliharaan barangnyapun harus baik.

B. Prinsip Khusus

Prinsip yang berkenaan dengan situasi tertentu. Berikut ini beberapa prinsip khusus yang perlu diketahui dan ada pada penyusunan kurikulum, yaitu:

1. Prinsip Tujuan Pendidikan

Tujuan Pendidikan itu pusat tujuan dari seluruh kegiatan Pendidikan. Tujuan Pendidikan terbagi menjadi 3, ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan tersebut membantu menentukan arah perkembangan kurikulum dan memastikan komponen-komponen yang dirumuskan.

2. Prinsip isi pendidikan

Perlu adanya beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan isi pendidikan berupa penjabaran pengajaran, isi bahan berupa pengetahuan, perilaku dan keterampilan. Poin-poin kurikulum harus disusun sesuai dengan sistematis dan berurutan.

3. Prinsip pemilihan proses belajar

Adanya pemilihan kesesuaian metode, model, materi, dan teknik belajar, sehingga mampu mendorong dan mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Semua itu harus disesuaikan dengan tingkatan kelas yang mempermudah setiap hal.

4. Prinsip pemilihan media dan alat

Alat dan media merupakan faktor suksesnya kegiatan belajar yang berjalan lancar. Maka sebagai seseorang yang akan mengajar harus mampu memilih media dan alat agar kegiatan belajar terasa menyenangkan.

5. Prinsip evaluasi/penilaian

Penilaian merupakan proses akhir dari kegiatan belajar mengajar. Setidaknya ada tiga hal dasar yang perlu diperhatikan dalam menilai pembelajaran. Pertama, rencanakan alat penilaian. Pada tahap ini

perlu diperhatikan penentuan karakteristik kelas dan usia, format ujian dan jumlah soal ujian yang disiapkan. Kedua: Mengembangkan alat evaluasi. Langkah-langkahnya adalah merumuskan tujuan pendidikan di bidang kognisi, afek dan psikomotorik, mendeskripsikan perilaku siswa yang dapat diamati, mengaitkannya dengan materi pembelajaran, dan menuliskan tugas tes. Ketiga, mengelola hasil evaluasi. Prinsip yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaan kriteria penilaian dan skor standar yang digunakan untuk mengelola skor.

Pada dasarnya prinsip merupakan aturan. Aturan ini menjadi pedoman untuk seseorang bisa bertindak dan berfikir. Prinsip pengembangan kurikulum merupakan pedoman yang mengatur perencanaan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan.

Kurikulum pada pengembangannya membutuhkan proses dan studi intensif. Referensi pengembangan kurikulum harus berdasarkan data eksperimental, data empiris, ilmu pengetahuan dan cerita budaya yang berkembang dimasyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip dasar juga harus dipatuhi ketika mengembangkan sebuah kurikulum.

Setiap Lembaga Pendidikan harus memiliki prinsip dalam menyusun kurikulum. Salah satunya ada Prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum itu meliputi prinsip relevansi, fleksibel, kontinuitas, efektivitas, tujuan dan kompetensi, sinkronisasi, serta efisiensi. Jika salah satu prinsip tidak ada maka penyusunan kurikulum tidak akan optimal penggunaannya. Sedangkan untuk prinsip khusus, kita tinggal hanya menyesuaikan dengan kebutuhan masuk dan keluar serta kebutuhan tiap-tiap lembaga yang berbeda. Selain itu juga harus bisa mengelolanya dengan baik dan benar, sehingga kegunaan kurikulum dapat digunakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayudia, I. (2003). *Pengembangan Kurikulum*. Sumatra Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Hamalik, O. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, oemar. (2015). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamami, A. R. (2020). PRINSIP-PRINSIPDALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM. *PALAPA : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*.
- Prasetyo, A. R. (2020). Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Kurikulum. *PALAPA : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 47.
- sanjaya, W. (2009). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, nana. (2005). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2004). *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyuni, F. (2020). KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia). Fitri Wahyuni, "KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pe Al-Adabiya : Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/alabadiyah/article/view/2792>.

BAB 4

PEMBAHARUAN KURIKULLUM

Oleh Khairul Hasni, S.H., M.A.

4.1. Introduction

Indonesia telah ada kemajuan yang signifikan dalam pendidikan, dan telah menunjukkan kemajuan besar dalam kesetaraan gender pendaftaran dan paritas gender (World Bank, 2020). Indonesia telah ada kemajuan yang signifikan dalam pendidikan, dan telah menunjukkan kemajuan besar dalam kesetaraan gender pendaftaran dan paritas gender (World Bank, 2020). Pendidikan salah satu sektor yang amat penting untuk kemajuan suatu bangsa yang perlu terus didorong sehingga generasi berikutnya akan lebih berkualitas. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sistem dan kurikulum pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan human dan tujuan ekonomi untuk pembangunan. Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam menjalankan pendidikan karena Pancasila merupakan landasan ideologi negara yang mempunyai kekuatan hukum bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

Kurikulum dalam pendidikan suatu perangkat mata pelajaran pada sekolah dan universitas yang dilaksanakan sesuai aturan yang telah di buat oleh isntitusi Kementrian Pendidikan. Program pendidikan yang dirancang oleh lembaga pendidikan tentang rancangan pelajaran diterapkan pada siswa dan tingkat universitas selama periode pendidikan berlangsung. Dasar pembuatan kurikulum pemerintah berdasarkan kebutuhan dan kondisi negara dengan waktu yang yang tidak dapat dipastikan,

sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi saat ini kurikulum terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dalam situasi tertentu dapat saja di ganti seperti pada kondisi pendemik tahun 2020 di Indonesia.

Setiap munculnya regulasi baru itu membawa implikasi baru terhadap paradigma dunia pendidikan yang pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan berbagai penyesuaian dan perubahan kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dan Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak sebelas kali dalam sejarah besar Indonesia dengan kondisi masyarakat, politik dan kondisi pandemic.

Dan saat ini kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 2013 ditambah dengan kurikulum Merdeka Belajar. Walaupun masih belum efektif dalam memajukan mendorong konsep pemikiran pendidikan oleh siswa di Indonesia. Untuk mencapai kemajuan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tanggung jawab besar dalam mengembangkan beragam pengembangan dan pendanaan dalam mencapai target pendidikan yang dapat menghasilkan kualifikasi pendidikan yang unggul bagi siswa - siswi serta mahasiswa yang juga mempunyai target pecapaian Merdeka Belajar.

Perubahan pelaksanaan Pendidikan mendatangkan paradigma proses pendidikan dari pelaksana pengajaran menjadi pembelajaran. Situasi perubahan baru mendorong peran guru dalam mentransformasikan pengetahuan kepada para pelajar. Seorang guru dapat membentuk manusia berkarakter yang memahami lingkungan kultural dan sosial. Pendidikan sangat menentukan perkembangan dalam membangun kemajuan suatu bangsa, negara sebagai negara hukum yang mengatur kebijakan terkait dengan Pendidikan berlandasan dan dirumuskan dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Pendidikan Indonesia dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak manusia dalam mendorong pendidikan kehidupan anak bangsa.

4.2. Pembaharuan Kurikulum Upaya Pengembangan Belajar

Pembaharuan kurikulum di Indonesia didasari pada masalah dan pengalaman yang belum tercapai di masa lalu, adanya perubahan baru menuju pada perkembangan untuk kepentingan dalam kemajuan pendidikan. Hal ini juga berdasarkan pada pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya. Perubahan perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan generasi penerus yang mampu bersaing secara global dalam icon pendidikan di dunia.

Pembaharuan kurikulum sebagai penyusunan mata pelajaran, menambahkan materi baru dan menggantikan dengan program sesuai dengan mata pelajaran kuliah yang disesuaikan dengan tujuan dan system pelajaran bagi pengembangan pendidikan. Pendidikan usaha dalam kesadaran yang dilakukan secara terencana dan terorganisir oleh manusia menemukan sesuatu yang baru, dari tidak ada menjadi sebuah hasil serta memiliki peran pribadi yang benar (Toni dkk., 2022). Kurikulum itu sebagai alat untuk memenuhi tujuan pencapaian pendidikan dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan menjadikan level pendidikan sesuai dengan kapasitas masyarakat dalam menciptakan kemajuan pendidikan.

Jelasnya, pembaharuan fenomena sistim Indonesia dibuat sesuai dengan kebutuhan Indonesia walaupun masih ada ketidaksempurnaan dalam pelaksanaannya karena latar belakang masyarakat, ekonomi, budaya dan agama yang berbeda. Sebuah kurikulum dapat mencerminkan pandangan hidup bangsa, bentuk kehidupan masyarakat dan arah

kemajuan masa yang akan datang. Sampai sekarang ini Indonesia telah melakukan perubahan sistim pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ada sisi yang memberatkan masyarakat dalam pelaksanaannya dan penekanan atas indikator pencapaian yang tidak dapat terukur dengan baik. Mendesain kurikulum baru bertujuan menciptakan perubahan kurikulum untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya yang dapat berdampak positif dari kurikulum sebelumnya untuk mendorong mutu pendidikan di Indonesia.

Dalam mengikuti perkembangan global dibutuhkan keberanian untuk mengubah paradigma Pendidikan. Namun, proses menuju terobosan dengan perubahan kurikulum juga masih ditemukan masalah-masalah pelaksanaan yang terjadi dalam pendidikan. Kurikulum tersebut hendaknya bisa menyesuaikan kondisi dan situasi di setiap budaya local di Indonesia. Sehingga kurikulum itu familiar dengan kondisi sosial, politik, dan budaya di tiap-tiap daerah. Mengapa, karena Indonesia itu beragam dalam budaya dan bahasa, namun dengan adanya kebijakan daerah dapat juga mempengaruhi perkembangan dalam pelaksanaan proses belajar.

Sekarang pemberlakuan kurikulum 2013 belum ada pembagian jurusan yang khusus, namun dapat juga dicapai dengan program – program sekolah yang lebih khusus untuk menampung minat belajar dan rencana pendidikan siswa. Minat siswa untuk menjawab perkembangan multidisiplin dunia kerja. Hal ini menuntut kesiapan sekolah/ perguruan tinggi juga untuk bisa mengubah model seleksinya. Kurikulum 2013 berfokus pada peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi *attitude*, *skill*, dan *knowledge*. Selain itu, kurikulum 2013 berfokus pada jurusan yang dipilih oleh peserta didik. Memasuki perkembangan baru Indonesia telah ada kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini fokus pada pengembangan karakter,

kompetensi peserta siswa, mengarahkan pada minat dan bakat anak.

Munculnya kurikulum baru 2019, ini dipicu oleh kondisi pandemi dan juga kritik terhadap kurikulum 2013. Pada saat pandemic merubah kurikulum menggunakan sistim tehnologi dalam proses pembelajaran pada seluruh level pendidikan. Program tehnologi dapat memudahkan pada proses pembelajaran online. Kurikulum Merdeka yang baru berlaku tahun 2022, kurikulum baru yang dicanangkan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2024. Ada beberapa perubahan penting dalam kurikulum itu, mulai dari struktur kurikulum yang lebih fleksibel, fokus terhadap materi *essensial* (penting), dengan penggunaan perangkat ajar yang lebih beragam dan pemanfaatan teknologi digital.

Luasnya daerah ini dapat menjadi tantangan dalam proses pelaksanaan pembaharuan pendidikan. gap kesetaraan tingkat kota dan desa serta lebih menyedihkan di pelosok desa. Ketersediaan fasilitas yang tidak setara menjadi mutu pendidikan di desa lebih rendah di bandingkan daerah kota. Persoalan ini bisa dilihat dari kapasitas guru-guru dan juga sarana dan prsasana dalam pelaksanaan pendidikan. Ditambah lagi dengan persoalan budaya dan bahasa juga menjadi hal dalam proses persoalan dalam pelaksanaan pendidikan khususnya di perdesaan.

Dalam kurun waktu sejarah Indonesia dengan budaya Indonesia beragam pendidikan di Indonesia sampai saat ini belum menemukan kurikulum yang sesuai dengan budaya masyarakatnya. Sehingga di Indonesia dalam pelaksanaan sekolah memasukkan aturan sendiri baik itu dari berpakaian, proses belajar dan waktu masuk sekolah.

Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan salah satu perubahan yang cukup panjang yang terus menerus dilakukan

perubahan. Ini mencari sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas. Perubahan dan perkembangan sistem pendidikan mandiri belajar memberikan karakter kepada peserta didik, dalam kualitas dalam pendidikan (Ajeng, 2021). Oleh karena itu, upaya perubahan perlu dipikirkan yang bisa mencapai target kemajuan bagi masyarakat Indonesia.

4.3. Kemajuan Pendidik Indonesia

Perubahan secara terus menerus mencari formula baru pada sistem pendidikan nasional, dalam mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing secara global dan menyesuaikan diri dengan perubahan kemajuan Internasional. Selain itu, perubahan dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang bertambah berkembang dan yang paling drastis kemajuan teknologi. Kemajuan ini dapat juga dipengaruhi oleh pengaruh oleh kepentingan agama, ekonomi, politik, gender dan kebudayaan. Belajar pada negara yang mempunyai prestasi yang baik dalam memajukan pendidikan dan perubahan kurikulum yang berkualitas. Pendidikan internasional bertujuan meningkatkan saling tukar pengalaman antar bangsa dalam aspek metode pendidikan, pelajar, dan kualitas guru. Ini salah satu program yang dapat didorong untuk membawa perubahan pada negara Indonesia. Perubahan kurikulum itu akan berdampak pada kemajuan bangsa dan negara kedepan.

Kenyataannya transformasi dunia pendidikan di Indonesia terjadi dengan signifikan pada perubahan pendidikan. Hal ini harus didukung dengan kemajuan pendidikan dari berbagai bidang skill yaitu:

1. Guru (Pendidik)

Dalam memajukan pendidikan, seorang pendidik melakukan pengabdian yang terkadang diluar batas kemampuannya dalam membantu upaya kemajuan dalam proses belajar. Sebagai guru Undang-Undang menyebutkan bahwa pendidik yang profesional melaksanakan tugas utama

adalah mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan. Selain itu guru adalah pembaharuan pendidikan bisa sebagai *agent of change* dalam menyampaikan informasi. Namun, sayangnya pendidik belum terpenuhi kesejahteraan sedangkan tuntutan memajukan pendidikan semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa guru itu memang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Menciptakan generasi yang cerdas bagi pembangunan negara dan bangsa tapi kehidupannya dibawah rata-rata, apalagi yang masih status honor. Kenyataannya nasib pendidik itu lebih dituntut menciptakan dan mengembangkan manusia dalam sebuah peningkatan ilmu bagi orang lain.

Pemerintah mempunyai kewajiban harus mengembangkan guru lebih berkualitas dengan menciptakan program yang dapat mendorong *skill* (keahlian) dan pengetahuan mereka dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidik yang terus meningkatkan kompetensi dan dapat mengikuti perubahan karena semakin hari semakin digitalisasi dan modern dalam melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Guru itu sebagai aktor dilapangan, walaupun kurikulum Indonesia bagus tanpa kualitas guru maka output yang dihasilkan akan tidak optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pendidik dan juga diberikan kesejahteraannya.

2. Kurikulum yang Berkualitas

Kurikulum menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran sebagai acuan untuk proses mengajar seorang guru pada siswa. Perkembangan masyarakat semakin maju telah mendorong kurikulum itu untuk disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan pada zamannya. Terkadang dengan penggunaan teknologi internet yang semakin berkembang itu akan memudahkan untuk mencari berbagai

informasi dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah dan universitas.

Perubahan kurikulum awalnya 1975 dimana kurikulum tersebut lahir terpengaruhi konsep bidang Management by Objective (MBO), kurikulum 1975 disempurnakan, paduan kurikulum 1975 dan 1984. Dan muncul kurikulum 2004 berupa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) kemudian dengan kurikulum 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan berubah menjadi kurikulum 2013 K-13. Selanjutnya, diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar yang memberikan kemerdekaan mengajar bagi guru dan belajar bagi siswa. Sampai tahun 2022, Indonesia sudah menggantikan kurikulum sebanyak 11 kali pergantian dalam situasi politik negara yang berbeda-beda. Pertama pada tahun 1947 dinamakan Rencana Pelajaran. Selanjutnya tahun 1964 masuk kurikulum Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, Kurikulum Sekolah Dasar di tahun 1968. Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan 1973. Di tahun 1975 Indonesia memasuki Kurikulum Sekolah Dasar, berganti dengan Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Revisi Kurikulum 1994 di tahun 1997, dan tahun 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tahun 2006 beralih ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013. Sekarang telah berubah menjadi Kurikulum Merdeka Belajar.

Perubahan kurikulum Indonesia selalu ada peningkatan mengikuti perkembangan dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem. Namun, belum dapat dikembangkan dengan sentuhan budaya lokal di masing-masing daerah.

3. Budget Pendidikan

Anggaran pendidikan menjadi tujuan utama dalam meningkatkan level pendidikan untuk kapasitas guru, gedung dan perlengkapan sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Dengan luas wilayah Indonesia yang begitu

luas support program peningkatan kapasitas guru atau dosen harus mempunyai system yang baik supaya pencapaian kurikulum dapat tercapai. Ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia secara optimal mengikuti perkembangan teknologi dan global. Sayangnya anggaran yang ada belum dapat tersalurkan dengan tepat hanya bertumpuk pada satu daerah sedangkan daerah terpencil telah terpinggirkan dalam segala bentuk pelaksanaan pendidikan. Dengan berbagai program bantuan di salurkan oleh pemerintah, atau hibah program penelitian dosen dan pengabdian masyarakat. seharusnya dapat mendorong sistem pendidikan Indonesia lebih baik dan juga kemajuan masyarakat. Seharusnya Kemendikbudristek mempunyai *mapping* (pemetaan) yang dapat mengevaluasi daerah prioritas sebagai daerah tertinggal dalam penerimaan anggaran. Supaya kesetaraan dalam level pendidikan dapat tercapai antara kota dan desa.

Peraturan dalam pelaksanaan pendidikan yang juga menjadi persoalan dalam pelaksanaannya karena terus bertambah dari masa ke masa sehingga tidak maksimal dan tidak cukup terlaksana pencapaiannya.

5. Dukungan Masyarakat

Kontribusi masyarakat dalam pendidikan tidak bisa terukur, masyarakat mempunyai andil yang sangat besar dalam jalannya sebuah pendidikan. Keberhasilan sebuah pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana yang digunakan. Melainkan keterlibatan masyarakat sebuah indikator keberhasilan sebuah pendidikan. Hubungan pendidikan dan masyarakat mempunyai keterikatan yang kuat dan keduanya saling membutuhkan dalam memajukan pendidikan. Masyarakat dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik dan equal. Pendidikan akan membuat masa depan para generasi penerus dapat menemukan dan mengembangkan bakat pada diri

mereka. Menjadikan landasan berkembangnya daerah. Dengan harapan akan melahirkan generasi dengan berbagai ahli.

Masyarakat menjadi sumber pelaksanaan pendidikan khususnya pendidikan lapangan, dimasyarakat telah ditemukan sumber untuk menopang keberlangsungan pendidikan. Di lingkungan masyarakat ada sumber daya alam dengan berbagai konsentrasi objek yang dibutuhkan. Pendidikan datangnya dari masyarakat karena arti pendidikan bersumber proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda maka seluruh upaya sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan masyarakat (Siti, 2017). Masyarakat merupakan sekelompok individu yang berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan atau membantu menjalankan program pendidikan, maka partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendorong pendidikan. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat merupakan sebuah jalinan interaksi yang direncanakan dari sekolah agar dapat diterima di lingkungan masyarakat dan mendapatkan aspirasi serta simpati dari masyarakat tersebut (Syifa dkk., 2021). Pada tingkat universitas akan dipelajari pengabdian dan kerja lapangan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat adalah sumber yang penting baik sebagai praktisi, narasumber dan peserta dalam kegiatan yang dibutuhkan.

Kurikulum dan pelaksanaan proses belajar, seharusnya dapat menciptakan rasa nyaman bagi siswa/mahasiswi. Karena penggantian kurikulum itu bertujuan merubah level pendidikan seluruh nusantara untuk lebih baik. Kemajuan generasi adalah kemajuan bangsa untuk masa mendatang dalam pembangunan. Kemajuan berpikir oleh pengambil kebijakan dapat menciptakan pendidikan yang maju di dukung dengan infrastruktur yang cukup baik sehingga proses belajar efektif bagi siswa. Dalam hal ini pemerintah Indonesia terus mendorong ke arah efektif tapi sampai saat ini masih mencari arah itu dan belum dapat berperan sebagai aktor yang dapat membuat kurikulum itu

terciptanya perubahan. Pendidikan itu juga sebagai salah satu landasan dari Pancasila yang sangat baik dalam mempersatu bangsa.

4.3.1. Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan

Pendidikan sebuah jalan menuju keadilan gender dalam segala bidang dan masyarakat, dalam pendidikan dijadikan sebuah alat untuk mentransfer ilmu pada masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Oleh karena dari dasar lembaga pendidikan dan keluarga diupayakan menciptakan keadilan gender.

Realita pendidikan di Indonesia, perempuan masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini didasari lemahnya informasi di dalam kehidupan masyarakat sehingga isu-isu gender terpinggirkan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Ketidakadilan itu menimbulkan beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan (ACDP Indonesia, 2013). Meskipun kebijakan nasional di bidang pendidikan telah sudah cukup ada fasilitas untuk dijadikan acuan pembangunan pendidikan berspektif gender, realita ketimpangan gender masih terjadi. Telah terbangun praktik dan inovasi tentang pengarusutamaan kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia, namun masih terpusat pada daerah perkotaan saja. Kondisi itu menjadikan anak-anak perempuan dan laki-laki dari perdesaan terutama dari keluarga miskin menjadi kelompok sosial yang mengalami ketidakadilan hak sosial, ekonomi dan budaya.

Indonesia termasuk negara yang ikut serta dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) program mendorong kemajuan pendidikan paritas gender. Dan ini menjadi pekerjaan rumah untuk terus didorong dan pemerataan pendidikan perempuan dan laki-laki menuju kesetaraan. Mencapai kesetaraan kesempatan belajar pada laki-laki dan

perempuan menjadi sebuah tantangan yang besar bagi pemerintah dalam menuju kesetaraan pendidikan Internasional. Kenyataannya, kondisi sensitivitas gender masyarakat, baik laki-laki dan perempuan masih sangat rendah (Iswah, 2009). Oleh karena itu peran pokok yang penting adalah sebuah kurikulum menjamin bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan kesetaraan yang sama. Sekolah bertanggung jawab memberikan pelatihan kepada seluruh pendidik dan staf dalam pencapaian konsep kesetaraan gender dan responsif gender dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dalam proses belajar ada banyak ketimpangan gender dari segi isi buku-buku pelajaran sekolah. Sebagai contoh dalam buku pelajaran itu telah menunjukkan peran domestik bagi perempuan dan bagi laki-laki diposisikan dalam peran publik. Materi pelajaran dan kurikulum yang belum mengacu kepada kesetaraan dan keadilan gender dapat sebut pada perempuan itu tidak mempunyai kualitas sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif gender dapat dilakukan dengan pembinaan dan pelatihan guru dan seluruh staf yang bekerja dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidik dapat melakukan seleksi buku yang sesuai dengan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Didukung dengan adanya kebijakan gender dalam pendidikan nasional. Kementrian Pendidikan No. 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Upaya meratanya semua jurusan dan tingkat pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Melalui implementasi kurikulum perspektif gender, segala bentuk ketidakadilan dapat dikurangi (Muhamad Mustaqim, 2014). Maka dengan tujuan pendidikan atau upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan pemenuhan kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Bila kurikulum belum memasukkan gender didalamnya komponen pelaksanaannya maka diperlukan kreatifitas guru

dalam memberikan pemahaman gender dalam sebuah pelajaran, atau bisa juga dilakukan pelajaran tambahan lapangan terkait dengan materi gender. Dalam pelaksanaan kelas harus lebih produktif dalam menghubungkan proses, tetap melakukan improvisasi, sehingga pembelajaran tercipta secara dinamis. Indonesia dapat berkembang menjadi negara dengan sumber daya manusia yang berkualitas iyang berperan aktif dalam pembangunan negara dengan mendorong kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki.

4.3.2. Milinial dan Tehnology

Bagaimana dengan perkembangan teknologi digital di Indonesia, hal ini telah mendorong kaum milenial menggunakan moment itu dalam membangun ide-ide mendapatkan informasi. Dapat membantu pekerjaan menyebarluaskan informasi dan mendapatkan sumber ilmu secara cepat. Dengan berkembangnya dunia teknologi digital ini telah menjadi salah satu jalan meningkatkan motivasi dan minat dalam mengali ilmu bagi para generasi sekarang. Kenyataannya, teknologi sangatlah berpengaruh dalam setiap kegiatan. Pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu cara yang dilaksanakan pemerintah untuk menunjang pengetahuan generasi muda milinial. Perkembangan teknologi dapat menjawab kebutuhan kaum milinial dari berbagai aspek kehidupan. Namun, tehnologi juga dapat berdampak negatif pada perkembangan generasi baru bila itu diluar kontrol orang tua dan keluarga.

Semakin ke depan penggunaan teknologi menjadi alat yang sangat dibutuhkan dengan perubahan global terkait dengan komputer dan smartphome. Sejak tahun 2019, dapat dirasakan bahwa perkembangan tehnologi menjadi sebuah alat yang paling dibutuhkan dalam pendidikan. Pembaharuan kurikulum dapat memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan yang terjadi selama ini, yang dapat

mengubah kualitas pendidikan lebih baik mengikuti perkembangan global. Teknologi dapat menjadi penghubung dalam mencari dan pelaksanaan sumber belajar untuk tercapainya pembelajaran jarak jauh karena situasi pelaksanaan kelanjutan pendidikan akibat pandemi (Churiyah et al., 2020). Penggunaan teknologi akan sangat membantu proses pelaksanaan siswa dan guru maupun dosen dalam kelas. Teknologi akan lebih memudahkan siswa untuk mengakses informasi dan mendapatkan materi terkait dengan bidang keilmuan mereka.

Tentunya masyarakat yang tinggal di area perkotaan akan dapat lebih mudah menguasai teknologi informasi untuk pendidikan karena didukung oleh fasilitas yang mendukung. Sedangkan masyarakat yang masih tinggal di daerah pedesaan, membutuhkan waktu terdapat kendala dalam penggunaannya. Pemerataan infrastruktur dan teknologi harus menjadi langkah penting dilakukan dalam mendorong pendidikan dan pencapaian kurikulum. Pembelajaran jarak jauh kurang efektif dapat juga disebabkan oleh faktor kurangnya sarana dan prasarana atau ketidaksiapan edukasi teknologi fasilitasnya yang kurang memadai (Lubis 2020). Peserta didik dan orang tua juga akan merasakan kesulitan bila mana tidak mampu menguasai teknologi untuk melakukan proses pembelajaran seperti yang disampaikan Onyema dkk. (2020). Mengikuti perkembangan milenial dengan kemajuan global maka orang tua dalam keluarga juga harus ikut serta belajar menggunakan teknologi.

4.3.3. Kurikulum Negara Lain

World Population Review mencatat ada 10 negara terbaik mempunyai sistem pendidikan di dunia tahun 2021 diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada dan Perancis (WPR, 2023). Pengembangan kurikulum level Internasional bagi siswa tergantung penyerapan dan level sekolah dalam mendorong setaraf Internasional. Untuk level

perdesaan membutuhkan perjuangan keras dalam mendorong sekolah dan guru menuju level Internasional. Jadi Indonesia tertinggal jauh yang rata penduduk desa lebih luas dibandingkan kota. Indonesia dapat melakukan pembaharuan kurikulum dengan mengikuti negara lain yang bisa dikembangkan di Indonesia, yang dapat dipadukan dengan budaya Indonesia. Namun, harus didukung dengan berbagai analisa dan penelitian dan teruji dengan baik dapat dilakukan di Indonesia. Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, Indonesia masih tertinggal jauh.

Perkembangan pendidikan level Internasional dapat saja menjadi target bagi Indonesia tapi melihat perkembangan pendidikan yang tidak setara, banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Semestinya Indonesia dapat mengembangkan dengan cara sendiri yang lebih fokus pada infrastruktur dan kualitas pendidikan. Serta merubah kurikulum dapata menjadi kurikulum yang sesuai dalam pembangunan negara itu sendiri. Di dunia ada beberapa negara yang mempunyai unik dan mempunyai cara tersendiri seperti Finlandia, Jepang dan Belanda dalam membuat aturan pelaksanaan pendidikan.

Finlandia adalah negara yang mempunyai kualitas dan sistem pendidikan terbaik di dunia. Negara ini model pembelajaran siswa dinilai dari berbagai metode kualitatif dan fokus metodenya pada pengembangan pembelajaran *soft skill* (keterampilan lunak). Kurikulum Finlandia memiliki konsep non-discrimination dan setiap siswa memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Satu indikator pendekatan yang dilakukan Firlandia dalam meningkatkan nilai pendidikannya dengan konsisten yang terus melaksanakan kurikulum mereka. Negara Finlandia berada pada peringkat tiga besar sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik. Anak-anak di Finlandia mulai sekolah berumur tujuh tahun mulai masuk SD dan mereka mendapatkan model pelajaran ringan yaitu bermain dan belajar, mengembangkan hobi dan waktu di sekolah termasuk pendek,

dan sistem mereka fokus pada pemahaman siswa dengan aktivitas yang diberikan. Menariknya, Finlandia, bukan negara terkenal dalam pendidikan bila dibandingkan Inggris dan Amerika Serikat. Negara ini bisa menjadi satu rekomendasi tujuan studi bagi study di level Internasional.

Bagaimana dengan negara Jepang, ditingkat TK dalam proses belajar anak-anak diajarkan kemandirian dengan melakukan aktivitas mereka yang runitas sehari-hari kehidupan dalam keluarga dan pelayanan publik. Ditingkat SD, dikelas 2 mereka mulai ditekankan pada pendidikan bahasa Jepang. Sistem pendidikan di Jepang menerapkan profesionalisme yang sangat berkualitas dan ketat, peraturan standar terbaik untuk kemajuan pembangunan. Selain itu, ditingkat SMA, anak-anak Jepang sudah mulai diperkenalkan dengan isu global di seluruh dunia. Dan ditambah dengan melakukan kegiatan bahasa Inggris global dengan narasumber mahasiswa asing untuk bisa berkomunikasi langsung antara siswa dan mahasiswa asing dari berbagai negara. Semua ini juga didukung dengan disiplin, kemauan kuat, dan kecerdasan sebagai langkah menjadikan Jepang menjadi salah satu negara maju di dunia.

Negara Belanda mempunyai sistem pendidikan yang terbaik juga di dunia, dan banyak orang Indonesia yang memilih negara ini untuk melanjutkan studi di universitas. Menurut Organisasi Pendidikan Belanda (Nuffic) Belanda menggunakan sistem komunikasi dwibahasa (bahasa Inggris dan Belanda), sistem itu sebagai tujuan mengikuti persaingan global. Jadi, anak-anak di Belanda rata-rata bisa berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman.

Perkembangan pendidikan negara di Asia ada juga negara yang menggunakan local wisdom seperti Singapura, Jepang, Vietnam, dan Korea Selatan, pemerintah memprioritaskan memasukkan budaya dalam pelaksanaan pendidikan mereka. Untuk mengikuti perkembangan global dalam membangun

sistem pendidikan dan politik, pemerintah menggunakan sistem modern dalam mengikuti perkembangan global. Kemajuan Singapura, Malaysia, Thailand masih diatas Indonesia bila di tingkat ASEAN.

Singapura telah berkembang dengan sistem pendidikan yang tradisional menjadikan sistem pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individual dan mengembangkan bakat peserta didik. Singapura menjadi negara sistem pendidikan yang terbaik di ASEAN. Bila dilihat kualitas guru, ini dilakukan seleksi yang begitu ketat dan guru di terima sesuai dengan kebutuhan sekolah. Maka setelah terpilih, para calon guru diberikan pelatihan sehingga guru-guru mendapatkan ilmu pelaksanaan belajar.. Sehingga pemerintah menjadikan gaji guru-guru itu dibayarkan dengan nilai yang tinggi dengan kualitas guru yang terjamin dapat memberikan yang terbaik. Kehidupan guru-guru dapat terjamin dengan kualitas dan gaji yang tinggi untuk kesejahteraan mereka (Kosim, 2010). Pengalaman ini salah satu yang sangat penting seharusnya dikonsumsi oleh Indonesia dapat melahirkan guru-guru yang berkualitas sehingga target ke depan dapat terbentuk pelajar yang cerdas.

Di lingkungan Asia Tenggara dengan adanya organisasi ASEAN ini akan menjadi pendorong bagi negara anggota untuk mengejar ketinggalan dalam pelaksanaan pendidikan secara regional dan global. ASEAN sendiri mempunyai kurikulum yang bisa juga digunakan dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam ruang lingkup regional. ASEAN kurikulum itu sebagai suplemen tambahan untuk mendorong memperkenalkan konsep ASEAN kepada pelajar sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Ini juga dapat menjadi acuan bagi pendidik dalam mengikuti perkembangan pendidikan secara regional. Apalagi Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi yang cukup besar di mata negara anggota ASEAN seharusnya harus berbenah secara lebih berkualitas mencerdaskan anak bangsa.

4.4. Dampak Pergantian Kurikulum Baru

Dalam penggantian kurikulum baru yang paling kwalahan dalam menerima proses itu adalah guru di lingkungan pendidikan. Selain itu adalah siswa dalam mengikuti aturan sekolah untuk dilaksanakan dalam keadaan belum semuanya sempurna. Tuntutan pendidikan terkadang menimbulkan ketidakwajaran yang dihadapi guru dan siswa, terkadang guru itu bebannya tinggi tapi tidak sebanding dengan upah yang mereka terima. Maka sebagian besar guru yang hidup di desa membutuhkan sumber daya untuk dapat menjalankan capaian kurikulum itu. Akhirnya pergantian kurikulum itu hanya bersifat formalitas saja. Ditambah dengan kemampuan guru yang belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh.

Dengan proses lahirnya kurikulum pertama dan sampai saat, perubahan kurikulum telah menimbulkan dampak baik dan belum memadai dalam proses pelaksanaan pendidikan. Dampak positif perubahan kurikulum bagi siswa adalah mereka belajar mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kondisi lingkungan dan dukungan fasilitas pengajaran sekolah. Karena dalam masa transisi, siswa membutuhkan bimbingan yang baik dari guru yang berkualitas, dengan didukung, fasilitas yang memadai, dan orang tua yang menjadi acuan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan program sekolah. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum dapat menjadi prioritas dengan memperhatikan tujuan dan target dalam pecapaiannya. Menurut (Langgulong, 2003) kurikulum ada 4 komponen; 1) Tujuan pendidikan yang ingin dicapai, 2) Pengetahuan, ilmu, data, aktivitas dan pengalaman, 3) Metode mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong pelajar sesuai yang tujuan yang dirancang. 4) Metode penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil pelaksanaan pendidikan yang dirancang dalam kurikulum.

Dengan kondisi Indonesia yang beragam perbedaan geografis, bahasa, dan budaya, tidak menjadi hal yang di

kwatirkan bagi penerapan sebuah kurikulum karena tetap menggunakan bahasa Indonesia. Maka dengan approach (pendekatan) yang tepat dan memfasilitasi dengan benar akan terjadi kurikulum bisa berjalan dengan baik. Selama ini, adanya gap antara pelaksanaan kurikulum di pusat dengan di daerah terjadi karena terbentur dengan banyak hal seperti; alam, sosial, politik, bahasa, dan budaya, di tiap-tiap daerah. Inilah yang menjadikan pelaksanaan kurikulum terlihat kurang maksimal dan bahkan tidak berjalan dengan baik. Kemajuan pendidikan Indonesia dilihat dari kenyataan dalam masyarakat yaitu belum meratanya fasilitas pembangunan pendidikan di seluruh Nusantara. Dengan luasnya Indonesia tidak sedikit daerah pedalaman yang sulit mendapatkan akses ke sekolah. Dengan perkembangan digital saat ini bagaimana sekolah di pelosok dapat menggunakan teknologi dengan baik karena jaringan yang susah. Dengan kondisi itu, pemerataan pelaksanaan pendidikan menjadi hal yang utama untuk laksanakan karena sebagai manusia dibawah satu negara setiap manusia mempunyai hak yang sama mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan era digital, di seluruh wilayah di Indonesia kesempatan ini hanya dapat dinikmati oleh siswi yang ada diperkotaan karena adanya masalah program internet yang lebih baik dibandingkan dengan perdesaan. Oleh karena itu, tentu saja, bukan hanya kurikulum berperan sebagai alat peningkatan mutu pendidikan, ada banyak faktor. Peran aktif seorang guru-guru yang inovatif serta memiliki kualitas skill tinggi, maka hal ini menjadi penting untuk dipikirkan sebagai salah satu peranan dalam mengembangkan pendidikan.

Di situasi politik Indonesia masa jabatan para menteri sangat berpengaruh dalam kekuasaannya. Faktanya dalam masa jabatan seorang menteri pelaksanaan sistim pendidikan baru ditetapkan dan ditengah jalan kurikulum yang laa tidak digunakan lagi. Ini karena jabatan baru di tingkat kementrian pendidikan yang mengusulkan perubahan sesuai dengan porsi

para pejabat yang baru. Sistem kurikulum itu dapat dilanjutkan dengan menambahkan program-program pendidikan yang dibutuhkan setelah ada evaluasi selama kurikulum itu berjalan.

4.5. Menuju Kurikulum Merdeka

Kurikulum Darurat dalam kondisi khusus dibuat sebagai kurikulum baru dengan menyederhanakan Kurikulum Nasional 2013 yang diperkirakan dapat memenuhi layanan pendidikan dalam situasi pandemi COVID-19 (Tono, 2022). Implementasi pendidikan diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap bidang studi yang diminati di sekolah (Wandini et al., 2021).

Salah satu perubahan terbaru adalah Kurikulum Merdeka (KM) yang menjadikan acuan pada kalangan masyarakat untuk dilaksanakan. Ada berbagai tanggapan dari para ahli pendidikan bahwa KM menjadikan kurikulum Indonesia sebuah konsep yang baik. Ini dapat memberikan kesempatan siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal, siswa bebas untuk menentukan jalan belajarnya sendiri, sehingga dapat mendorong mempelajari sesuai dengan bakat siswa-siswi. Hal ini juga telah menimbulkan penolakan dari konsep KM. Kemenristekdikti telah memberikan sistem baru Kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk mengejar yang belum terlaksana dalam pendidikan Indonesia terkait dengan literasi dan numerasi (Almarisi, 2023). Sebagian orang berpendapat bahwa konsep KM bisa saja menimbulkan perbedaan dalam standar pendidikan baik diantara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, ada kebebasan yang diberikan pada siswa dalam menentukan jalan belajarnya dapat menimbulkan salah penafsiran pada siswa, terutama bagi mereka yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang bidang study yang mereka pilih. Pada Kurikulum Merdeka mendorong siswa memilih proses belajarnya dengan pilihan sendiri sesuai bakat dan keinginannya. Hal ini dapat memperparah kesenjangan pendidikan karena siswa dari keluarga kurang mampu mungkin

tidak memiliki fasilitas dan kesempatan yang sama dengan siswa dari keluarga yang ekonominya lebih baik.

Kurikulum ini dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas belajar dan menggali potensi para guru dan peserta didik untuk secara mandiri. Dengan menggali potensi setiap peserta didik untuk dikembangkan. Unit pendidikan dapat berupaya untuk berinovasi menyesuaikan dengan budaya lokal dalam menjalankan kemerdekaan belajar. Metode KM ini mendorong guru untuk menggunakan materi, metode yang berkualitas, sesuai dengan tingkat kompetensi, minat dan bakat peserta didik. Dibantu dengan teknologi adalah alat bantu bagi guru untuk meningkatkan potensi dan siswa. Hal ini berhubungan dengan dasarnya Pendidikan Nasional dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pendidikan adalah sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Tujuannya pendidikan dapat memperkuat persatuan dalam Negara dalam pendidikan berdasarkan pada dasar Ideologi Pancasila.

Mendikbudristek Menti Pendidikan Nadiem Makarim mensahkan Kurikulum Merdeka sistem baru dalam keluar dari krisis pelaksanaan pendidikan karena situasi pandemi COVID-19. Dalam melanjutkan program Merdeka Belajar yang mempunyai nilai positif memberikan kesempatan lebih luas kepada pelajar untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, dan mendorong pembelajaran yang lebih nyaman serta relevan dengan kebutuhan pelajar. Dalam proses menuju Indonesia maju dalam pendidikan, memasuki *new normal*. Kurikulum yang adaptif dan inovatif menjadi indikator keberhasilan dalam pendidikan, bila dilakukan pembelajaran jarak jauh akan menjadi trend masa depan Indonesia yang semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi. Di era-revolusi industri 4.0 dengan tantangan dan berkembangnya lembaga pendidikan yang harus memiliki daya inovasi, dan berkolaborasi mendukung pendidikan. Persiapan menghadapi 5.0 masyarakat dapat

berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial yang mengacu pada perkembangan teknologi otomatisasi dan digitalisasi produksi dalam industri.

Pengembangan kurikulum merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Restu, dkk., 2022). Kurikulum merdeka dapat medata kembali dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang lebih berkwalitas dan bermutu (Yamin & Syahrir, 2020) mengemukakan bahwa pernyataan tersebut dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa agar dapat menyesuaikan perubahan zaman. Penerapan kurikulum yang khusus bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi isntitusi pendidikan dalam memutuskan kurikulum yang sesuai dengan porsi belajar siswa. Menurut Ornstein & Hunkins, 2014, kurikulum harus menjembatani mahasiswa agar kajian dan dapat dipelajari yang mampu memahami hakikat hidup dan memiliki peningkatan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat. Namun, program merdeka belajar dengan kurun waktu sampai saat ini dinilai masih baru dan belum mempunyai kekuatan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia sebagai mendorong palaksanaan KM. Membuat kurikulum itu tidak bisa dengan berjalan sendirinya, program merdeka belajar membutuhkan analisa yang matang dan sosialisasi ke daerah-daerah. Kurikulum Merdeka terdapat kelemahan dalam menerapkannya, di antaranya belum memadainya fasilitas dan sumber daya manusia dalam memberi dukungan dalam penerapannya (Almarisi, 2023). Sesuatu yang baru dimulai sulit dilakukan, dan membutuhkan waktu dalam implementasi dengan didukung sarana dan prasarana yang baik. Ini membutuhkan keseriusan semua pihak dalam mengambil tantangan untu diperjuangkan bersama.

Mengapa kurikulum Merdeka, kurikulum yang tepat digunakan di Indonesia? Dari berbagai informasi bahwa

kurikulum baru memiliki pendekatan budaya dengan budaya lokal, dan berbasis proyek yang disesuaikan dengan keadaan Pendidikan. Mengingat Indonesia memiliki latar belakang Agama, Budaya, dan Bahasa yang berbeda. Dapat dijalankan yang dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan di tiap-tiap daerah. Pendidikan dalam menyelenggaraan pembelajaran dapat mengikuti kurikulum nasional, atau menggunakan kurikulum darurat, dan dapat memilih penyederhanaan kurikulum secara mandiri (Anita, & Hotmaulina, 2022). Jelasnya masyarakat butuh kurikulum yang dapat menjadikan pelajar dapat berkembang dengan seiring perkembangan zaman.

Tahun 2023 dengan perkembangan industri 4.0 setelah itu memunculkan education 4.0, pendidikan berbasis luaran yaitu sebagai Outcome-Based Education (OBE) menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pendidikan (Maman, 2020). Pengembangan potensi bagi guru dan kepala sekolah melalui *micro learning* dengan menggunakan platform digital, ini dapat didukung dengan kegiatan yang sesuai tujuan masing-masing target sekolah. Adanya narasumber untuk dapat memfasilitasi dalam pelaksanaan edukasi Kurikulum Merdeka, dan tersedianya alat/fasilitas belajar untuk guru baik dalam bentuk buku elektronik, dan pusat diskusi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Material itu dapat diakses secara daring dan dapat disalurkan melalui perangkat lainnya dengan fasilitas yang ada. Komunitas belajar saling memberi bantuan dan dukungan praktis bagi guru yang dapat mengetahui dan mengadopsi kurikulum yang sedang dijalankan(Almarisi, 2023).

Di Indonesia perubahan yang terjadi dalam ruang pendidikan dapat diketahui dengan munculnya bermacam-macam inovasi dan sistem pendidikan, media pembelajaran, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pendidikan. Perubahan kurikulum di Indonesia yang dilakukan sebagai bentuk

antisipasi dan dikembangkan kebutuhan sesuai abad ke-21 yang bentuknya penyempurnaan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi (Darise, 2019). Sehingga itu dapat membantu dalam penyempurnaan yang lebih dalam sesuai kebutuhan masyarakat dalam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Sestya Ningrum, 2021. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar (Metode Belajar). PROSIDING PENDIDIKAN DASAR Volume 1 Nomor 1 Desember, 2021 URL: <https://journal.mahesacenter.org/index.php/ppd/index> DOI 10.34007/ppd.v1i1.186
- Anita Jojo, Hotmaulina Sihotang, 2022. Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 4, Hal 5150 – 5161
<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>
- Almarisi, A. (2023). Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dalam Perspektif Historis. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7(1), 111-117
- ACDP Indonesia, Education Sector Analytical And Capacity Development Partnership, 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG)
<https://repositori.kemdikbud.go.id/8569/1/Policy-Brief-ACDP-Gender-Equality-Indonesia-FINAL.pdf>
- Churiyah, M., Sholikhah, S., Filianti, F., & Sakdiyyah, D. A. (2020). Indonesia education readiness conducting distance learning in COVID-19 pandemic situation. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(6), 491. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i6.1833>
- Hasan Langgulung, 2003. Asas-asas pendidikan Islam, Jakarta : Pustaka Al-Husna Baru.

- Iswah Adriana, 2009. Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan), Tadrís. Volume 4. Nomor 1
- Kosim, M. (2010). Belajar Dari Negara Tetangga; Catatan Wisata Ilmiah Ke Singapura. Karsa: Journal Of Social And Islamic Culture, 96–113.
- Lubis, Winaria. 2020. “Analisis Efektivitas Belajar Pada Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj) Di Masa Pandemi Covid-19.” Bahastra: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 5(1):132–41.
- Lastika Dewi Anggoro, Kemajuan Kualitas Pendidikan Indonesiamasa Kepemimpinan Muhadjir Effendy (2016 – 2019)
 ReseachGate
file:///C:/Users/hasni/Downloads/MKP_LastikaDewiAnggoroRatih_20200610455.pdf
- Maman Suryaman, 2020. Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 21 Oktober, E-ISBN _ 978-602-5830-27-3 13Halaman 13-28
- Muhamad Mustaqim, 2014. Kurikulum Pendidikan Dasar Dalam Perspektif gender. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan IslamVol. 9, No. 1
- Onyema, E. M., Eucheria, N. C., Obafemi, F. A., Sen, S., Atonye, F. G., Sharma, A., & Alsayed, A. O. (2020). Impact of Coronavirus pandemic on education. Journal of Education and Practice, 11(13), 108–121.
<https://doi.org/10.7176/JEP/11-13-12>
- Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2014). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Pearson Education Ltd. Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2 JE, England.

Printed and bound in Vivar, Malaysia. ISBN13:978-1-978-292-16207-2.

- Restu Rahayu, Rita Rosita, Yuyu Sri Rahayuningsih, Asep Herry Hernawan, Prihantini, 2022. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. JURNAL BASICEDU Volume 6 Nomor 4 Tahun 2022 Halaman 6313 - 6319 Research & Learning in Elementary Education <https://jbasic.org/index.php/basicedu>
- Siti Fatimah 2017, PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT, AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1
- Syifa Nurfajriah, Prihantini, Kuswanto, 2021. PENGELOLAAN HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR, Kreatif Jurnal Kependidikan Dasar, Voulme Nomor 2
- Tono Supriatna Nugraha, 2022. Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Krisis Pembelajaran Inovasi Kurikulum, Jurnal UPI. p- ISSN 1829-6750 & e- ISSN 2798-1363. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJK>
- Toni Nasution, Nadiah Khoiri, Dara Wahyu Firmani, M.Fahrur Rozi, 2022. Perbedaan Sistem Kurikulum Pendidikan Anggota Asean, Indonesia dan Singapura. Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4(3)
- World Population Review, 2023. Education Rankings by Country <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>
- Wandini, R. R., Maghfhirah, S., & Hasibuan, A. T. (2021). Analisis Desain Pembelajaran Pkn Di Sd/Mi Kelas Tinggi. Magistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman, 12(1), 59-72

Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126–136.
<https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>

BAB 5

PERENCANAAN KURIKULUM

Oleh Qiyadah Robbaniyah, M.Pd.I

5.1. Pendahuluan

Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu (Oktapiani, 2019). Istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dan mengalami perubahan makna sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada pada dunia pendidikan. Secara garis besar, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Dalam pemakaiannya sehari-hari kurikulum sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian. Pertama, kurikulum dalam arti sederet mata pelajaran pada suatu jenjang dan jenis sekolah. Kedua, kurikulum dalam arti silabus, ketiga, kurikulum dalam arti program (Rohman, 2015).

Perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis dan seleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran (Dedi Lazuardi, 2017).

5.2. Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah proses perencanaan dan pengembangan kurikulum yang mencakup aspek-aspek seperti tujuan dan sasaran, isi kurikulum, metode pengajaran, penilaian, dan evaluasi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perencanaan kurikulum:

1. Identifikasi tujuan dan sasaran: Perencanaan kurikulum dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh kurikulum. Hal ini dapat mencakup tujuan akademik dan non-akademik seperti keterampilan sosial dan kepribadian.
2. Penentuan isi kurikulum: Isi kurikulum harus mencakup materi yang relevan dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Hal ini juga harus memperhatikan kebutuhan dan minat siswa serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pemilihan metode pengajaran: Metode pengajaran yang dipilih harus sesuai dengan isi kurikulum dan tujuan yang ingin dicapai. Metode pengajaran dapat mencakup diskusi kelas, proyek, presentasi, dan lain-lain.
4. Penilaian: Penilaian adalah bagian penting dari kurikulum yang membantu mengukur kemajuan siswa dalam mencapai tujuan dan sasaran kurikulum. Penilaian dapat berupa ujian, tugas, atau proyek.
5. Evaluasi: Evaluasi adalah proses peninjauan ulang terhadap kurikulum untuk mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi harus menjadi bagian terus-menerus dari perencanaan kurikulum agar kurikulum dapat diperbarui dan disesuaikan sesuai kebutuhan.

Perencanaan kurikulum juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti standar nasional atau internasional, panduan

kurikulum, dan peraturan pemerintah. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam proses perencanaan kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

5.2.1. Urgensi Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum (Sarwadi, Q. Robbaniyah, 2021) sangat penting dalam proses pendidikan karena dapat membantu memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perencanaan kurikulum penting:

1. Menentukan tujuan dan sasaran pendidikan: Perencanaan kurikulum memungkinkan para pengambil keputusan pendidikan menentukan tujuan dan sasaran pendidikan yang jelas dan terukur.
2. Memastikan konsistensi dan keseragaman: Kurikulum yang terencana dengan baik dapat memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran di kelas dilakukan dengan cara yang konsisten dan seragam, sehingga siswa memiliki pengalaman belajar yang konsisten.
3. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran: Kurikulum yang terencana dengan baik dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran karena memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran: Kurikulum yang terencana dengan baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran karena memastikan bahwa sumber daya pendidikan digunakan dengan bijak dan bahwa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dengan cara yang efektif.

5. Menjamin akuntabilitas dan transparansi: Perencanaan kurikulum dapat membantu memastikan bahwa pengambil keputusan pendidikan bertanggung jawab atas keputusan mereka dan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur.

Dengan demikian, perencanaan kurikulum sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka, serta dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran.

5.2.2. Model Perencanaan Kurikulum

Menurut Stowe dalam kutipan Busro dan Siskandar ada empat model perencanaan kurikulum berdasar asumsi rasionalitas, yaitu asumsi tentang pemrosesan informasi secara cermat yang berkaitan dengan mata pelajaran, peserta didik, lingkungan, dan hasil belajar sebagai berikut:

1. Model perencanaan rasional deduktif atau rasional Tyler. Model ini menitikberatkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (goals dan objectives). Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuat keputusan, dan tepat untuk sistem pendidikan sentralistik.
2. Model interaktif rasional atau The Rational-Interactive Model. Model ini menitikberatkan pada “perencanaan dengan” (planning with) daripada “perencanaan bagi” (planning for). Perencanaan ini bersifat situasional atau fleksibel serta tepat bagi lembaga pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum berbasis sekolah. Model perencanaan kurikulum ini didasarkan pada kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

3. The Diciplines Model Model ini menitikberatkan pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa. Model ini dikembangkan sesuai dengan pertimbangan sistematis tentang relevansi antara pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologis
4. Model tanpa perencanaan atau non planning model. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru di dalam ruangan kelas, sebagai pengambil keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran, pemilihan media belajar dan sebagainya.guru di dalam ruangan kelas, sebagai pengambil keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran, pemilihan media belajar dan sebagainya (Nida Uliatunida, 2020).

Ada beberapa model perencanaan kurikulum yang dapat digunakan dalam proses perencanaan kurikulum. Berikut adalah beberapa model perencanaan kurikulum yang umum digunakan:

1. Model Linear: Model ini mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan berurutan dalam proses perencanaan kurikulum, dimulai dari identifikasi tujuan dan sasaran, pengembangan kurikulum, implementasi, dan evaluasi.
2. Model Sirkular: Model ini melihat proses perencanaan kurikulum sebagai sebuah lingkaran yang berkelanjutan, dengan setiap tahap (identifikasi tujuan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi) saling terkait dan berpengaruh satu sama lain.
3. Model Pengembangan Bertahap: Model ini melibatkan pengembangan kurikulum secara bertahap dan iteratif, dimulai dari identifikasi kebutuhan dan tujuan, pengembangan kurikulum, implementasi, dan evaluasi, dengan setiap tahap diulang dan diperbaiki berdasarkan umpan balik dan evaluasi sebelumnya.

- 4. Model Berbasis Kompetensi: Model ini berfokus pada pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi yang diinginkan, dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diinginkan.
- 5. Model Berbasis Masalah: Model ini melibatkan pengembangan kurikulum berdasarkan masalah atau situasi dunia nyata yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan mereka di masa depan.

Setiap model perencanaan kurikulum memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan model yang tepat untuk digunakan tergantung pada konteks dan kebutuhan khusus dari suatu lembaga pendidikan atau program pendidikan tertentu.

5.2.3. Asas Perencanaan Kurikulum

beberapa asas di dalam perencanaan kurikulum disekolah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Objektivitas	Planning kurikulum haruslah memberikan kejelasan disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional di indonisia, serta data- data yang diinput haruslah konkrit atau real
Keterpaduan	Planning kurikulum haruslah sesuai dengan beberapa jenis yang mendukung mulai dari disiplin ilmu, keterpaduan antara stekholder eksternal maupun eksternal, dan juga

	keterpaduan isi kurikulum dengan pengaktualisasian di lapangan.
Manfaat	Planning kurikulum memberikan beberapa gambaran yang bermanfaat sebagai pijakan untuk memberikan kebijakan didalam evaluasi proses penyelenggaraan pendidikan
Efisiensi dan Efektivitas	Planning kurikulum dalam menghasilkan tujuan pendidikan yang maksimal beraskan terhadap efesiensi keuangan dan efektifitas waktu.
Kesesuaian	Planing kurikulum di se arahkan dengan visi- misi akan diarahkan kemana potensi peserta didik serta mengikuti perubahan zaman milenial yang sangat membutuhkan ilmu teknologi
Keseimbangan	Planning kurikulum mengasaskan keseimbangan pada seluruh komponen yang mendukung dari kemampuan SDM sampai perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan.

Kemudahan	Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran.
Berkesinambungan	Perencanaan kurikulum di tata secara berkesinambungan sejalan dengan tahap- tahap dan jenis dan jenjang satuan pendidikan.
Pembakuan	Perencanaan kurikulum dilakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, sejak dari pusat, propinsi, kabupaten / kotamadya.
Mutu	Planning kurikulum memberikan pemilihan kepada seluruh perangkat pembelajaran yang bermutu, untuk meberikan kepuasan dalam memberikan lulusan yang berkualitas dan kompeten.

Sumber (Roziqin, 2019)

5.2.4. Perencanaan Kurikulum Pesantrean

Perencanaan kurikulum pesantren (Robbaniyah, Ummu and Ta, 2023) dapat berbeda dengan perencanaan kurikulum pada lembaga pendidikan formal lainnya karena pesantren

memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kurikulum pesantren:

1. Fokus pada pengajaran agama: Kurikulum pesantren biasanya lebih berfokus pada pengajaran agama Islam, termasuk studi Al-Quran, hadis, fiqh, dan tasawuf.
2. Pengembangan moral dan karakter: Selain pengajaran agama, pesantren juga berfokus pada pengembangan moral dan karakter siswa. Oleh karena itu, kurikulum pesantren harus mencakup kegiatan yang dapat membantu siswa mengembangkan sikap yang baik, seperti beribadah, berdoa, membantu orang lain, dan menghormati orang lain.
3. Keterampilan hidup: Kurikulum pesantren juga harus mencakup keterampilan hidup yang penting, seperti kegiatan pertanian, tata boga, atau kerajinan tangan. Hal ini penting untuk membantu siswa belajar mandiri dan dapat menghasilkan penghasilan di masa depan.
4. Pengembangan bahasa Arab: Bahasa Arab merupakan bahasa penting dalam Islam dan menjadi bahasa utama dalam kitab-kitab agama. Oleh karena itu, kurikulum pesantren juga harus mencakup pengajaran bahasa Arab.
5. Evaluasi berbasis kompetensi: Evaluasi kurikulum pesantren sebaiknya dilakukan berdasarkan kompetensi yang diharapkan dari siswa, seperti kemampuan membaca Al-Quran, memahami hadis, dan menjalankan ibadah secara benar.

Dalam perencanaan kurikulum pesantren, hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan kurikulum mencakup pengajaran agama yang baik, pengembangan moral dan karakter siswa, keterampilan hidup, pengajaran bahasa Arab, dan evaluasi berbasis kompetensi.

5.3. Tahapan Perencanaan Kurikulum

Teguh Triwiyanto menuliskan langkah-langkah perencanaan kurikulum sebagaimana dikutip dari Imron, sebagai berikut:

1. Prakiraan (forecasting), Prakiraan dalam perencanaan kurikulum berarti upaya untuk memproyeksikan kebutuhan masa depan dengan berpijak pada saat ini dan menjadikan masa lalu sebagai cermin. Melalui prakiraan, kurikulum yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak, yaitu sekolah, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
2. Perumusan tujuan (objectives), Perumusan tujuan dalam perencanaan kurikulum merupakan harapan yang akan dicapai dari kurikulum yang direncanakan.
3. Kebijakan (policy), Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kurikulum yang merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia yang berdasarkan pada filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.
4. Langkah-langkah (procedure), Langkah-langkah merupakan tahapan-tahapan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
5. Pemrograman (programming) Pemrograman merupakan rancangan mengenai usaha untuk mencapai tujuan kurikulum.
6. Penjadwalan (schedule) Penjadwalan merupakan penentuan waktu dalam perencanaan kurikulum
7. Pembiayaan (budgeting) Pembiayaan merupakan implikasi pendanaan dalam perencanaan kurikulum (Dian Kurnia, 2022).

Perencanaan kurikulum melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui dengan baik agar kurikulum yang dirancang dapat

sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam perencanaan kurikulum:

1. Identifikasi kebutuhan: Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan siswa dan masyarakat yang akan menjadi sasaran dari kurikulum yang akan dirancang. Dalam tahap ini, perlu dilakukan analisis terhadap karakteristik siswa, kondisi lingkungan, serta tuntutan dan harapan dari masyarakat.
2. Penyusunan profil lulusan: Tahap ini melibatkan penyusunan profil lulusan yang menggambarkan kompetensi dan karakteristik yang diharapkan siswa miliki setelah menyelesaikan pendidikan di lembaga tersebut. Profil lulusan ini akan menjadi acuan dalam merancang isi kurikulum.
3. Penentuan standar kompetensi: Tahap ini melibatkan penentuan standar kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam setiap mata pelajaran atau area pembelajaran. Standar kompetensi harus sesuai dengan tujuan pendidikan dan profil lulusan yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan silabus: Tahap ini melibatkan penyusunan silabus atau rencana pembelajaran yang menguraikan materi yang akan diajarkan, metode pembelajaran yang akan digunakan, dan penilaian yang akan dilakukan terhadap siswa.
5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Tahap ini melibatkan penyusunan RPP yang merupakan rencana detail mengenai kegiatan pembelajaran di kelas, termasuk jadwal, metode pembelajaran, penilaian, dan evaluasi.
6. Pelaksanaan pembelajaran: Tahap ini melibatkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan

rencana yang telah disusun. Kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan memastikan tercapainya standar kompetensi yang telah ditetapkan.

7. Evaluasi: Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penilaian hasil belajar siswa, kuesioner, atau observasi langsung.
8. Penyempurnaan: Tahap ini melibatkan penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman, kebutuhan siswa dan masyarakat, serta perubahan dalam sistem pendidikan. Penyempurnaan ini akan memastikan agar kurikulum yang dirancang dapat terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan.

Tahapan-tahapan dalam perencanaan kurikulum harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar kurikulum yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

5.3.1. Langkah Penyusunan Silabus

Penyusunan silabus merupakan tahap penting dalam perencanaan kurikulum. Berikut adalah beberapa langkah dalam menyusun silabus:

1. Tentukan tujuan pembelajaran: Tentukan tujuan pembelajaran atau hasil yang ingin dicapai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran atau area pembelajaran.

Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan profil lulusan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

2. Pilih materi yang akan diajarkan: Pilih materi atau topik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan standar kompetensi. Materi yang dipilih harus relevan dengan kondisi siswa dan lingkungan serta mampu menumbuhkan minat dan motivasi siswa.
3. Tentukan metode pembelajaran: Tentukan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, kebutuhan siswa, dan kondisi lingkungan.
4. Tentukan sumber belajar: Tentukan sumber belajar yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, seperti buku teks, buku referensi, bahan ajar, atau media pembelajaran.
5. Tentukan strategi penilaian: Tentukan strategi penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Pilih strategi penilaian yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan metode pembelajaran yang digunakan.
6. Susun rencana pembelajaran: Susun rencana pembelajaran yang menguraikan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode pembelajaran, sumber belajar, dan strategi penilaian. Rencana pembelajaran harus disusun secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami dan diikuti oleh siswa.
7. Uji coba dan evaluasi: Uji coba rencana pembelajaran dan evaluasi terhadap efektivitasnya. Jika diperlukan, lakukan revisi dan penyempurnaan terhadap rencana pembelajaran.
8. Tetapkan waktu pembelajaran: Tentukan jadwal pembelajaran untuk setiap topik atau materi yang akan

diajarkan. Pastikan waktu yang ditetapkan cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengcover materi yang telah dipilih.

Penyusunan silabus harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Silabus juga harus fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan.

5.3.2. Langkah Penyusunan RPP

RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan dokumen yang berisi perencanaan dan pengorganisasian kegiatan pembelajaran di kelas. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun RPP:

1. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar: RPP harus didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh kurikulum yang berlaku. Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini harus sesuai dengan tingkat kelas dan mata pelajaran yang diajarkan.
2. Merumuskan tujuan pembelajaran: RPP harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta mampu menumbuhkan kemampuan dan sikap yang diinginkan.
3. Menentukan materi pembelajaran: RPP harus mencakup materi atau topik pembelajaran yang akan diajarkan. Materi yang dipilih harus relevan dengan tujuan pembelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar serta mampu menumbuhkan minat dan motivasi siswa.
4. Memilih metode pembelajaran: RPP harus mencakup metode pembelajaran yang akan digunakan untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, kebutuhan siswa, dan kondisi lingkungan.

5. Menentukan media pembelajaran: RPP harus mencakup media pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, seperti buku teks, buku referensi, bahan ajar, atau media pembelajaran.
6. Menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran: RPP harus mencakup langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup. Langkah-langkah pembelajaran harus disusun secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami dan diikuti oleh siswa.
7. Merencanakan evaluasi pembelajaran: RPP harus mencakup strategi evaluasi pembelajaran yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Pilih strategi evaluasi yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan metode pembelajaran yang digunakan.
8. Menentukan waktu pembelajaran: RPP harus mencakup waktu pembelajaran untuk setiap kegiatan pembelajaran. Pastikan waktu yang ditetapkan cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengcover materi yang telah dipilih.
9. Melakukan uji coba dan evaluasi: Lakukan uji coba dan evaluasi terhadap RPP yang telah disusun. Jika diperlukan, lakukan revisi dan penyempurnaan terhadap RPP.

Penyusunan RPP harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. RPP juga harus fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan.

5.3.3. Program Tahunan (Prota)

Prota (Program Tahunan) adalah rencana pembelajaran untuk satu tahun pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Isi Prota mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Identitas Sekolah: Nama sekolah, alamat, nomor telepon, dan email sekolah.
2. Tujuan Pembelajaran: Tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik, di mana tujuan tersebut harus mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa.
3. Rencana Kegiatan Pembelajaran: Rencana kegiatan pembelajaran mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran.
4. Rencana Evaluasi Pembelajaran: Rencana evaluasi pembelajaran mencakup jenis evaluasi yang akan digunakan, cara evaluasi, waktu evaluasi, dan kriteria penilaian.
5. Jadwal Pembelajaran: Jadwal pembelajaran harus disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran yang ditentukan oleh kurikulum. Jadwal pembelajaran harus mencakup mata pelajaran yang akan diajarkan, jumlah jam pelajaran, dan waktu pelaksanaan.
6. Anggaran dan Sarana Prasarana: Anggaran dan sarana prasarana mencakup biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
7. Kegiatan Ekstrakurikuler: Kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan selama satu tahun pelajaran.

Isi Prota harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, dan harus diupdate secara berkala jika ada perubahan pada kurikulum. Selain itu, isi Prota juga harus disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan belajar yang ada di sekolah.

5.3.4. Promes (Program Semesteran)

Promes (Program Semester) adalah rencana pembelajaran untuk satu semester yang disusun berdasarkan Prota. Isi Promes mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Identitas Sekolah: Nama sekolah, alamat, nomor telepon, dan email sekolah.
2. Tujuan Pembelajaran: Tujuan pembelajaran semester harus jelas dan spesifik, di mana tujuan tersebut harus mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa pada setiap mata pelajaran.
3. Rencana Kegiatan Pembelajaran: Rencana kegiatan pembelajaran mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran.
4. Rencana Evaluasi Pembelajaran: Rencana evaluasi pembelajaran mencakup jenis evaluasi yang akan digunakan, cara evaluasi, waktu evaluasi, dan kriteria penilaian.
5. Jadwal Pembelajaran: Jadwal pembelajaran harus disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran yang ditentukan oleh kurikulum. Jadwal pembelajaran harus mencakup mata pelajaran yang akan diajarkan, jumlah jam pelajaran, dan waktu pelaksanaan.
6. Anggaran dan Sarana Prasarana: Anggaran dan sarana prasarana mencakup biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta fasilitas dan

perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

7. Kegiatan Ekstrakurikuler: Kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan selama satu semester.

Isi Promes harus disesuaikan dengan Prota yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, isi Promes juga harus disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan belajar yang ada di sekolah. Promes harus diupdate secara berkala jika ada perubahan pada kurikulum dan kebutuhan pembelajaran siswa.

5.4. Isi Kurikulum

Isi kurikulum terdiri dari berbagai komponen, di antaranya standar kompetensi, standar isi, dan standar penilaian. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-komponen isi kurikulum:

1. Standar Kompetensi: Standar kompetensi merupakan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Standar kompetensi ini meliputi kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa pada akhir masa belajar.
2. Standar Isi: Standar isi merujuk pada materi atau bahan ajar yang harus diajarkan oleh guru dalam pembelajaran. Standar isi ini berisi deskripsi tentang topik atau konsep yang harus diajarkan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.
3. Standar Penilaian: Standar penilaian digunakan untuk menentukan bagaimana dan kapan penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Standar penilaian ini mencakup teknik, alat, dan prosedur penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa.

Isi kurikulum juga dapat mencakup beberapa aspek lainnya seperti:

1. Pendidikan karakter: Pendidikan karakter merujuk pada pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang baik dan bermoral bagi siswa. Aspek-aspek karakter yang diajarkan meliputi sikap, nilai-nilai, etika, dan moralitas.
2. Pembelajaran Berbasis Kompetensi: Pembelajaran berbasis kompetensi mengacu pada model pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa melalui pembelajaran yang terintegrasi dan kontekstual.
3. Pengembangan Kreativitas dan Inovasi: Pengembangan kreativitas dan inovasi merujuk pada pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi masalah dan situasi yang baru.
4. Pengembangan Literasi Digital: Pengembangan literasi digital merujuk pada pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijak dan efektif.

Pengembangan isi kurikulum harus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan global yang terus berkembang. Selain itu, isi kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan kemampuan siswa.

5.4.1. Isi Kurikulum Pesantren

Kurikulum pesantren adalah kurikulum yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pesantren atau pondok pesantren. Isi kurikulum pesantren biasanya mencakup tiga

aspek utama, yaitu aspek agama, aspek sosial, dan aspek akademik. Berikut adalah penjelasan mengenai isi kurikulum pesantren:

1. Aspek Agama: Aspek agama merupakan komponen utama dalam kurikulum pesantren. Isi kurikulum pesantren di bidang agama mencakup studi Al-Quran, Hadits, Fiqih, dan Ilmu Kalam. Selain itu, siswa juga akan mempelajari kajian-kajian keagamaan lainnya seperti Tasawuf, Tafsir, dan Sejarah Islam.
2. Aspek Sosial: Aspek sosial juga menjadi bagian penting dalam kurikulum pesantren. Siswa akan mempelajari nilai-nilai kehidupan sosial seperti akhlak, budi pekerti, toleransi, dan persaudaraan. Aspek sosial dalam kurikulum pesantren juga mencakup studi tentang sejarah, politik, dan budaya Islam.
3. Aspek Akademik: Aspek akademik dalam kurikulum pesantren mencakup pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran bahasa Arab menjadi penting dalam kurikulum pesantren karena bahasa ini menjadi bahasa utama dalam sumber-sumber keagamaan seperti Al-Quran dan Hadits.
4. Selain itu, kurikulum pesantren juga dapat mencakup aspek pembelajaran keterampilan seperti keterampilan menulis, berbicara di depan umum, dan keterampilan mengajar.

Kurikulum pesantren harus disesuaikan dengan kebutuhan pesantren dan siswa agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang agama, sosial, dan akademik.

5.4.2. Isi Kurikulum Tahfidz

Kurikulum tahfidz adalah kurikulum yang dirancang khusus untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran (Robbaniyah, Lina and Haironi, 2023). Isi kurikulum tahfidz fokus pada pembelajaran dan penguasaan tahap demi tahap dalam menghafal Al-Quran, termasuk mempelajari tajwid dan tafsir.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang biasanya tercakup dalam kurikulum tahfidz:

1. Mempelajari tajwid: Tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan benar dan tepat. Siswa dalam kurikulum tahfidz akan mempelajari tajwid secara mendalam untuk memastikan bacaan mereka benar dan tepat.
2. Mempelajari juz, surah, dan ayat-ayat Al-Quran: Siswa dalam kurikulum tahfidz akan mempelajari juz, surah, dan ayat-ayat Al-Quran secara terstruktur dan berurutan, dimulai dari surah yang lebih pendek hingga surah yang lebih panjang.
3. Menghafal juz dan surah: Siswa dalam kurikulum tahfidz akan menghafal juz dan surah dalam Al-Quran secara bertahap. Mereka akan mulai dengan menghafal surah yang lebih pendek dan kemudian berkembang ke surah yang lebih panjang.
4. Mempelajari tafsir Al-Quran: Siswa dalam kurikulum tahfidz juga akan mempelajari tafsir Al-Quran untuk memahami makna dan pesan dari ayat-ayat Al-Quran.

Selain itu, siswa dalam kurikulum tahfidz juga akan belajar tentang sejarah Al-Quran dan pentingnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum tahfidz harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dan berdasarkan pada tingkat keahlian mereka dalam membaca Al-Quran. Kurikulum tahfidz

yang baik akan membantu siswa memperoleh kecakapan dalam membaca dan menghafal Al-Quran dengan benar dan tepat.

5.5. Perencanaan Kurikulum di Era Modern

Perencanaan kurikulum berbasis sistem informasi (SI) adalah suatu pendekatan dalam perencanaan kurikulum yang menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum berbasis SI dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak atau software perencanaan kurikulum.

Beberapa langkah dalam perencanaan kurikulum berbasis SI antara lain:

1. Identifikasi kebutuhan pengguna: Langkah pertama dalam perencanaan kurikulum berbasis SI adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem, yaitu para pengambil keputusan di sekolah atau institusi pendidikan. Kebutuhan pengguna meliputi informasi yang dibutuhkan, fungsi yang diinginkan, dan keterampilan teknologi yang dimiliki oleh pengguna.
2. Analisis data: Setelah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk perencanaan kurikulum. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti pengolahan data elektronik, statistik, dan analisis data kualitatif.
3. Perancangan sistem: Setelah melakukan analisis data, langkah selanjutnya adalah merancang sistem. Sistem ini harus meliputi arsitektur, antarmuka, dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perancangan sistem dapat melibatkan desain struktur database, desain antarmuka, desain algoritma, dan desain keamanan.
4. Implementasi sistem: Setelah merancang sistem, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem.

Implementasi sistem dapat melibatkan instalasi software, konfigurasi hardware, pengujian dan debugging, serta pelatihan pengguna.

5. Evaluasi sistem: Setelah sistem diimplementasikan, langkah terakhir adalah mengevaluasi sistem. Evaluasi sistem harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah sistem masih memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak. Evaluasi sistem dapat melibatkan pengukuran kinerja sistem, pengukuran kepuasan pengguna, dan perbaikan sistem.

Dengan menggunakan perencanaan kurikulum berbasis SI, diharapkan proses perencanaan kurikulum dapat lebih efisien dan efektif, serta dapat menghasilkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.5.1. Problematika Perencanaan Kurikulum

Problematika dalam perencanaan kurikulum dapat bervariasi tergantung pada konteks, budaya, dan kondisi pendidikan di suatu negara atau wilayah. Beberapa masalah yang sering dihadapi dalam perencanaan kurikulum antara lain:

1. Perubahan kebijakan: Kebijakan pendidikan yang berubah-ubah dapat menyebabkan perubahan dalam perencanaan kurikulum, sehingga menyulitkan pengembangan dan implementasi kurikulum.
2. Perbedaan interpretasi: Perbedaan interpretasi terhadap standar kompetensi dan isi kurikulum oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan konflik dalam pengembangan kurikulum.
3. Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya seperti tenaga pengajar, dana, dan fasilitas dapat

mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum.

4. Keterbatasan waktu: Waktu yang terbatas untuk mengembangkan kurikulum dapat mempengaruhi kualitas kurikulum yang dihasilkan.
5. Tidak memperhatikan kebutuhan siswa: Kurikulum yang dibuat tidak selalu memperhatikan kebutuhan siswa secara individu, sehingga kurikulum yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa.
6. Kurangnya partisipasi: Kurangnya partisipasi dari stakeholder pendidikan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dapat menyebabkan kurikulum yang dihasilkan kurang relevan dan efektif.
7. Tidak memperhitungkan perkembangan teknologi: Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat kurikulum yang dibuat menjadi usang atau tidak relevan dengan perkembangan terkini.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum, melibatkan berbagai stakeholder dalam proses perencanaan, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum secara berkala. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan pengembangan teknologi untuk mendukung proses perencanaan kurikulum yang lebih efektif dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Lazuardi (2017) 'MANAJEMEN KURIKULUM SEBAGAI PENGEMBANGAN TUJUAN PENDIDIKAN', *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1), pp. 99–112.
- Dian Kurnia, W. (2022) 'Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam', *AT-TAZAKKI*, 4(02), pp. 173–189. doi: 10.37274/rais.v6i01.524.
- Nida Uliatunida (2020) 'Perencanaan Kurikulum Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan', *IMEDIKOM: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah*, 2(1), pp. 35–48.
- Oktapiani, M. (2019) 'Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Indonesia', *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), pp. 71–96. doi: 10.34005/tahdzib.v2i1.471.
- Robbaniyah, Q., Lina, R. and Haironi, A. (2023) 'Tahfidzul Quran Learning Innovation at Pesanteran Islamic Center Bin Baz Yogyakarta Al-Quran', *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor*, 1(1), pp. 169–179.
- Robbaniyah, Q., Ummu, A. and Ta, M. (2023) 'Implementasi pengelolaan asrama di pesantren Islamic Center bin Baz Yogyakarta', *At Turots : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), pp. 86–95.
- Rohman, M. (2015) 'PROBLEMATIKA KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM', *Jurnal Madaniyah*, VII(Januari), pp. 1–15.
- Roziqin, Z. (2019) 'Menggagas Perencanaan Kurikulum Sekolah Unggul', *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), pp. 44–56. doi: 10.36088/assabiqun.v1i1.161.
- Sarwadi, Q. Robbaniyah, R. L. (2021) 'Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia', *Jurnal Administrastrasi Pendidikan*, 27(2), pp. 212–222. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Teguh-Purnomo-3/publication/357078373_KAJIAN_MANAJEMEN_BIAYA_PENDIDIKAN_DALAM_MENINGKATKAN_KUALITAS_LAY

ANAN_PADA_PERGURUAN_TINGGI_BIDANG_MARITIM/li
nks/61bae23dfd2cbd7200a32539/KAJIAN-
MANAJEMEN-BIAYA-PENDIDIKAN-DALAM-ME.

BAB 6

SOSIALISASI KURIKULUM

Oleh Dr. Epi Supriyani Siregar. M.Pd

6.1. Pendahuluan

Sosialisasi kurikulum adalah proses memperkenalkan dan mengkomunikasikan kurikulum baru kepada pemangku kepentingan terkait, seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, struktur, isi, dan metode pembelajaran yang terkandung dalam kurikulum yang baru.

Menurut Charlotte Buhler (sebagaimana dikutip Anis da Rato: 1988) memberikan pengertian sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Sedangkan Menurut Caswell and Campbell Dilansir dari buku Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Abad 21 (2021), definisi kurikulum adalah penyusunan pengalaman yang digunakan guru sebagai proses untuk membimbing anak didiknya menuju kedewasaan.

Maka dari itu dengan sosialisasi kurikulum dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kurikulum yang baru, serta menggugah minat dan dukungan pemangku kepentingan terkait. Hal ini dilakukan agar implementasi kurikulum baru dapat berjalan dengan sukses dan mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan.

Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses sosialisasi kurikulum:

1. **Persiapan Materi:** Pengembangan materi sosialisasi yang berisi informasi terperinci tentang kurikulum baru, termasuk tujuan, ruang lingkup, kompetensi, dan perubahan yang

diusulkan. Materi ini harus mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.

2. Pelatihan dan Orientasi: Mengadakan pelatihan dan sesi orientasi untuk guru dan staf pendidikan. Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pemahaman tentang perubahan dalam kurikulum dan cara mengimplementasikannya dengan efektif. Guru diberikan pengetahuan tentang strategi pengajaran baru, pendekatan pembelajaran yang dianjurkan, dan alat evaluasi yang relevan.
3. Pertemuan dengan Orang Tua: Mengadakan pertemuan khusus dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan dan manfaat kurikulum baru. Orang tua diberikan pemahaman tentang harapan pembelajaran, metode pengajaran baru, dan cara mereka dapat mendukung anak-anak mereka dalam proses pembelajaran.
4. Komunikasi Publik: Mengadakan acara sosialisasi di tingkat sekolah atau komunitas untuk menginformasikan kepada masyarakat umum tentang perubahan dalam kurikulum. Ini bisa melibatkan seminar, lokakarya, pameran, atau publikasi di media lokal. Komunikasi ini penting untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kurikulum.
5. Evaluasi dan Umpan Balik: Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kurikulum dan memperoleh umpan balik dari semua pemangku kepentingan. Evaluasi ini membantu untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan memperbaiki kurikulum jika diperlukan.

Selama proses sosialisasi kurikulum, komunikasi yang terbuka dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan sangat penting. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami perubahan yang terjadi dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang baru.

6.2. Pengertian Sosialisasi Kurikulum

Sosialisasi kurikulum mengacu pada proses pengenalan dan penggunaan kurikulum baru kepada pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Ini melibatkan memperkenalkan tujuan, struktur, konten, metode pembelajaran, dan perubahan yang terdapat dalam kurikulum yang baru kepada para guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum.

Sosialisasi kurikulum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kurikulum yang baru, serta menggugah minat dan dukungan pemangku kepentingan terkait. Hal ini dilakukan agar implementasi kurikulum baru dapat berjalan dengan sukses dan mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan.

Proses sosialisasi kurikulum dapat melibatkan beberapa langkah, seperti:

Pengembangan Materi: Membuat materi sosialisasi yang mencakup informasi terperinci tentang tujuan, kompetensi, struktur, dan perubahan yang diusulkan dalam kurikulum baru.

Pelatihan dan Orientasi: Mengadakan pelatihan dan sesi orientasi bagi guru dan staf pendidikan. Tujuan dari pelatihan ini adalah memperkenalkan mereka pada kurikulum baru, memberikan pemahaman tentang strategi pengajaran yang disarankan, dan mendiskusikan metode pembelajaran yang dianjurkan.

Pertemuan dengan Orang Tua: Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan perubahan yang ada dalam kurikulum baru. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak-anak di rumah.

Komunikasi Publik: Mengadakan komunikasi publik melalui seminar, lokakarya, pertemuan komunitas, atau publikasi di media lokal. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memperkenalkan kurikulum baru kepada masyarakat umum dan mendapatkan partisipasi mereka dalam mendukung implementasinya.

Evaluasi dan Umpan Balik: Melakukan evaluasi dan mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan terkait

untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan membuat perbaikan jika diperlukan.

Dengan sosialisasi kurikulum yang efektif, diharapkan pemangku kepentingan dapat memahami dengan baik kurikulum baru dan mendukung implementasinya. Hal ini akan membantu mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam kurikulum tersebut.

6.2.1. Jenis Sosialisasi Kurikulum

Ada beberapa jenis sosialisasi kurikulum yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan kurikulum baru kepada pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa jenis sosialisasi kurikulum yang umum dilakukan:

1. **Sosialisasi Internal:** Sosialisasi internal melibatkan pengenalan kurikulum baru kepada para guru, staf pendidikan, dan administrasi di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam implementasi kurikulum memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, struktur, dan perubahan yang terkait.
2. **Sosialisasi Eksternal:** Sosialisasi eksternal melibatkan memperkenalkan kurikulum baru kepada pemangku kepentingan di luar lembaga pendidikan, seperti orang tua, komunitas lokal, atau mitra pendidikan lainnya. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam mendukung implementasi kurikulum.
3. **Sosialisasi Guru:** Sosialisasi khusus untuk guru melibatkan pelatihan dan sesi orientasi yang ditujukan untuk memperkenalkan mereka pada kurikulum baru. Tujuan sosialisasi guru adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang perubahan dalam kurikulum, strategi pengajaran yang dianjurkan, dan pendekatan pembelajaran yang perlu diadopsi.
4. **Sosialisasi Siswa:** Sosialisasi kepada siswa dilakukan untuk memperkenalkan mereka pada kurikulum baru, menjelaskan

tujuan pembelajaran, dan memberikan pemahaman tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang disarankan oleh kurikulum tersebut.

5. **Sosialisasi Orang Tua:** Sosialisasi khusus untuk orang tua bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang kurikulum baru, manfaatnya, dan bagaimana mereka dapat mendukung pembelajaran anak-anak di rumah. Pertemuan khusus dengan orang tua dan distribusi materi informatif adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam sosialisasi ini.

Setiap jenis sosialisasi kurikulum memiliki fokus yang berbeda tergantung pada pemangku kepentingan yang dituju. Tujuan utama dari semua jenis sosialisasi ini adalah untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang kurikulum baru dan mendapatkan dukungan serta partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam implementasinya.

6.2.2. Model Model Sosialisasi Kurikulum

Ada beberapa model sosialisasi kurikulum yang dapat digunakan dalam memperkenalkan dan mengkomunikasikan kurikulum baru kepada pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa model yang umum digunakan:

Model Top-Down: Model ini melibatkan pengenalan kurikulum baru melalui peran sentral lembaga pemerintah atau otoritas pendidikan. Kurikulum baru diumumkan dan disosialisasikan kepada semua lembaga pendidikan di tingkat nasional atau regional. Guru dan siswa diinstruksikan untuk mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh otoritas.

1. **Model Bottom-Up:** Model ini melibatkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan orang tua, dalam pengembangan dan sosialisasi kurikulum baru. Proses ini dimulai dengan melibatkan mereka dalam diskusi, pertemuan, dan kelompok kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ingin diatasi dalam kurikulum. Dengan demikian, kurikulum baru dikembangkan berdasarkan masukan dari mereka.

2. Model Partisipatif: Model ini melibatkan partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan dalam pengembangan dan sosialisasi kurikulum baru. Pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk berkontribusi, memberikan masukan, dan berbagi pengalaman mereka dalam proses pembuatan kebijakan kurikulum. Tujuannya adalah untuk mencapai konsensus dan kesepakatan yang lebih luas dalam hal tujuan, isi, dan metode pembelajaran dalam kurikulum.
3. Model Pendidikan Profesional: Model ini menekankan pada pendidikan dan pelatihan guru dalam mengadopsi dan mengimplementasikan kurikulum baru. Guru diberikan pelatihan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan perubahan dalam pengajaran mereka sesuai dengan kurikulum baru.
4. Model Komunikasi dan Kampanye: Model ini melibatkan kampanye komunikasi yang kuat untuk memperkenalkan kurikulum baru kepada masyarakat umum. Ini dapat melibatkan penggunaan media massa, acara sosialisasi di tingkat komunitas, seminar, dan publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kurikulum baru.

Pemilihan model sosialisasi kurikulum akan tergantung pada konteks, kebijakan, dan kebutuhan lokal. Kombinasi dari beberapa model juga dapat digunakan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan dukungan yang kuat dari pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum baru.

6.3. Manfaat Sosialisasi Kurikulum

Sosialisasi kurikulum memiliki beberapa manfaat yang signifikan, baik bagi lembaga pendidikan maupun pemangku kepentingan terkait. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sosialisasi kurikulum:

1. Memastikan Pemahaman yang Mendalam: Sosialisasi kurikulum membantu memastikan pemahaman yang mendalam tentang tujuan, struktur, isi, dan metode pembelajaran yang terkandung dalam kurikulum baru.

Dengan memperkenalkan kurikulum secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan orang tua, mereka dapat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari pembelajaran.

2. **Memperoleh Dukungan dan Partisipasi:** Melalui sosialisasi kurikulum, pemangku kepentingan dapat memperoleh dukungan dan partisipasi yang lebih besar dalam implementasi kurikulum baru. Dengan memahami manfaat dan kebutuhan kurikulum, mereka lebih mungkin untuk mendukung dan berperan aktif dalam menjalankan perubahan yang diperlukan.
3. **Meningkatkan Kualitas Pengajaran:** Sosialisasi kurikulum memberikan kesempatan bagi guru untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang strategi pengajaran yang disarankan, pendekatan pembelajaran yang efektif, dan alat evaluasi yang relevan. Ini membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan memungkinkan guru untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran siswa secara lebih efektif.
4. **Meningkatkan Keterlibatan Siswa:** Dengan memperkenalkan kurikulum secara efektif kepada siswa, sosialisasi kurikulum dapat mendorong keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Mereka akan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan pembelajaran dan dapat berkontribusi dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri.
5. **Membangun Kerjasama dengan Orang Tua:** Sosialisasi kurikulum juga melibatkan orang tua dalam pemahaman tentang kurikulum baru. Ini membantu membangun kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak-anak di rumah. Orang tua dapat berperan aktif dalam mendukung dan memantau kemajuan pembelajaran anak mereka sesuai dengan kurikulum yang baru.
6. **Menghindari Ketidakpastian dan Perlawanan:** Dengan sosialisasi yang baik, pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mendapatkan

klarifikasi, dan menghilangkan ketidakpastian atau kebingungan terkait dengan perubahan dalam kurikulum. Ini dapat membantu mengurangi perlawanan terhadap perubahan dan memastikan penerimaan yang lebih luas terhadap kurikulum baru.

Secara keseluruhan, sosialisasi kurikulum adalah langkah penting dalam memastikan pemahaman yang luas, dukungan, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum baru. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, keterlibatan siswa,

6.4. Indikator Sosialisasi Kurikulum

Indikator sosialisasi kurikulum dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan proses sosialisasi kurikulum. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan:

1. **Pemahaman Pemangku Kepentingan:** Indikator ini mencakup sejauh mana pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan orang tua, memahami tujuan, struktur, konten, dan metode pembelajaran yang terkandung dalam kurikulum baru. Ini dapat diukur melalui tes pengetahuan, survei, atau diskusi terstruktur.
2. **Partisipasi Pemangku Kepentingan:** Indikator ini mengukur tingkat partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi kurikulum. Hal ini dapat diukur dengan mengamati kehadiran mereka dalam pertemuan, pelatihan, atau acara sosialisasi, serta melalui tingkat keterlibatan mereka dalam diskusi dan kegiatan terkait kurikulum.
3. **Dukungan dan Penerimaan:** Indikator ini mengukur tingkat dukungan dan penerimaan dari pemangku kepentingan terhadap kurikulum baru. Ini dapat diukur melalui survei pendapat, wawancara, atau penilaian partisipatif untuk mengidentifikasi sejauh mana pemangku kepentingan merasa positif dan mendukung perubahan kurikulum.
4. **Implementasi Kurikulum:** Indikator ini mengevaluasi sejauh mana kurikulum baru diimplementasikan secara efektif oleh

guru dalam proses pembelajaran sehari-hari. Hal ini dapat diukur melalui observasi kelas, penilaian kinerja guru, atau laporan pengajaran yang mencerminkan penerapan kurikulum yang sesuai.

5. **Kualitas Pembelajaran:** Indikator ini mengukur perubahan dalam kualitas pembelajaran siswa setelah penerapan kurikulum baru. Hal ini dapat diukur melalui penilaian hasil belajar siswa, tes pengetahuan, portofolio, atau observasi kelas.
6. **Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan:** Indikator ini mencakup umpan balik dan evaluasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan terkait keberhasilan sosialisasi kurikulum. Ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, atau forum diskusi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan dalam proses sosialisasi.

Penggunaan indikator-indikator ini membantu dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas sosialisasi kurikulum serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum baru.

6.4.1. Faktor Faktor Sosialisasi Kurikulum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sosialisasi kurikulum. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi pemahaman, penerimaan, dan implementasi kurikulum baru oleh pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa faktor sosialisasi kurikulum yang perlu diperhatikan:

1. **Komunikasi Efektif:** Komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam sosialisasi kurikulum. Komunikasi harus jelas, terbuka, dan teratur antara pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan staf pendidikan. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi yang tepat tentang tujuan, perubahan, dan manfaat kurikulum baru.
2. **Pelatihan dan Pembekalan:** Pemangku kepentingan, terutama guru, perlu mendapatkan pelatihan dan

pembekalan yang memadai terkait dengan kurikulum baru. Pelatihan harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang struktur, isi, metode pembelajaran, dan evaluasi yang terkait dengan kurikulum baru. Dengan demikian, mereka dapat mengimplementasikan kurikulum dengan efektif.

3. Dukungan Kepemimpinan: Dukungan dan peran kepemimpinan yang kuat dari manajemen sekolah atau lembaga pendidikan sangat penting dalam sosialisasi kurikulum. Kepemimpinan yang positif dan aktif dapat membantu memastikan komitmen, partisipasi, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum.
4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Keterlibatan aktif dan partisipasi pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, merupakan faktor penting dalam sosialisasi kurikulum. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengembangan, sosialisasi, dan evaluasi kurikulum, mereka merasa memiliki peran dalam perubahan tersebut.
5. Sumber Daya yang Memadai: Ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti buku teks, perangkat pembelajaran, materi ajar, dan fasilitas yang relevan, sangat penting dalam sosialisasi kurikulum. Pemangku kepentingan perlu memiliki akses ke sumber daya ini untuk mendukung implementasi kurikulum dengan baik.
6. Konteks dan Budaya Lokal: Konteks dan budaya lokal juga mempengaruhi sosialisasi kurikulum. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal, serta mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana lembaga pendidikan beroperasi.
7. Evaluasi dan Umpan Balik: Evaluasi terus-menerus dan umpan balik dari pemangku kepentingan penting untuk mengidentifikasi keberhasilan dan perbaikan dalam sosialisasi kurikulum. Proses evaluasi harus dilakukan secara teratur untuk memastikan pemahaman yang tepat, penerimaan yang baik, dan keberhasilan implementasi kurikulum.

Memperhatikan faktor-faktor ini dalam sosialisasi kurikulum dapat membantu meningkatkan pemahaman, penerimaan, dan partisipasi pemangku kepentingan

6.5. Kekurangan Dan Kelebihan Sosialisasi Kurikulum

Sosialisasi kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari sosialisasi kurikulum:

6.5.1. Kelebihan sosialisasi kurikulum:

1. **Pemahaman yang Mendalam:** Sosialisasi kurikulum memungkinkan pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan orang tua, untuk memahami dengan lebih baik tujuan, struktur, dan isi kurikulum baru. Ini membantu menciptakan pemahaman yang mendalam dan konsisten tentang apa yang diharapkan dari pembelajaran.
2. **Dukungan dan Penerimaan:** Melalui sosialisasi kurikulum, pemangku kepentingan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan kebutuhan kurikulum baru. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat dukungan dan penerimaan mereka terhadap perubahan kurikulum.
3. **Partisipasi Aktif:** Sosialisasi kurikulum memungkinkan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Ini dapat meningkatkan keterlibatan mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kurikulum.
4. **Keterlibatan Orang Tua:** Sosialisasi kurikulum dapat melibatkan orang tua dalam pemahaman dan dukungan terhadap kurikulum baru. Hal ini memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam mendukung pembelajaran anak-

anak di rumah dan membangun kerjasama yang kuat antara sekolah dan rumah.

6.5.2. Kekurangan Sosialisasi Kurikulum

1. Waktu dan Sumber Daya: Sosialisasi kurikulum membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Proses ini melibatkan pertemuan, pelatihan, komunikasi yang intensif, dan pengalokasian sumber daya untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang luas. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam situasi dengan keterbatasan waktu dan sumber daya yang terbatas.
2. Perubahan yang Cepat: Dalam beberapa kasus, sosialisasi kurikulum dapat mengalami kesulitan ketika terjadi perubahan kurikulum yang terlalu cepat atau terlalu sering. Pemangku kepentingan mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terlalu cepat dan dapat mengganggu kontinuitas pembelajaran.
3. Resistensi terhadap Perubahan: Tidak semua pemangku kepentingan akan menerima perubahan kurikulum dengan baik. Beberapa dari mereka mungkin mengalami resistensi terhadap perubahan yang diusulkan, baik karena ketidakpastian, kekhawatiran terhadap dampaknya, atau kebiasaan lama yang sulit diubah. Perlu usaha ekstra untuk mengatasi resistensi dan memperoleh dukungan yang diperlukan.
4. Kesenjangan Pemahaman: Meskipun upaya sosialisasi kurikulum dilakukan, masih ada kemungkinan adanya kesenjangan pemahaman antara pemangku kepentingan

6.6. Langkah Langkah Sosialisasi Kurikulum

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam proses sosialisasi kurikulum:

1. Analisis dan Pengembangan Kurikulum: Langkah pertama dalam sosialisasi kurikulum adalah melakukan analisis terhadap kurikulum yang akan diperkenalkan. Evaluasi

- kurikulum yang ada, identifikasi kebutuhan dan tantangan pembelajaran, serta pengembangan kurikulum baru yang sesuai dengan tujuan dan standar pendidikan yang relevan.
2. **Persiapan Sosialisasi:** Setelah pengembangan kurikulum, langkah selanjutnya adalah persiapan sosialisasi. Hal ini meliputi pengorganisasian kegiatan, penyusunan materi sosialisasi, dan penetapan jadwal pertemuan dengan pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan staf pendidikan.
 3. **Komunikasi yang Efektif:** Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam sosialisasi kurikulum. Pastikan informasi yang relevan tentang kurikulum baru disampaikan dengan jelas dan teratur kepada pemangku kepentingan. Gunakan berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan, surat, email, laman web, atau media sosial, sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan.
 4. **Pelatihan dan Pembekalan:** Sosialisasi kurikulum juga melibatkan pelatihan dan pembekalan kepada pemangku kepentingan. Berikan pelatihan yang memadai kepada guru dan staf pendidikan tentang konsep, struktur, dan metode pembelajaran dalam kurikulum baru. Sertakan juga pemangku kepentingan lainnya, seperti siswa dan orang tua, dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan yang relevan.
 5. **Diskusi dan Dialog:** Selenggarakan pertemuan dan forum diskusi terbuka untuk memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan. Berikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pandangan, dan memberikan masukan terkait kurikulum baru. Diskusi ini dapat membantu mengklarifikasi pemahaman, mengatasi kekhawatiran, dan memperkuat dukungan dari pemangku kepentingan.
 6. **Implementasi dan Pengawasan:** Setelah sosialisasi, lanjutkan dengan implementasi kurikulum baru. Pastikan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum dilakukan secara teratur. Identifikasi tantangan dan keberhasilan dalam implementasi kurikulum, dan ambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran.

7. **Evaluasi dan Penyesuaian:** Lakukan evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi kurikulum. Gunakan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk mengevaluasi keberhasilan, mengidentifikasi kelemahan, dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Proses ini dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang lebih baik dan lebih relevan di masa depan.

Melalui langkah-langkah ini, sosialisasi kurikulum dapat dilakukan dengan lebih efektif, memastikan pemahaman, dukungan, dan keberhasilan implementasi kurikulum baru di lembaga pendidikan.

keterampilan sosialisasi kurikulum

Dalam proses sosialisasi kurikulum, terdapat beberapa keterampilan yang penting untuk dimiliki. Berikut adalah beberapa keterampilan sosialisasi kurikulum yang dapat berguna:

1. **Keterampilan Komunikasi:** Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam sosialisasi kurikulum. Ini meliputi kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan teratur kepada pemangku kepentingan, mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif.
2. **Keterampilan Presentasi:** Kemampuan dalam melakukan presentasi yang efektif juga penting dalam sosialisasi kurikulum. Ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan materi dengan jelas, menggunakan media visual yang tepat, dan menjelaskan konsep dan ide dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. **Keterampilan Berfikir Kritis:** Keterampilan berfikir kritis membantu dalam memahami dan mengevaluasi kurikulum secara mendalam. Ini meliputi kemampuan untuk menganalisis, menilai, dan menyimpulkan informasi yang terkait dengan kurikulum, serta mempertanyakan dan mengatasi asumsi-asumsi yang mendasarinya.
4. **Keterampilan Pemecahan Masalah:** Kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul dalam sosialisasi kurikulum adalah keterampilan penting. Ini

melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul, merumuskan solusi yang efektif, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

5. Keterampilan Manajemen Konflik: Dalam sosialisasi kurikulum, konflik dapat muncul antara pemangku kepentingan yang memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, keterampilan manajemen konflik sangat penting. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan mencari solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak.
6. Keterampilan Kolaborasi: Sosialisasi kurikulum melibatkan kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keterampilan kolaborasi sangat penting. Ini termasuk kemampuan untuk bekerja sama, menghargai kontribusi semua pihak, dan mencapai tujuan bersama secara efektif.
7. Keterampilan Pemahaman Budaya: Dalam konteks sosialisasi kurikulum, keterampilan pemahaman budaya sangat penting. Ini melibatkan kemampuan untuk menghormati dan memahami perbedaan budaya, mengakomodasi nilai-nilai lokal, dan memastikan kurikulum dapat berintegrasi dengan baik dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Dengan mengembangkan dan menggunakan keterampilan-keterampilan ini, proses sosialisasi kurikulum dapat dilakukan dengan lebih efektif, memfasilitasi pemahaman, partisipasi, dan dukungan yang luas dari pembelajaran

Kesimpulan

Sosialisasi kurikulum adalah proses yang penting dalam memperkenalkan kurikulum baru kepada pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan. Dari diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut mengenai sosialisasi kurikulum:

1. Sosialisasi kurikulum membantu menciptakan pemahaman yang mendalam tentang tujuan, struktur, dan isi kurikulum baru. Melalui komunikasi yang efektif dan dialog terbuka,

pemangku kepentingan dapat memahami manfaat dan kebutuhan kurikulum baru.

2. Dalam sosialisasi kurikulum, partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan staf pendidikan, sangat penting. Melalui pelatihan, diskusi, dan kolaborasi, mereka dapat berkontribusi dalam perencanaan dan implementasi kurikulum, meningkatkan keterlibatan dan mendukung keberhasilan implementasi.
3. Sosialisasi kurikulum membuka peluang untuk melibatkan orang tua dalam pemahaman dan dukungan terhadap kurikulum baru. Hal ini memperkuat hubungan antara sekolah dan rumah, serta meningkatkan partisipasi orang tua dalam mendukung pembelajaran anak-anak di rumah.
4. Kekurangan sosialisasi kurikulum termasuk waktu dan sumber daya yang diperlukan, resistensi terhadap perubahan, dan potensi kesenjangan pemahaman antara pemangku kepentingan. Namun, dengan pemahaman yang baik, komunikasi yang efektif, dan manajemen yang tepat, kekurangan ini dapat diatasi.
5. Manfaat sosialisasi kurikulum meliputi pemahaman yang lebih baik, dukungan yang lebih tinggi, partisipasi aktif, keterlibatan orang tua, dan kesesuaian dengan konteks sosial dan budaya. Dalam jangka panjang, sosialisasi kurikulum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Dengan demikian, sosialisasi kurikulum merupakan langkah penting dalam memperkenalkan perubahan kurikulum dan memastikan kelancaran implementasinya. Dengan melibatkan pemangku kepentingan secara efektif, sosialisasi kurikulum dapat menciptakan pemahaman, partisipasi, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buhler, Charlotte. (1988). *Practishe Kinder Psychologie*, Boston: Houghton Mifflin, Co.
- Caswell and Campbell *Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Abad 21* (2021),
- Depdiknas. (2008). *Panduan Sosialisasi Kurikulum 2006*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Huda, M., & Harahap, S. S. (2015). Implementasi Sosialisasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 1-12.
- Iskandar, A. (2013). Strategi Sosialisasi Kurikulum 2013 untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1), 95-107.
- Mulyasa, E. (2015). *Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetio, A. R. (2019). Sosialisasi Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(2), 59-68.
- Santoso, E. (2016). Sosialisasi Kurikulum 2013: Upaya Mengoptimalkan Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 49(2), 93-100.
- Setyosari, P. (2019). Implementasi Sosialisasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 1-9.
- Syah, M. (2016). Sosialisasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar: Persiapan Dalam Implementasi. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 35(2), 177-186.

BAB 7

IMPLEMENTASI KURIKULUM

Oleh Dr. Nasarudin, S.Pd.I., M.Pd.

7.1. Pendahuluan

Dunia pendidikan Indonesia saat ini ada pada teknologi generasi Z yang mengasumsikan bakat teknologi sebagai fitrah bawaan sejak lahir. Siklus hidupnya dalam tumbuh dan berkembang akan bertahan saat perangkat teknologi berada dalam genggaman. Perangkat pendidikan yang disebut dengan kurikulum harus mampu bersinergi dengan perubahan generasi yang berlangsung, sehingga kurikulum tetap menjadi hal utama untuk diperhatikan demi Indonesia yang berkemajuan dan tercerahkan, sehingga sering kali terjadi perubahan kurikulum dari waktu ke waktu di sekolah maupun di perguruan tinggi.

Empat perubahan kurikulum terakhir di jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), Kurikulum tahun 2013 (K-13), Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka (KM), sedangkan di jenjang pendidikan tinggi yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Perubahan kurikulum pasti terjadi karena hanya perubahan yang sanggup mempertahankan eksistensi dan pencapaian target mutu yang diharapkan (Nasarudin, 2022).

Dalam perubahan kurikulum ada tiga tahapan yang dilalui yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Miller & Seller (1985) menyebutnya sebagai proses kurikulum yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Tahapan implementasi kurikulum sebagai bentuk aktualisasi perencanaan kurikulum dalam bentuk ide, program, keputusan dan kebijakan yang telah disepakati di satuan

pendidikan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian (Nasarudin, 2023).

7.2. Hakikat Implementasi Kurikulum

7.2.1. Konsep Kurikulum

Secara etimologi kata kurikulum adopsi dari bahasa Inggris yaitu *curriculum* yang bermula dari bahasa Latin yaitu *currere* yang berarti jalur atau jalan, sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan *manhaj* (منهج). Adapun secara terminologi definisi kurikulum terus mengalami perubahan makna dari klasik sampai modern.

Baharudin (2010) mengutip pendapat Al-Busyair & Said (1992), bahwa konsep klasik kurikulum adalah semua yang diputuskan dan dianggap perlu oleh satuan pendidikan bagi peserta didik, setelah melihat kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan siswa, serta jauh dari lingkungan sosial yang menantinya di masa depan . Dengan konsep ini , kurikulum lebih mengutamakan untuk memberikan informasi dan fakta kepada siswa, seperti halnya guru lebih mengutamakan pengisian kepala siswa dengan informasi dan fakta sebanyak mungkin. Adapun konsep modernnya, itu adalah semua pengalaman belajar, pendidikan, sosial dan budaya yang disediakan satuan pendidikan untuk peserta didiknya di dalam dan di luar satuan pendidikan dengan tujuan membantu mereka untuk tumbuh dan mengubah perilaku mereka secara penuh dan komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikannya.

Oleh karena itu, kurikulum dalam konsepnya yang modern tidak memandang peserta didik sebagai akal yang terbawa tubuh, melainkan memperhatikan pertumbuhan peserta didik secara menyeluruh, sehingga memperhatikan pertumbuhan akal, fisik, sosial, moral dan spiritual. Bahan pelajaran tidak dilihat sebagai tujuan itu sendiri, melainkan sebagai sarana yang membantu mencapai pertumbuhan siswa. Dengan demikian, kurikulum dalam arti luas mencakup segala aspek kegiatan kepeserta didikan di dalam dan di luar satuan pendidikan, di bawah arahan dan pengawasan satuan pendidikan. Artinya, kehidupan yang dijalani siswa di bawah

bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, dan di sini semua pengalaman yang diperoleh dalam kurikulum ini termasuk dalam semua aspek siswa yang berkaitan dengan pertumbuhan (Al-Manik, 1995).

Makna klasik kurikulum diartikan seperangkat materi pembelajaran, kemudian berkembang menjadi rancangan pembelajaran, lalu berkembang menjadi pengalaman belajar dan kegiatan pembelajaran, serta terakhir kurikulum diartikan sebagai hasil belajar dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) atau dalam bahasa Arab disebut *tahsil dirasiy* (تحصيل دراسي).

Berikut definisi kurikulum sesuai kategorinya menurut para ahli. *Pertama*, kurikulum sebagai perangkat materi. Menurut Taylor & Alex&er bahwa kurikulum sebagai seperangkat materi disampaikan kepada peserta didik dengan mengajarkan materi pembelajaran. Menurut Sanjaya (2011) menjelaskan bahwa kurikulum sebagai kelompok mata pelajaran yang harus dikuasai siswa menjadi pengalaman belajar siswa, dengan rangkaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum merupakan sekelompok materi pelajaran yang dipelajari siswa dalam bentuk mata pelajaran (Ibrahim & Al-Kalzah, 2000).

Kedua, kurikulum sebagai kegiatan pembelajaran. Menurut Harold Alberytycs, kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, tetapi mencakup kegiatan pembelajaran. *Ketiga*, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Menurut Othanel Smith kurikulum sebagai seperangkat pengalaman yang dapat diberikan kepada peserta didik. Kurikulum adalah seluruh pengalaman yang direncanakan yang ditawarkan oleh satuan pendidikan untuk membantu siswa mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan batas kemampuannya (Umairah, 1991).

Ada juga yang memadukan sebagian atau keseluruhan, seperti Umairah (1991) mengutip kurikulum adalah seperangkat pengalaman dan kegiatan yang ditawarkan oleh satuan pendidikan kepada siswa baik di dalam dan di luar, dengan tujuan membantu mereka untuk berkembang secara

komprehensif dan terintegrasi, yang mengarah pada perubahan perilaku mereka, memastikan interaksi mereka dengan lingkungan dan masyarakat, dan membuat mereka merancang solusi yang tepat terhadap masalah yang mereka hadapi.

Dan menurut Furaj (1989) menyatakan bahwa kurikulum adalah kumpulan informasi pengetahuan dan konsep yang disusun dalam bentuk akademis dan psikologis yang memudahkan siswa untuk belajar. Hal ini sebagai ungkapan serangkaian keterampilan yang terorganisir dan berurutan yang akan dipelajari siswa, dan ekspresi interaksi berbagai komponen yaitu guru, administrator, psikolog, siswa, metode, informasi dan sarana prasarana pada lingkungan pendidikan yang eksklusif dan transaran. Kurikulum merupakan kumpulan dari pengalaman, fakta, konsep, keterampilan, kebiasaan, nilai dan kecenderungan yang diterima oleh mahasiswa selama berada di lingkungan satuan pendidikan dan menjadi bagian dari dirinya dan kepribadiannya.

Sedangkan menurut Madkur, dkk. (2010), kurikulum adalah suatu sistem terpadu dari fakta, nilai, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dinamis yang diberikan satuan pendidikan kepada peserta didik untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang telah Tuhan siapkan untuknya, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dari beberapa pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat sistem yang terdiri dari rangkaian rencana, kegiatan dan pengalaman belajar yang dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan internalisasi pengetahuan, keterampilan dan sikap (Nasarudin, 2023).

Kritikan terhadap konsep lama kurikulum selalu terus ada yang menyebabkan kurikulum lama untuk ditinjau lagi. Berikut berbagai kritikan tersebut.

- 1) Kurikulum tidak berhasil mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa, melainkan berfokus pada aspek kognitif, mengabaikan aspek fisik, agama, sosial, psikologis, dan seni.
- 2) Mengabaikan kebutuhan, kecenderungan, dan masalah siswa, guru hanya fokus pada materi.
- 3) Mengabaikan untuk membimbing sikap siswa, karena fokus guru pada mata pelajaran menyebabkan kurangnya perhatian

guru dalam mengarahkan perilaku siswa, dan guru percaya bahwa materi yang dipelajari siswa mampu membawa pada perubahan perilaku mereka.

- 4) Tidak memperhitungkan perbedaan individu siswa, karenanya guru sering menggunakan metode, media, materi dan alat evaluasi yang jarang *diupdate*, semua ini tidak sesuai dengan prinsip perbedaan individu.
- 5) Terlupakannya pembentukan kebiasaan dan sikap positif di kalangan siswa, karena kurikulum lama lebih menitikberatkan pada informasi dan bahan pelajaran, padahal kebiasaan tersebut sangat penting.
- 6) membiasakan siswa pada hal-hal negatif dan kurangnya kem&irian guru dalam menjelaskan materinya dan mentransfer informasi kepada siswanya tanpa melibatkan mereka berperan dalam menyiapkan materi atau memperoleh informasi.
- 7) Akibat ledakan ilmu pengetahuan pada era digital informasi, mata pelajaran dan bahan kajian selalu perlu *diupdate*.
- 8) Mengabaikan aspek implementasi pekerjaan dari pihak guru, karena guru tidak mempersiapkan tugasnya secara matang.
- 9) Siswa terasa diasingkan oleh sekolah karena kurikulum hanya berfokus pada materi dan menghafalkannya, menyebabkan siswa cepat bosan, dan itulah menjadi sumber ketidaknyamanan siswa.
- 10) Kurikulum ini menciptakan kesenjangan antara masyarakat dan pendidikan, karena masyarakat berubah dengan cepat dan terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, sedangkan kurikulum hanya terpaku pada status mapannya.
- 11) Mengabaikan peran guru dalam implementasi kurikulum, seakan guru tidak berperan sama sekali, diman tugas guru hanya menyampaikan apa yang ada di buku tanpa membiasakan siswa berdiskusi, berpikir, menganalisis, meneliti dan menyelidiki (Furaj, 1989).

7.2.2. Konsep Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation* artinya penerapan, yang dalam bahasa Arab

disebut *tathbiq* (تطبيق). Implementasi adalah penerapan ide, program, atau serangkaian kegiatan baru dari individu atau masyarakat yang menggunakannya (Miller & Seller, 1985). Wahab (2008) mengutip beberapa pendapat tentang implementasi, antara lain pendapat Cleves bahwa implementasi adalah suatu proses dinamis yang diarahkan pada tujuan pelaksanaan secara administratif dan politis; dan menurut Mazmanian dan Sebastiar adalah pelaksanaan suatu kebijakan dasar keputusan seperti hukum; dan menurut Van Meter dan Van Horn adalah prosedur yang dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah atau swasta yang cenderung untuk mencapai tujuan yang dinilai.

Implementasi kurikulum dimaknai sebagai penerjemahan rencana menjadi tindakan (Oliva, 1982). Tindakan tersebut bertujuan mewujudkan dan melaksanakan kurikulum (perencanaan tertulis) di dalam kelas, yang berarti melakukan proses transfer pengalaman belajar kepada siswa (Wahab, 2008). Dan merupakan implementasi pemikiran, konsep dan rencana kurikulum ke dalam kegiatan mengajar sehingga siswa memiliki kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi lingkungannya dengan dirinya (Mulyasa, 2002).

Nasarudin (2023) mengutip beberapa pendapat yaitu menurut Leetwood dalam Miller & Seller (1985) adalah suatu proses perubahan untuk mengurangi disparitas antara pelaksanaan pendidikan menurut kurikulum saat ini dan menurut kurikulum baru. Dan menurut Smith & Lovat (1995) implementasi adalah proses perubahan untuk mencapai hasil yang mendekati tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Menurut Saylor & Alexander (1995), merupakan proses perwujudan kurikulum ke proses pembelajaran. Singkatnya, penerapan kurikulum merupakan aspek pelaksanaan yang berkaitan dengan aktualisasi kurikulum tertulis ke dalam proses pembelajaran agar siswa dapat menguasai kompetensi tertentu (Sukiman, 2017).

Sehubungan dengan pendekatan adaptasi mutualisme bahwa dalam implementasi kurikulum semua pelakasa implementasi melakukan adaptasi sesuai harapan, kebutuhan,

dan tuntutan perkembangan kontekstual. Berdasarkan fakta sering dijumpai kurikulum diterapkan sesuai dengan rencana di masa lalu, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan situasi (Jackson, 1991).

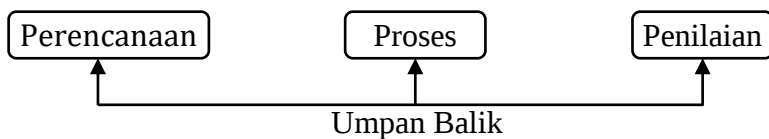
7.3. Tahapan Implementasi Kurikulum

Tahapan implementasi kurikulum dalam satuan kecil pendidikan yaitu satuan pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas, terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan atau proses dan asesmen (Nasarudin, 2022). Tahapan ini dianggap sebagai komponen proses dari sistem penerapan kurikulum. Semua komponen tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, karena perencanaan saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, dimana perencanaan berkaitan dengan pelaksanaan, dan keduanya berkaitan dalam asesmen secara bersama-sama atau sendiri-sendiri (Hamalik, 2016).

Mulyasa (2002) mengatakan pelaksanaan kurikulum meliputi tiga kegiatan yaitu pengembangan program pendidikan dan pembelajaran, pelaksanaan pendidikan dan evaluasi. Pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dan program yang memenuhi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan guru adalah untuk menguatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kinerja guru memenuhi kebutuhan lembaga saat ini dan masa depan (Pounder & Sakka, no date). Istilah tahapan penerapan kurikulum adalah proses pembelajaran (Ghufran, 2003).

Pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, proses, dan penilaian atau asesmen. Setelah melewati ketiga kegiatan tersebut, capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam perencanaan yang belum tercapai maka guru meninjau perencanaan dan proses untuk perbaikan. James M. Cooper menyebutnya sebagai model guru sebagai pengambil keputusan seperti pada gambar berikut (Majid, 2007).

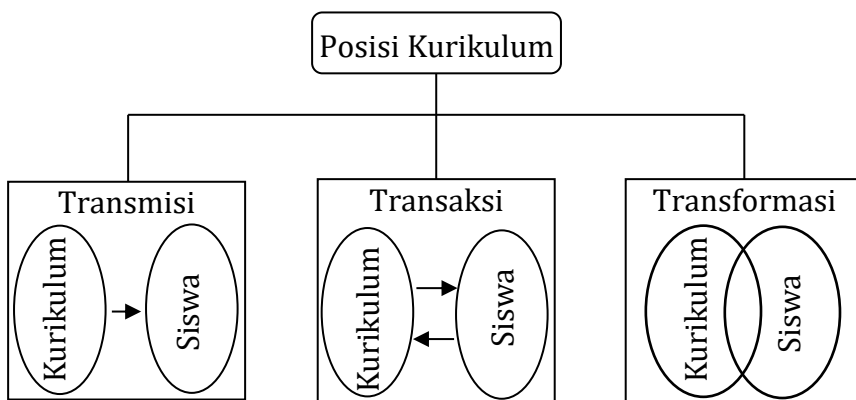
Gambar 7.1 Guru Sebagai Pembuat Keputusan dalam pembelajaran



7.4. Model-Model Implementasi Kurikulum

Model implementasi kurikulum merupakan kerangka konseptual posisi kurikulum yang disederhanakan sebagai sebagai pedoman implementasi kurikulum dalam satuan pendidikan. Ada tiga posisi kurikulum yaitu posisi transmisi, posisi transaksi dan posisi transformasi (Nasarudin, 2022).

Gambar 7.2 Posisi Kurikulum dalam Proses Penerapan Penerapan Kurikulum (diadopsi dari Miller & Siller)



Model-model implementasi kurikulum dalam Nasarudin (2022), antara lain:

- Concerns Based Adoption Model (CBAM)*, yaitu kerangka kerja konseptual yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi kemungkinan perilaku pendidik di satuan pendidikan dalam melakukan perubahan guna meningkatkan pembelajaran dalam bentuk inovasi kurikulum pembelajaran.
- The Inovations Profile Models (IPM)*, yaitu model yang menetapkan serangkaian langkah strategi implementasi yang

- terdiri dari diagnosis, aplikasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul.
- c. *Trust Opening Realization Independence Model* (TORIM), yaitu model yang berfokus pada perubahan pribadi dan sosial, dan berpusat pada bagaimana orang-orang dalam suatu organisasi seperti sistem sekolah dapat menilai perubahan dalam lingkungan organisasi secara utuh.
 - d. *Organization Development Model* (ODM), yaitu model yang untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi masalah dan proses perbaikan dilakukan melalui diagnosis manajemen kolaboratif.
 - e. *Overcoming Resistance to Change Model* (ORCM), yaitu model yang berasumsi keberhasilan perubahan organisasi berantung kepada kecendikiawan pemimpin dalam menghilangkan resistensi jajaran terhadap perubahan.
 - f. *Systems Model*, yaitu model yang berasumsi bahwa tujuan perubahan kurikulum tidak berhenti pada tujuan yang dicapai, tetapi implementasi kurikulum sebagai upaya tanpa henti dalam mencapai tujuan dan cara yang selalu lebih baik dari sebelumnya, karena tidak ada hasil yang sempurna.
 - g. *Leadership-Obstacle Course Model* (LOCM), yaitu model yang memperlakukan resistensi jajaran terhadap perubahan sebagai masalah yang membutuhkan kajian mendalam untuk menentukan tingkat dan sifat penolakan jajaran dalam mengimplementasikan kurikulum.
 - h. *Linkage Model*, yaitu model yang mengutamakan harmonisasi antara sistem sumber daya sebagai pembuat kurikulum dan system pengguna sebagai pelaksana kurikulum. Sistem sumber daya harus melalui siklus diagnosis, pencarian, pengambilan, pembuatan solusi, diseminasi dan evaluasi untuk menguji produknya.
 - i. *Rand Change Agent Model* (RCAM), yaitu model yang berasumsi dinamika organisasi sebagai penghambat perubahan sehingga membutuhkan langkah inisiasi, implementasi dan integrasi.
 - j. *The Adoption Model*, yaitu model yang fokus pada pengembangan dan difusi implementasi kurikulum baik pada satuan pendidikan maupun pada satuan pembelajaran.

7.5. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)

Sesuai dengan jargon kurikulum merdeka yaitu merdeka belajar, implementasi kurikulum ini diberikan kebebasan dalam menerapkannya di setiap satuan pendidikan masing-masing bergantung kepada kesiapan peserta didik, pendidik dan satuan pendidikan. Tahapan implementasi ini bersifat eskalasi, dimulai dari tahap awal dilanjutkan dengan tahap berkembang, tahap siap dan tahap mahir. Tahapan eskalasi tersebut tetap dalam koridor tahapan umum implementasi kurikulum yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

Terdapat 15 aspek dalam pelaksanaan IKM yang terbagi pada tiga tahapan umum tersebut dan berindikator berbeda pada masing-masing empat tahapan awal, berkembang, siap dan mahir. Pada tahap perencanaan terdapat lima aspek yaitu: 1) Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan, 2) Perancangan alur tujuan pembelajaran, 3) Perencanaan pembelajaran dan asesmen, 4) Perencanaan penggunaan dan pengembangan perangkat ajar, 5) Perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan pada tahap pelaksanaan terdapat tujuh aspek yaitu: 1) Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, 2) Penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 3) Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran, 4) Pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik (pendidikan dasar dan menengah), 5) Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran, 6) Kolaborasi dengan orang tua/keluarga dalam pembelajaran, 7) Kolaborasi dengan masyarakat/komunitas/ industri. Dan adapun pada tahap penilaian terdapat tiga aspek yaitu: 1) refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum, 2) Penilaian dalam pembelajaran, 3) Kolaborasi dengan orang tua/keluarga dan masyarakat/industri (Kemdikbudristek, 2022).

Perencanaan IKM mencakup capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Sedangkan proses IKM menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pembelajaran berbasis perbedaan, keistimewaan dan keunikan potensi dan kebutuhan peserta didik, dengan menyesuaikan

kedalaman dan keluasan materi, ketepatan penggunaan metode dan komprehensifitas penggunaan asesmen. Dan adapun asesmen IKM menggunakan asesmen formatif yang diadakan pada setiap awal pemberian materi pembelajaran, dan asesmen sumatif untuk penentuan hasil belajar peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Busyair, M.M. and Said, M.M.M. (1992) *المناهج وطرق التدريس*. الرياض: دار اللواء.
- Al-Manik, M. bin A.A. (1995) *المناهج وطرق تدريس المواد الشرعية*. جاكارتا: معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا.
- Baharudin, U. (2010) *تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة*. Malang: UIN Maliki Pres.
- Furaj, a.L. bin H. (1989) *مناهج أسسها محتواها أنواعها أهدافها تقويمها*. مكة: جامعة أم القرى.
- Ghufran, A. (2003) *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kajian Kritis Implementasi dan Implikasi*. Yogyakarta: Laboratorium FSP Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Hamalik, O. (2016) *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, F.T. and Al-Kalzah, R.A. (2000) *مناهج المعاصرة. الإسكندرية: منشأة المعارف*.
- Jackson, P.W. (1991) *Handbook of Research on Curriculum*. New York: Mac Millan Publishing Company.
- Kemdikbudristek (2022) *Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Madkur, A.A., Tuaimah, R.A. and Haridi, I.A. (2010) *Al Marji' fi Manahiji Ta'limil Lugatil Arabiyah bi Lugatin Ukhra*. Kairo: Darul Fikri Al Arabi.
- Majid, A. (2007) *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miller, J.P. and Seller, W. (1985) *Curriculum Perspectives And Practice*. New York: Longman.
- Mulyasa, E. (2002) *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasarudin (2022) *Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab: Implementasi dalam Mencapai Mutu*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Nasarudin (2023) 'Evaluasi Implementasi Kurikulum', in

- Evaluasi Kurikulum*. Padang: GET Press, pp. 73–90.
- Oliva, P.F. (1982) *Deevloping the Curriculum*. Boston: Little, Brown and Company.
- Pounder, J. and Sakka, M. Al (no date) "Towards a Model Curriculum For Graduate Human Resource Management Studies: A Case Study from the United Arab Emirates", *Education, Business and Society*, 3(1 DOI 10.1108/17537981011022788).
- Sanjaya, Wi. (2011) *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Saylor, J.G. and Alexander, W.M. (no date) *Planning Curriculum for Modern Schools*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Smith, D.L. and Lovat, T.J. (1995) *Curriculum: Action on Reflection Revisited*. Wentworth Falls, NSW: Social Science Press.
- Sukiman (2017) *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umairah, I.B. (1991) المنهج وعناصره. القاهرة: دار المعارف
- Wahab, S.A. (2008) *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Malang Press.

BAB 8

EVALUASI KURIKULUM

Oleh Widiyanto, S.Pd., M.Pd.

8.1. Pendahuluan

Perubahan adalah sesuatu yang selalu ada pada tiap konteks kurikulum. Suatu kurikulum yang sesuai dengan konteks situasi tertentu maka belum tentu sesuai untuk waktu yang lain walaupun diberlakukan di tempat/ satuan pendidikan yang sama Oleh karena itu, kurikulum selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian evaluasi kurikulum adalah suatu keniscayaan. Antar kurikulum dan evaluasi kurikulum ibarat gigi dan rantai roda , antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Kurikulum tanpa evaluasi tidak mendapatkan hasil yang optimal baik dalam proses pembuatan kurikulum maupun proses pelaksanaan kurikulum. Sebaliknya evaluasi tanpa kurikulum maka tidak punya arti.

Pada bab ini, pembaca akan mendapatkan penjelasan beberapa sub bab-sub bab pendukung mulai dari pengertian evaluasi kurikulum, landasan, tujuan, fungsi, pendekatan kriteria dan yang terakhir adalah model-model evaluasi kurikulum. Besar harapan pembaca akan mendapatkan pemahaman pada tiap-tiap sub bab yang dijelaskan.

8.2. Pengertian

Evaluasi kurikulum mempunyai pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Stufflebeam dalam Abdurrahman Halabi (2019) menjelaskan pengertian evaluasi kurikulum sebagai the process of delineating, obtaining, and

providing useful information for judging decision alternatives,” Artinya evaluasi adalah suatu proses guna memberi gambaran, mendapatkan, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Adapun menurut Vina Putri Rahayu(2023) evaluasi kurikulum adalah penggunaan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel guna membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. S. Hamid Hasan (2008) mendefinisikan evaluasi kurikulum sebagai usaha yang sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kurikulum agar bisa digunakan sebagai bahan

pertimbangan mengenai nilai dan arti suatu kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Adanya narasi konteks menunjukkan bahwa kurikulum selalu berubah-ubah sesuai kemajuan zaman, berlaku pada kurun waktu tertentu. Dari berbagai pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah suatu proses yang sistematis menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan informasi yang valid dan realibel mengenai pelaksanaan suatu konteks kurikulum agar bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum tersebut.

8.3. Landasan

Landasan evaluasi kurikulum menurut Hasan(2008) ada lima yakni :

8.3.1. Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas legal adalah kegiatan pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan hukum formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya kegiatan pengembangan kurikulum tersebut merupakan kegiatan yang sah baik sejak proses konstruksi kurikulum, implementasi kurikulum dan evaluasi kurikulum. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan

diupayakan tidak melanggar tata norma baik agama, budaya, sosial, ekonomi, ketunaan dan lain sebagainya.

8.3.2. Akuntabilitas Akademik

Akuntabilitas akademik adalah kegiatan pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan filosofi, teori, prinsip dan prosedur yang digunakan. Artinya baik filosofi, teori, prinsip dan prosedur yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, dapat dikaji dan dibahas dalam banyak referensi. Sebaliknya jika hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang baru maka akuntabilitas akademik adalah akuntabilitas yang terkait dengan kepentingan publik dan komunitas pengembang kurikulum.

8.3.3. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dalam kegiatan pengembangan suatu kurikulum. Pertanggungjawaban berkenaan dengan cara dan jumlah uang itu digunakan, serta efisiensi penggunaan uang tersebut. Walaupun demikian, evaluasi kurikulum berkenaan dengan cara dan jumlah uang yang digunakan tidak begitu diperdulikan, sebaliknya konsep efisiensi lebih diperperdulikan. Oleh karena itu, ketika evaluasi kurikulum berbicara mengenai akuntabilitas finansial maka pengertian akuntabilitas finansial dibatasi pada cost-benefit dan cost effectiveness.

8.3.4. Akuntabilitas Pemberian Jasa

Akuntabilitas pemberian jasa adalah pemberian jasa yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas pemberian jasa akan mempertanyakan apakah dalam proses implemetasi kurikulum terlaksana dengan sebaik-baiknya, apakah guru telah memberikan pelayanannya dengan sebaik-baiknya, apakah kondisi dan fasilitas serta suasana kerja mendukung guru untuk memberi pelayanan

sebaik-baiknya, apakah tercipta lingkungan kerja yang mendukung pemberian jasa pelayanan yang maksimal dari guru, apakah insentif yang tersedia sehingga mampu mendukung pemberian jasa pelayanan maksimal dari guru, dan sebagainya.

8.3.5. Akuntabilitas Dampak

Akuntabilitas dampak artinya kurikulum harus memperlihatkan dampak pada masyarakat dan pada kualitas lulusan ketika kelak berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian evaluasi kurikulum harus mampu mengungkapkan pengaruh dari suatu kurikulum di masyarakat. Evaluasi terhadap dampak akan memberi pengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Hal ini harus disadari dari sejak awal ketika kurikulum baru dikembangkan bahwa kurikulum tersebut harus merupakan jawaban terhadap masalah yang ada di masyarakat.

Rifki (2021) menambahkan landasan evaluasi kurikulum yaitu :

1. Rasa ingin tahu akademisi mengenai pengembangan kurikulum (curriculum construction)
2. Rasa ingin tahu akademisi mengenai implementasi kurikulum (curriculum implementation)
3. Rasa ingin tahu akademisi mengenai evaluasi kurikulum (curriculum evaluation),
4. Rasa ingin tahu akademisi mengenai hasil kurikulum (curriculum outcomes)

8.4. Tujuan Evaluasi Kurikulum

Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengetahui efisiensi dan keefektifitasan suatu kurikulum yang meliputi tujuan, isi/materi, strategi, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian (Arifin:2011). Adapun Hasan(2008) menjelaskan bahwa dalam menentukan tujuan evaluasi

kurikulum tergantung dari konsep atau pengertian seseorang tentang evaluasi. Ada empat kelompok tujuan evaluasi :

- a. Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum bagi para pengambil kebijakan.
- b. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu.
- c. Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang bisa dimanfaatkan dalam usaha perbaikan kurikulum
- d. Memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum.

Hilabi(2019) menjelaskan tujuan evaluasi kurikulum adalah :

- a. Untuk menjadi dasar pengembangan kurikulum selanjutnya
- b. Untuk meningkatkan program yang sedang dilaksanakan, untuk mengontrol kualitas dan juga sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi program berikutnya.
- c. Untuk memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik.
- d. Untuk mempertanggungjawabkan keberadaan dan hasil sebuah program pendidikan kepada masyarakat.
- e. Untuk mendapatkan dan mengumumkan informasi sebagai petunjuk pembuatan keputusan pendidikan dengan memperhatikan program yang tepat.

8.5. Fungai Evaluasi Kurikulum

Fungsi evaluasi kurikulum secara umum adalah (a) untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang diarahkan ke semua komponen kurikulum, (b) untuk memberi informasi bagi para pembuat kebijakan, (c) untuk pertanggungjawaban, laporan, seleksi dan penempatan, (d) untuk akreditasi (Arifin:2008). Adapun menurut Oemar dalam Hilabi(2019) menjelaskan fungsi dari evaluasi kurikulum adalah : (a) Edukasi, untuk mengetahui kedayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan, (b) Instruksional, untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan

kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran, (c) Diagnosis, untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka perbaikan kurikulum, dimana evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri, serta upaya kearah inovasi kurikulum masa yang akan datang, (d) Administratif, untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka pengelolaan kegiatan pembelajaran Scriven dalam Arifin(2019) menjelaskan bahwa fungsi evaluasi dengan istilah formatif dan sumatif.

Formatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan upaya perbaikan suatu kurikulum (curriculum improvement). Upaya perbaikan dari fungsi formatif dilakukan bisa pada waktu konstruksi kurikulum dan implementasi kurikulum. Adapun fungsi sumatif adalah fungsi kurikulum untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum yang berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, atau dampak kurikulum terhadap sekolah dan masyarakat.

8.6. Kriteria Evaluasi Kurikulum

Kriteria adalah ukuran yang digunakan untuk menilai standar keberhasilan suatu kurikulum. Menurut Morrision dalam Halabi(2008) bahwa kriteria evaluasi harus memenuhi dua persyaratan yaitu pertama, relevan dengan kerangka rujukan dan tujuan evaluasi program kurikulum. Kedua, ditetapkan pada data deskriptif yang relevan dan menyangkut program/kurikulum.

Landasan kriteria evaluasi kurikulum ada dua yaitu :

- a. Hubungan antara kurikulum dengan evaluasi. Landasan hubungan antara keduanya diartikan sebagai posisi sumber kriteria terhadap kurikulum itu sendiri. Dalam arti apakah kriteria evaluasi kurikulum tersebut berasal dari dalam kurikulum itu sendiri ataukah sebaliknya/berasal dari luar kurikulum yang dimaksud.

- b. Waktu pada saat kriteria evaluasi kurikulum dikembangkan. Artinya kriteria evaluasi kurikulum itu ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

Fullan dan Pomfret mengklasifikan dalam pendekatan pengembangan kelompok kriteria evaluasi kurikulum dalam empat kelompok yakni pre-ordinate, fidelity, mutual-adaptif dan process (Hasan:2008)

1. Pendekatan Kriteria Pre-Ordinary

Pendekatan ini mempunyai dua ciri khas yaitu :

- a. Kriteria ditetapkan saat kegiatan evaluasi kurikulum belum dilaksanakan dan masih dalam bentuk rancangan. Artinya evaluator menggunakan kriteria tersebut sejak ditetapkan rancangan sampai pekerjaan evaluasi itu selesai. Tidak ada perubahan kriteria walau jenis dan kondisi lapangan berbeda dengan apa yang diperkirakan sebelumnya. K
- b. Kriteria dikembangkan dari suatu yang sudah dianggap baku(standar). Alat evaluasi telah memiliki kebakuan dalam hal validitas dan realibilitas. Penetapan validitas dan realibitas dilakukan berdasarkan prosedur tradisi psikometrik. Walau demikian evaluator tetap menguji kembali validitas dan realibitas berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Kriteria pre-ordinary dikembangkan dengan pendekatan pencapaian hasil belajar, berbagai teori kurikulum, pembelajaran, psikologi, dan teori lain di luar dunia pendidikan seperti teknologi informasi, sosiologi, ekonomi, antropologi dan sebagainya. Dengan demikian karakteristik penting dari kriteria pre-ordinary adalah kriteria pre-ordinary tidak berhubungan dengan karakteristik evaluan (obyek yang dievaluasi), sehingga evaluator harus hati-hati dalam memilih alat evaluasi. Jika ternyata karekteristik alat evaluasi tidak sesuai dengan karakteristik evaluan, maka sebaiknya mencari alat evaluasi lain atau menggunakan pendekatan lain.

2. Pendekatan Kriteria Fidelity

Pendekatan kriteria fidelity juga menggunakan kriteria yang dikembangkan sebelum evaluator terjun ke lapangan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kurikulum dikembangkan dari kurikulum itu sendiri bukan dari luar kurikulum tersebut. Dengan karakteristik yang demikian maka pendekatan kriteria fidelity diperlukan untuk melihat implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan.

Termasuk dalam pengertian pendekatan kriteria fidelity adalah jika evaluator mengembangkan kriterianya berdasarkan persepsi para pengembang kurikulum.

3. Pendekatan Kriteeloria dari Lapangan (Proses)

Pendekatan kriteria proses merupakan konsekuensi dari digunakannya *naturalistic inquiry* (kualitatif) dalam menentukan pendekatan kriteria evaluasi kurikulum.

Karakteristik yang menonjol dari pendekatan kriteria proses adalah :

- a. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi tidak dikembangkan sebelum evaluator terjun di lapangan tetapi dikembangkan selama di lapangan.
- b. Sangat peduli (*concern*) para evaluator dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana kurikulum di lapangan.
- c. Mempunyai hubungan yang erat dengan pemakain pendekatan kualitatif.
- d. Kurikulum yang ada dipelajari dan dijadikan kerangka berpikir kasar ketika evaluator akan mengunjungi lapangannya (Hilabi:2019)

4. Pendekatan Kriteria Mutally Adaptive

Pendekatan kriteria *mutally adaptive* merupakan pendekatan gabungan antara pendekatan kriteria *per-ordinary*, fidelity dan proses. Untuk evaluasi kurikulum, pengembangan kriteria gabungan menggunakan berbagai sumber kriteria untuk mengukur berbagai dimensi kurikulum. Untuk suatu evaluasi kurikulum, kriteria gabungan itu terjadi pada studi evaluasi , tetapi masing-

masing kriteria digunakan untuk mengukur dimensi kurikulum yang berbeda-beda. Dengan perkataan lain evaluasi dengan menggunakan pendekatan mutually adaptive artinya evaluasi dengan pendekatan pengembangan kriteria gabungan menggunakan berbagai sumber kriteria untuk mengukur berbagai dimensi kurikulum (Hasan:2008)

Pembahasan kriteria dalam evaluasi kurikulum tidak ada pembahasannya tanpa adanya penentuan kriteria yang disepakati antara evaluator dengan pengguna jasa hasil evaluasi. Karena pemberian pertimbangan oleh evaluator hanya bisa dilakukan jika adanya kejelasan kriteria.

8.7. Model-Model Evaluasi Kurikulum

Hasan(2008) membagi model-model evaluasi kurikulum dibagi atas tiga kelompok yaitu :

1. Kelompok kuantitatif
2. Kelompok kualitatif
3. Kelompok ekonomi mikro

Model kelompok kuantitatif mempunyai ciri yaitu penggunaan prosedur kuantitatif dalam mengumpulkan data dan fokus evaluasinya pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar. Kelemahan dari model ini adalah pengabaian terhadap proses belajar, padahal proses belajar merupakan merupakan bagian yang penting yang mempengaruhi hasil belajar. Yang termasuk dalam kelompok kuantitatif adalah model Balck Box Tyler, model Teoritik Taylor dan Maguire, model pendekatan sistem Alkin, model Countenance Stake, dan model CIPP.

Model kelompok kualitatif mempunyai ciri yakni penggunaan metodologi kualitatif dalam mengumpulkan data dan menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama dalam evaluasi. Yang termasuk dalam kelompok model kualitatif adalah model studi kasus, model Illuminatif, dan model responsif

Selanjutnya akan dibahas satu per satu.

1. Model Kelompok Kuantitatif
2. Model Black Box

Model Black Box ini dibangun atas dua prinsip yakni :

1. Evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik artinya evaluator ketika hendak menentukan tujuan kurikulum yang akan dievaluasi harus memperhatikan bagaimana standar ketercapaian tujuan hendak dicapai. Untuk mengetahui perubahan tingkah laku peserta didik bisa dilakukan dengan melakukan pre-test dan post-test.

Pada tatanan pelaksanaan, model Black Box menggunakan tiga prosedur utama. Pertama, menentukan tujuan kurikulum yang akan dievaluasi. Kedua, menentukan situasi agar peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan tingkah laku yang terkait dengan tujuan. Ketiga, menentukan alat evaluasi yang hendak digunakan untuk mengukur perubahan tingkat laku peserta didik.

2. Evaluasi dilakukan pada awal peserta didik sebelum pelaksanaan kurikulum serta pada saat telah melaksanakan kurikulum tersebut. Evaluator untuk mendapatkan perubahan tingkah laku peserta didik bisa melakukan tes awal (pre-rest) yang merupakan gambaran mengenai kemampuan awal peserta didik dan tes akhir (post-test) yang menggambarkan kemampuan peserta didik setelah melaksanakan kurikulum.

Model Black Box pernah diberlakukan di Indonesia pada kurikulum 1975 (Halabi:2019) Model Teoritik Taylor dan Maguire. Pada model ini, evaluator melakukan dua kegiatan.

Pertama, mengumpulkan data obyektif dari berbagai sumber mengenai komponen tujuan, lingkungan, personalia, metode dan konten, serta hasil belajar. Kedua, pengumpulan data yang merupakan hasil pertimbangan secara personal mengenai kualitas tujuan, masukan, dan hasil belajar. Hasil dari pengumpulan data ini dimasukkan dalam matriks tujuan, penafsiran, strategi dan hasil belajar. Cara kerja model Black Box ini dimulai dari keinginan yang ada di masyarakat terhadap pendidikan yang kemudian keinginan ini dijadikan tujuan dalam kurikulum. Selanjutnya evaluator memberikan pertimbangan akan relevansi antara kurikulum, tujuan satuan pendidikan dan dengan tujuan mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Relevansi keduanya dilihat dari hasil peserta didik setelah mengikuti kurikulum yang ditetapkan.

Ada dua kriteria dalam memberikan pertimbangan. Pertama, kesesuaian tugas utama sekolah. Kedua tingkat urgensi tujuan kurikulum untuk dijadikan program sekolah. Tujuan perubahan tingkah laku peserta didik (behavioral) yang dikembangkan pada setiap mata pelajaran harus memenuhi dua kriteria di atas. Tugas akhir dari evaluator pada model ini adalah menelaah hasil peserta didik. Walaupun demikian evaluator tidak terbatas hanya melihat secara detail tentang hasil belajar yang bersifat khusus. Tetapi evaluator harus melihat outcome dari suatu hasil belajar, apakah hasil belajar yang diperoleh dapat digunakan/ditransfer di lingkungan lain selain satuan pendidikan tersebut. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kemampuan yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Model pendekatan sistem Alkin pendekatan ini memiliki keunikan dibandingkan dengan pendekatan lainnya yaitu dimasukkannya unsur pendekatan ekonomi mikro dalam kegiatan evaluasi. Yang dimaksud dengan unsur ekonomi mikro adalah dimasukkan pengukuran dan kontrol variabel sebagai hal

yang penting dan harus diperhatikan oleh evaluator. Menurut Alkin bahwa evaluator tidak hanya puas dengan kontrol pilihan acak tetapi harus menerapkan juga kontrol statistik terutama jika unit yang dievaluasi kecil (Hasan:2008).

Model ini dikembangkan berdasarkan enam komponen, yaitu :

a. Sistem luar

Yang dimaksud dengan sistem luar adalah sistem yang berlaku di luar persekolahan seperti sistem lingkungan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

b. Masukan peserta didik

Yang dimaksud dengan masukan peserta didik adalah deskripsi atau pengukuran mengenai informasi karakteristik peserta didik yang masuk dalam sistem, seperti : kemampuan intelektual, hasil belajar sebelumnya (entry behavior), kepribadian, kebiasaan, latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan sosial, dan sebagainya (Halabi:2019)

c. Masukan keuangan

Adalah bantuan keuangan yang diterima pihak sekolah. Sumber dana ini berasal dari masyarakat, komite sekolah, dinas dan departemen terkait.

d. Faktor perantara

Faktor perantara merupakan faktor yang menentukan keluaran (output) secara langsung. Faktor perantara yang dimaksud adalah : rasio antara guru dan peserta didik, jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, pengaturan kurikulum yang digunakan, prosedur pengajaran, penyediaan buku, pengaturan administrasi akademik dan bantuan profesional yang diberikan guru kepada siswa dalam belajar.

e. Keluaran peserta didik

Keluaran peserta didik adalah semua perubahan yang ada di peserta didik setelah memperoleh pengalaman belajar. Perubahan tersebut bukan hanya diukur dari skor yang didapatkan oleh peserta didik dalam tes-tes kemampuan akademik semata tetapi meliputi cakupan yang luas seperti : kemampuan peserta didik untuk melanjutkan pelajaran di tingkat yang lebih tinggi, kemampuan saat memasuki dunia kerja dan melakukan pekerjaan serta aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.

f. Keluaran bukan peserta didik

Ini adalah kelanjutan dari keluaran peserta didik yaitu perubahan yang terjadi pada peserta didik yang berdampak dan berpengaruh pada perubahan dalam diri masyarakat dimana peserta didik itu tinggal. Contohnya, penilaian masyarakat terhadap image sekolah, dimana peserta didik pernah belajar. Perubahan ini karena keluaran peserta didik yang mengalami pendidikan tertentu di sekolah setelah menjadi anggota masyarakat berpengaruh walau tidak langsung terhadap munculnya generasi yang berbeda dengan orangtuanya.

Kekuatan model ini adalah keterikatannya dengan sistem karena pendidikan itu sendiri sistem maka wajar jika evaluasi kurikulum juga dengan pendekatan sistem. Dengan sistem ini maka kegiatan sekolah dapat diikuti dengan seksama mulai dari variabel masukan, prosen dan keluaran.

Kelemahan model ini adalah hanya dapat mengevaluasi kurikulum yang sudah siap dilaksanakan di sekolah.

Model Countenance Stake, Model ini dikembangkan atas dasar keyakinan yang kuat bahwa evaluasi harus memberikan deskripsi dan pertimbangan mengenai evaluasi secara

sepenuhnya. Dengan dua keyakinan ini menjadikan model countenance sebagai model evaluasi kurikulum kualitatif. Adapun menurut Hasan(2008) model ini tetap dalam kelompok kuantitatif karena dari awal model ini dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif.

Model countenance ini terdiri dari dua matriks yaitu matriks deskripsi dan matriks pertimbangan.

1. Matriks deskripsi

Ada dua kategori dalam matriks deskripsi. Pertama, matriks deskripsi adalah sesuatu yang direncanakan oleh pengembang kurikulum. Dalam hal ini evaluator merencanakan apa yang akan terjadi pada waktu interaksi dan kemampuan apa yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik pasca proses interaksi. Kedua, matriks deskripsi yang kedua disebut observasi yang berkaitan dengan apa yang sebenarnya sebagai implementasi dari apa yang diharapkan dalam kategori pertama. Evaluator harus memahami apa yang telah direncanakan, menentukan data yang diperlukan, prosedur dan alat pengumpulan data yang diperlukan.

2. Matriks Pertimbangan

Matriks pertimbangan terdiri dari kategori standar dan pertimbangan, dan fokus antecedents, transaksi, dan outcomes (hasil yang diperoleh).

Kategori standar adalah kriteria yang harus dimiliki oleh kurikulum atau program yang akan dijadikan evaluasi.

Kategori pertimbangan ini menghendaki evaluator melakukan pertimbangan dari apa-apa yang dilakukan mulai dari kategori pertama dan kedua pada matriks deskripsi sampai kategori pertama matriks pertimbangan.

Model CIPP, sesuai dengan namanya, model ini terdiri dari empat jenis evaluasi yaitu evaluasi Context (konteks), Input (masukan), Process (proses) dan Product (hasil). Evaluasi konteks Evaluasi konteks adalah evaluasi kurikulum dalam dimensi pengertian sebagai ide. Evaluasi ini mempunyai karakteristik :

1. Ditujukan untuk menilai keadaan yang sedang dilakukan satuan pendidikan,
2. Untuk memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti suatu keadaan,
3. Bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi sehingga dapat diketahui need assesmentnya
4. Untuk memberikan pertimbangan tingkat ketercapaian tujuan yang sesuai dengan kebutuhan (need) yang telah ditentukan.
5. Membantu satuan pendidikan untuk menentukan satu satuan pendidikan apakah perlu inovasi atau tidak.

Evaluasi masukan, evaluasi masukan adalah evaluasi kurikulum dalam dimensi pengertian sebagai rencana. Evaluasi masukan merupakan hal yang penting karena evaluasi ini diperlukan untuk memberi pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Sebagaimana Stufflebeam (Hasan:2008) mengemukakan bahwa orientasi utama evaluasi masukan adalah untuk menyampaikan suatu program yang dapat mencapai tujuan apa yang diinginkan suatu lembaga. Program yang dimaksud adalah program yang mengantarkan pada perubahan berskala penambahan dan pembaharuan. Maka dari itu, evaluasi masukan tidak hanya melihat apa yang ada di lingkungan lembaga tersebut (baik material maupun personal), akan tetapi harus juga dapat memprediksi kemungkinan-

kemungkinan apa yang akan dihadapi di masa depan ketika inovasi kurikulum diterapkan. Evaluator diharapkan dapat menentukan tingkat pemanfaatan faktor-faktor yang diidentifikasikan dalam pelaksanaan inovasi kurikulum.

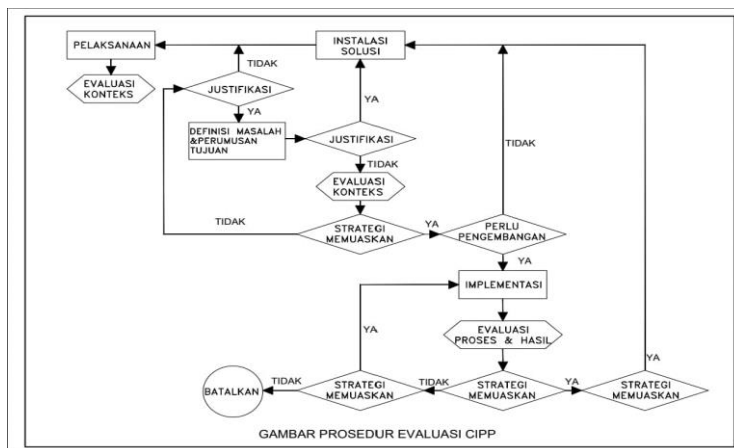
Evalusi proses, evaluasi proses adalah evaluasi pelaksanaan dari suatu inovasi kurikulum. Dengan demikian evaluasi proses adalah evaluasi kurikulum dalam dimensi pengertian sebagai realita atau kegiatan. Maka evaluasi proses baru bisa dilaksanakan jika inovasi kurikulum sudah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya evaluasi proses bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang ada. Evaluator diminta menentukan sejauhmana rencana inovasi kurikulum terlaksana di lapangan, hambatan-hambatan apa yang ditemukan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan perubahan-perubahan apa yang dilakukan terhadap inovasi kurikulum tersebut. Informasi yang berhasil dikumpulkan akan dijadikan refleksi bagi para pengelola dan stafnya sehingga diharapkan keputusan-keputusan yang dapat dilaksanakan dalam upaya memperbaiki proses kurikulum yang sedang berlangsung.

Evaluasi hasil, Stufflebeam (Hasan:2008) menjelaskan bahwa evaluasi hasil bertujuan untuk menentukan sejauhmana kurikulum yang sudah diimplementasikan itu telah memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Informasi yang dihasilkan oleh evaluasi hasil lebih menekankan pada sumatif. Artinya informasi yang diberikan akan digunakan untuk menentukan apakah suatu program harus diganti atau direvisi ataukah dipertahankan. Dalam implementasinya, jika hanya evaluasi masukan saja yang digunakan sebagai landasan menentukan nasib suatu inovasi kurikulum maka hal ini sangat berbahaya karena jikalau evaluasi hasil/produk menunjukkan hasil belajar peserta didik sangat rendah dibandingkan dengan apa yang direncanakan maka konsekuensinya evaluator akan dengan mudah dapat memutuskan bahwa kurikulum tersebut tidak cukup baik dan perlu diganti. Sehingga pengelola

pendidikan akan mengeluarkan dana yang besar untuk mengganti kurikulum tersebut dan ini jelas tidak efisien. Maka dari itu evaluator harus memasukkan dan menentukan faktor masukan dan proses karena kelemahan karena faktor masukan akan berpengaruh terhadap proses dan pada gilirannya proses yang lemah dan di bawah standar minimal yang ditetapkan akan berpengaruh negatif terhadap pencapaian hasil belajar. Dengan demikian pencapaian hasil yang rendah bisa dikarenakan oleh faktor masukan dan proses.

Kelemahan dalam fokus evaluasi produk disadari oleh Stufflebeam, maka dia menyarankan seandainya jenis-jenis evaluasi yang ada dalam CIPP tidak dilakukan semuanya maka paling tidak ada pekerjaan evaluasi menggabungkan dua atau lebih dari jenis evaluasi yang ada. Dengan harapan kelemahan seperti yang dijelaskan di atas tidak perlu terjadi. Hasan (2008) menyatakan adalah suatu yang paling dapat dipertanggungjawabkan oleh evaluator jika tidak menghendaki menggunakan jenis-jenis evaluasi secara keseluruhan adalah dengan melakukan pemisahan evaluasi konteks sebagai evaluasi secara mandiri dan terpisah.

Sedangkan evaluasi masukan, proses dan produk dilakukan dalam satu rangkaian. Karena hasil dari evaluasi konteks merupakan suatu keputusan apakah suatu inovasi kurikulum baru diperlukan atau tidak. Keputusan evaluasi konteks bersifat final. Sedangkan rangkaian evaluasi masukan, proses dan produk merupakan suatu rangkaian yang logis. Kombinasi lain jika tujuan evaluasi adalah untuk mengkaji pelaksanaan proses sebagai akibat dan hasil evaluasi adalah hanya menggunakan evaluasi masukan dan evaluasi proses dalam satu rangkaian. Karena keterkaitan antara kedua evaluasi tersebut cukup kuat bagi evaluator untuk menjelaskan apa yang terjadi pada proses berdasarkan apa yang terjadi pada masukan. Alur prosedur evaluasi CIPP terlihat pada gambar 8.1



Gambar 8.1 Prosedur Evaluasi CIPP

Model Evaluasi Kualitatif, Model evaluasi kualitatif dalam mengumpulkan data evaluasi menggunakan metodologi kualitatif (Hasan:2008). Sementara metodologi kualitatif menggunakan filsafat fenomenologi, maka dengan demikian model evaluasi kualitatif selalu menekankan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Walau dimensi proses lebih mendapatkan perhatian akan tetapi dimensi lain kurikulum tetap tidak diabaikan. Model evaluasi kurikulum kualitatif terdiri dari: 1) Model studi kasus; 2) Model illuminatif; 3) Model responsif

Model studi kasus, evaluasi studi kasus memusatkan kepada kegiatan pengembangan kurikulum di satu unit satuan pendidikan. Unit yang dimaksud bisa saja berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan hanya satu guru atau kepala sekolah saja. Ada dua jenis familiarisasi yang harus dilakukan. Pertama familiarisasi terhadap kurikulum sebagai ide dan sebagai rencana. Evaluator harus mempelajari ide-ide dasar pikiran yang melahirkan kurikulum sebagai rencana dan kurikulum sebagai rencana itu sendiri.

Kedua familiarisasi dilakukan ketika evaluator berada di lapangan. Evaluator harus menguasai keadaan lapangan beserta seluk-beluknya dari yang mudah hingga yang rumit. Evaluator harus menguasai kebiasaan-kebiasaan yang ada di evaluan sehingga dirinya merasa bukan orang asing di tempat evaluan tersebut. Dengan familiasasi tersebut maka evaluator baru dapat menggali persoalan-persoalan yang sangat grounded. Dengan dasar pengetahuan mengenai masalah-masalah pokok tersebut menjadikan evaluator sebagai instrumen yang canggih dan dinamik. Sehingga evaluator bisa betul-betul menghayati proses yang sedang terjadi, melakukan unfolding untuk mendapatkan informasi yang penting dan mendalam serta tidak mungki diperoleh jika menggunakan metodologi kuantitatif.

Evaluator juga bisa menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data dalam metode studi kasus. Karena observasi merupakan alat yang memiliki fokus utama pada proses, sementara proses adalah fokus utama model evaluasi kualitatif. Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang prima jika evaluan mempunyai kepedulian pada proses dan dapat menghayati proses yang terjadi.

Ada tiga persyarakat khusus yang harus dimiliki evaluator yang menggunakan teknik observasi: Pertama, evaluator harus memiliki visi dan pengetahuan yang luas terhadap fokus observasi. Karena evaluator harus dapat melihat proses yang terjadi dan berlangsung dalam tempo waktu yang cepat, singkat, dan tidak mungki diulangi. Dengan demikian evaluator dapat melakukan refocusing, mencatat hal-hal penting dalam proses dan dalam suasana kelas atau lingkungan belajar tertentu.

Kedua, kecepatan berpikir. Karena evaluator berfungsi sebagai instrumen yang selalu terbuka untuk sesuatu yang baru

dari masalah yang sedang diamati. Informasi yang diterima dari responden atau sumber lainnya dalam waktu singkat terjadi proses pengolahan data pada dirinya, menempatkan informasi yang baru diterima dalam pola kerja yang ada, dan mengidentifikasi dimensi baru yang ditimbulkan dari informasi yang diterima.

Ketiga, evaluator harus mampu cepat menangkap informasi yang diterimanya. Kecerdasan ditandai oleh tiga hal yaitu informasi tertulis sebagaimana yang disampaikan oleh responden atau sumber lain, bukan sebagaimana yang diterima evaluator, pemaknaan informasi, dan keterkaitan informasi yang diterima dengan konteks yang lebih luas.

Kuesioner dapat juga digunakan dalam pengumpulan data kualitatif. Data yang dikumpulkan langsung diolah dan sebaiknya ketika evaluator masih berada di lapangan. Hal ini karena ada beberapa keuntungan. Pertama, jika muncul persoalan baru dari hasil analisis data maka evaluator masih mempunyai kesempatan untuk segera melacak informasi yang diperlukan. Kedua, jika ada perkara yang tidak jelas maka evaluator bisa dengan cepat mengkomunikasikan dengan responden sehingga diperoleh informasi yang lebih jelas. Ketiga, waktu untuk kegiatan evaluasi dapat dipersingkat karena data sudah terolah.

Model illuminatif, Model ini dikembangkan berdasarkan dua konsep dasar, yaitu: a) Sistem instruksi (instructional system); b) Lingkungan belajar (learning milieu) Sistem instruksional dimaksudkan sebagai katalog, perspektus, dan laporan-laporan kependidikan yang secara khusus berisi bermacam-macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan suatu pengajaran.

Adapun lingkungan belajar diartikan sebagai lingkungan sosial-psikologis dan materi dimana guru dan peserta didik berinteraksi. Model illuminatif bersifat adaptif dan eklektik sehingga berbagai metode bisa digunakan selama metode tersebut sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Model illuminatif tidak membedakan antara jenis data yang diperoleh baik kualitatif maupun kuantitatif. Kedua data tersebut mempunyai kedudukan yang sama.

Ada tiga langkah baku yang dilakukan dalam model illuminatif adalah observasi, inkuiri lanjutan, dan usaha penjelasan. Observasi merupakan ciri dari metode kualitatif, dengan observasi maka evaluator dapat mengamati langsung di lapangan. Dengan observasi juga evaluator dapat melakukan dokumentasi, wawancara, kuesioner, dan melakukan tes untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Inkuiri lanjutan merupakan langkah perubahan-perubahan dari hasil temuan observasi di atas. Dengan langkah ini, evaluator memantapkan isu, kecenderungan, serta persoalan-persoalan yang ada sampai ke titik jenuh tidak ada lagi persoalan baru yang muncul. Penjelasan, dalam langkah memberikan penjelasan, evaluator harus dapat menemukan prinsip-prinsip umum yang mendasari kurikulum dan mampu menemukan pola sebab akibat guna menjelaskan kenapa kegiatan dapat dikatakan berhasil dan sebaliknya mengapa suatu kegiatan disebut gagal.

Model responsif, model responsif merupakan pengembangan dari model countenance, walaupun demikian tetapi ada perbedaan prinsipil. Perbedaan tersebut adalah : Pertama, dalam hal fokus. Model countenance lebih luas fokusnya dibandingkan dengan model responsif. Pada model countenance perhatiannya pada kurikulum sebagai suatu

rencana, adapun model responsif fokusnya pada kurikulum dalam dimensi proses.

Kedua, dalam hal pendekatan pengembangan kriteria. Model countenance berdasarkan pengembangan kriteria fidelity, sedangkan model responsif berdasarkan kriteria pendekatan proses. Dikarenakan perhatiannya pada pendekatan proses, maka model responsif memberikan perhatian terhadap proses interaksi antara evaluator dengan pelaksana kurikulum. Tanpa interaksi maka tidak ada satupun issue yang dapat ditemukan. Pada gambar 2 menunjukkan 12 peristiwa evaluasi yang merupakan kegiatan evaluator apabila menerapkan model responsif. Kedua belas peristiwa dalam model responsif tersebut bukanlah suatu tata urutan dan membentuk urutan konsekutif walaupun seperti muka jam. Artinya evaluator dapat memulai kegiatan evaluasi dari suatu peristiwa tertentu lalu melakukan kegiatan untuk peristiwa lainnya yang bukan merupakan urutan peristiwa berikutnya.

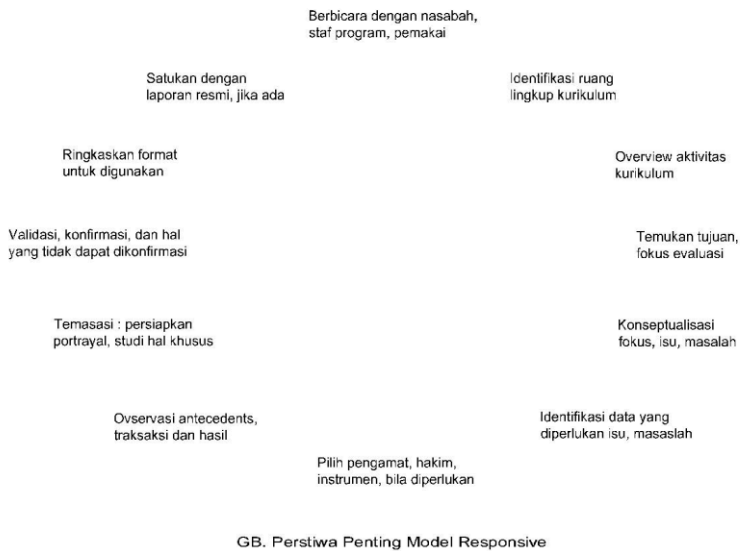
Model Ekonomi Mikro, model ekonomi mikro sebenarnya masuk dalam kategori model kuantitatif karena memiliki karakteristik yang sama yaitu berorientasi pada hasil (hasil dari pekerjaan, hasil dari belajar, dan hasil yang diperkirakan). Dalam ekonomi mikro berorientasi pada hasil yang dikaitkan dengan dana yang dikeluarkan. Apakah hasil belajar yang didapat peserta didik selaras dengan dana yang dikeluarkan apa tidak. Menurut Levin (Hasan:2008) ada empat model evaluasi ekonomi mikro, yaitu : cost-effectiveness, cost-benefit, cost-utility, dan cost-feasibility. Akan tetapi dari keempat model tersebut yang dianggap sesuai untuk evaluasi kurikulum adalah model cost-effectiveness.

Lebih lanjut Levin menjelaskan bahwa evaluator model cost-effectiveness harus dapat membandingkan dua program

atau lebih yang mempunyai tujuan yang identik, dengan mempertimbangkan baik dari sisi dana yang digunakan untuk masing-masing program maupun hasil yang diakibatkan setiap program. Evaluator harus dapat membandingkan hasil dari kedua program tadi yang nantinya akan menjadi masukan bagi para pembuat keputusan mana yang lebih menguntungkan dilihat dari hubungan antara dana dan hasil.

Model cost-benefit menggunakan uang sebagai alat pengukur hasil. Model ini mengukur besarnya uang yang diterima setelah seseorang bekerja untuk jangka waktu tertentu sebagai dampak dari pendidikan yang pernah dialami. Model cost-utility menggunakan kegunaan dan nilai sebagai alat pengukur hasil. Levin (Hasan:2008) menyarankan agar digunakannya skala kegunaan (utility scale) dalam mengukur tingkatan kegunaan dan nilai dari satu atau lebih program yang digunakan. Skala tersebut bergerak dari 1 -10 atau dari 1 – 4. Pokok utama skala yang digunakan adalah bahwa tiap orang yang menjadi responden dapat memberikan pendapat mereka berdasarkan skala yang sama, maka dari itu skala pengukuran yang digunakan haruslah skala interval dan bukan skala ordinal.

Model cost-feability, model cost-feability berbeda dengan model-model sebelumnya. Model ini tidak berusaha mencari hubungan antara dana dengan hasil akan tetapi model ini menghubungkan dengan ketersediaan biaya yang ada. Ketersediaan biaya mulai dari tahap awal pelaksanaan kurikulum hingga masa depan saat kurikulum diimplementasikan. Apabila tidak ada jaminan ketersediaan biaya tersebut maka jika tetap diimplementasikan dan di tengah jalan berhenti berakibat terjadinya pemborosan dalam program evaluasi kurikulum dan kurikulum tidak akan menghasilkan apa yang dikemukakan dalam ide kurikulum tersebut.



Gambar 8.2 peristiwa dalam model responsif

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainal.2011. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hasan, Hamid.2008. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hilabi, Abdurrahman.2019. *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta Timur: Pustaka Amanah
- Rahayu Putri Vina dan Aly Noer Hery.2023. Evaluasi Kurikulum Pendidikan. *Jurnal on Education*.
<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1328/1050>
- Rifki Ahmad Andi dan Ardinah.2021. *Evaluasi Kurikulum*. Makasar.

BAB 9

PENYEMPURNAAN KURIKULUM

Oleh Muh. Shulthon Rachmandhani, S.Pd.I., M.Pd

9.1. Pendahuluan

Perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan akan selalu menarik untuk dikaji. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma masyarakat yang percaya bahwa pendidikan merupakan jalan paling mulia untuk mengubah nasib seseorang. Melalui pendidikan pulalah maju mundurnya suatu negara dapat dinilai, serta melalui pendidikan pulalah kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk menghantarkan manusia menuju gerbang kesuksesan dunia dan akhirat.

Proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), karakteristik peserta didik yang selalu beragam, lingkungan sekolah yang adaptif, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, serta kurikulum yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai rangkaian unit yang menentukan proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah berperan penting untuk melakukan perubahan *mindset* serta perilaku peserta didik menuju ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Peran strategis dari kurikulum termanifestasi dari kemampuannya dalam memproses berbagai elemen yang terdapat dalam dunia pendidikan untuk memproduksi peserta didik yang memiliki

berbagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan zaman yang dihadapinya

Memperhatikan akan cepatnya perubahan zaman serta laju perkembangan IPTEK. Sudah sewajarnya apabila kurikulum akan selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan zaman yang dihadapinya. Tujuan dari perubahan dan penyempurnaan kurikulum ini, tentunya memimpikan lahirnya generasi yang memiliki keterampilan yang komprehensif yang terdiri dari ; kesadaran diri, kemampuan berpikir, kemampuan akademis, keterampilan sosial, serta *soft skills* (Ahmadi, 2013a).

Penyusunan Bab 9 tentang, "Penyempurnaan Kurikulum" bertujuan untuk memaparkan hasil analisis penulis terkait perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyempurnakan kurikulum nasional. Oleh karena itu, penulis melakukan pembatasan periode perubahan kurikulum mulai dari masa orde lama hingga masa reformasi. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam menulis sub bab ini dengan menggunakan teknik analisis *library research*.

9.2. Perubahan Kurikulum Dari Masa Orde Lama Menuju Orde Baru

Kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu selalu menjadi tajuk utama yang menarik bagi pengambil kebijakan serta peneliti untuk terus melakukan kajian terkait penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bermutu. Pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah sewajarnya negara hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Penyelenggaraan pendidikan nasional sudah semestinya untuk terus ditingkatkan (*continuous improvement*) menuju ke arah pendidikan yang jauh lebih baik. Melalui pendidikan yang bermutu inilah individu akan terus berkembang menuju ke arah yang positif yang menjadikannya manusia-manusia cakap, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil serta kompatibel. Dari sinilah

akan melahirkan suatu peradaban masyarakat yang bertanggung jawab serta menjadikannya sebagai masyarakat yang demokratis.

9.2.1. Analisis Perubahan Kurikulum Dari Masa Orde Lama Hingga Orde Baru

Bercermin sekilas dari sejarah pendidikan nasional pemerintah telah berusaha untuk membebaskan warganya dari keterbelakangan dan kemiskinan. Bahkan hal ini telah dilakukan sejak masa pemerintahan kolonial, meskipun waktu itu, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial dilakukan secara diskriminatif, untuk melanggengkan kekuasaannya di nusantara (Karsiwan and Sari, 2021) Setelah memasuki masa kemerdekaan, pola penyelenggaraan pendidikan nasional berangsur-angsur mengalami perbaikan. Kondisi ini terlihat dari keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional, melalui penerapan kurikulum pendidikan nasional pada tahun 1947 yang disebut dengan *Rentjana Pengajaran 1947*. Ki Hadjar Dewantara selaku menteri pendidikan menginstruksikan untuk menanggalkan seluruh atribut peninggalan Belanda dan Jepang yang masih bercampur dengan budaya nasional yang masih termuat dalam sistem pendidikan nasional. Budaya-budaya tersebut digantikan dengan peningkatan rasa nasionalisme yang semakin digalakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Raharjo, 2020).

Tahun 1952 peningkatan sistem pendidikan nasional dilakukan melalui perbaikan kurikulum 1947 menjadi kurikulum 1952, dari kurikulum *Rentjana Pengajaran* menjadi kurikulum *Rentjana Pengajaran Terurai*. Kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah dengan didasari oleh pemberlakuan UU. No 4 Tahun 1950. Muatan yang terdapat dalam kurikulum 1952 lebih detail dan lebih terinci. Pada periode ini tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan adalah mewujudkan manusia

Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila. Program pendidikan yang diterapkan pemerintah untuk mewujudkan program tersebut dilakukan melalui program *Pancawardhana* yaitu manusia Indonesia yang memiliki daya cipta, karsa, rasa, karya serta bermoral. Sehingga muatan pelajaran dibagi menjadi lima kelompok mata pelajaran yang berbeda yaitu: a). Moral. b). Kecerdasan. c). Emosional. d). Keterampilan, dan e). Jasmaniah. (Adeliya Putri Ananda, 2021: Insani, 2019).

Proses perbaikan kurikulum selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengganti kurikulum 1952 menjadi kurikulum 1964. Perbaikan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang Pancasila *sosialis*. Pada masa akhir periode lama inilah, sistem pendidikan diselenggarakan sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan orde lama, hal ini dengan memberlakukan Keputusan Presiden (Kepres) No. 145 tahun 1965 tentang Manipol dan USDEK (Safei & Hudaidah, 2020: Fadli& Kumalasari, 2019). Proses penyempurnaan kurikulum yang dilakukan pada awal periode orde lama diterapkan melalui kebijakan pendidikan nasional yang dilakukan secara bertahap. Hal ini bisa diamati dari upaya pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan nasional melalui penanaman kepribadian bangsa melalui sistem pengajaran yang lebih terstruktur. Namun diakhir kekuasaan periode orde lama sistem pendidikan nasional dimanfaatkan sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan sendi-sendi kekuasaan orde lama yang mulai runtuh. Revitalisasi arah kebijakan pendidikan nasional yang dilakukan oleh pemerintah semakin kentara ketika diterapkannya kurikulum 1964. Harapan dari penerapan kurikulum ini supaya dapat mentransformasi kehidupan sosial budaya masyarakat agar mendukung kebijakan praksis yang diterapkan untuk membentuk sistem Demokrasi Terpimpin(H.A.R Tilaar, 2009; Zulkarnain, 2017).

Pasca runtuhnya pemerintahan orde lama, tampuk kepemimpinan digantikan oleh pemerintahan orde baru. Sistem pendidikan nasional yang diselenggarakanpun juga ikut ditinjau kembali untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan sistem pendidikan yang sudah dijalankan sebelumnya. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintahan baru menunjukkan urgensi akan pentingnya mengembalikan arah pendidikan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat, raga dan jasmani (Idi, 2014). Pemerintah juga berusaha untuk memperkuat kembali pelaksanaan UUD 1945, oleh karena itu kurikulum 1968 diterapkan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari kurikulum 1964 yang telah diterapkan pada masa sebelumnya.

Penerapan kurikulum 1968 berorientasi untuk mengembalikan jiwa nasionalisme masyarakat pasca terjadinya G -30 S PKI pada tahun 1965. Dengan demikian semakin mempertegas peran strategis kurikulum dalam menanamkan kembali nilai-nilai, bekal pengetahuan serta keterampilan hidup masyarakat supaya sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Sehingga proses penyempurnaan kurikulum yang terjadi pada masa ini dilakukan sesuai landasan sosial budaya kehidupan masyarakat (Sukmadinata, 2009) untuk mengembalikan identitas manusia Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan yang terukur dengan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan (Artawan & Mas'ud, et.al 2023). Dalam penerapannya harus selalu dilakukan evaluasi secara terus menerus, hal ini penting untuk dilakukan supaya kualitas pendidikan nasional dapat terus ditingkatkan secara simultan. Hal inilah yang melatarbelakangi proses evaluasi serta perbaikan kurikulum 1968 menuju kurikulum 1975. Proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1968 menuju kurikulum 1975 lebih banyak dilatar belakangi oleh

keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, efisien, serta efektif (Wahyuni, 2015). Kondisi ini beririsan dengan kuatnya penerapan *Management By Objective* (MBO) yang sedang masif untuk diterapkan diseluruh perusahaan mancanegara waktu itu. Pola kerja dari MBO menentukan tujuan yang ingin ditetapkan oleh organisasi melalui pola kegiatan serta pekerjaan yang melibatkan seluruh elemen organisasi secara menyeluruh (Susanti, & Hubels, et.al, 2022: Nuris, 2010). Harapan dari penerapan MBO ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan kurikulum 1975 dengan melibatkan seluruh elemen pendidikan yang ada. Namun implementasinya penyusunan kurikulum 1975 dilakukan secara terpusat sehingga guru hanya disibukkan dengan kegiatan menulis uraian tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

Penerapan kurikulum 1975 yang dilakukan secara terpusat inilah yang menjadikan kurikulum ini banyak dikritik. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan mencari informasi pada era ini sangat dibatasi sehingga penerapan kurikulum ini identik dengan semangat otoriter penguasa era orde baru (Marlina, 2016). Selain itu, sulitnya mencari kerja menjadi penyebab lain mengapa kurikulum 1975 ini banyak dikritik. Pada era ini pemerintah ingin meningkatkan rasa cinta terhadap Pancasila dengan mengemukakan sebuah gagasan *Ekaprasetya Pancakarsa* atau Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila P4) yang kemudian disusul dengan berbagai penataran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung program ini yang diperkukuh dengan TAP MPR No II/TAP/MPR/1978 (Silvia, 2019: Idi, 2014).

Melihat banyaknya kritik yang dialamatkan pada penerapan kurikulum 1975 yang dinilai kurang mengeksplorasi keterampilan proses pada peserta didik. Pemerintah melakukan perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984 yang lebih berorientasi pada keterampilan proses,

peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membentuk manusia Indonesia yang memiliki kepribadian mandiri yang bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (Asri, 2017: Setyohutomo & Mudjijo et.al, 1991). Sehingga penerapan kurikulum 1984 menghendaki agar guru mampu menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik murid, keadaan sekolah, serta perkembangan lingkungan sekitar.

Penerapan kurikulum 1984 yang lebih berorientasi pada *skill approach* namun tidak mengesampingkan pentingnya tujuan pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dimulai dari kegiatan mengamati sesuatu, mengklasifikasikan, mendiskusikan kemudian menyampaikan hasil diskusi. Model pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini kemudian disebut dengan model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) (Junaidi, 2018).

Implementasi model pembelajaran CBSA sebagai dorongan baru untuk mewujudkan pola pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Setelah dilakukan evaluasi pada tahun 1989 menunjukkan beberapa kekurangan diantaranya: diskusi yang dilakukan oleh siswa bagi beberapa pendidik dianggap menjadikan kelas semakin gaduh, siswa yang semakin pandai akan menjadi lebih pandai sedangkan siswa yang tertinggal akan semakin tertinggal, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Pendidik (SDMP) yang mumpuni untuk mengimplementasikan model pembelajaran ini (Wardhana, 2021).

Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum 1984 yang dilakukan pada tahun 1989 maka pemerintah memutuskan untuk menyempurnakan kurikulum 1984 menjadi kurikulum 1994. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai langkah pasti pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional

melalui penerapan filosofi pendidikan yang bersifat *objective based curriculum* (kurikulum berbasis tujuan) (Imron, 2018). Penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut: 1. Perubahan nama dari SMP (Sekolah Menengah Pertama) menjadi SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum). 2. Perubahan nama mata pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) menjadi mata pelajaran sejarah. 3. Jumlah mata pelajaran pada jenjang SD dan SLTP dikelompokkan menjadi 13 mata pelajaran. 4. Program pengajaran yang diselenggarakan di SMU dikelompokkan menjadi 10 mata pelajaran. 5. Program penjurusan yang dilakukan pada jenjang SMU yang dilakukan pada kelas dua dan dikelompokkan menjadi tiga penjurusan: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa (Ayuhana, 2015). Penyempurnaan kurikulum pada masa orde baru identik dilakukan melalui kebijakan kurikulum yang bersifat *top down*. Kebijakan *top down* merupakan suatu proses penerapan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini identik dengan fenomena kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang berkuasa (Rachmandhani, Muh Shulthon, 2020).

Kelemahan dari penerapan kebijakan ini kurang memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga siswa belum mengenal tentang komputer maupun perangkat elektronik lainnya sebagai media bantu pembelajaran. Selain itu, kebijakan pendidikan yang terpusat ini juga kurang memperhatikan aspirasi dari *stakeholders* pendidikan. Sehingga penerapan kurikulum yang diterapkan pada masa orde baru tidak pernah lepas dari kritikan para guru, serta masyarakat terkait kualitas pendidikan yang disediakan maupun *output* pendidikan yang dihasilkan. Adapun keunggulan dari penerapan kurikulum pada masa orde baru pemerintah ingin mengembalikan

identitas bangsa Indonesia, serta melakukan penataan terkait sistem pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah.

9.2.2. Perubahan Kurikulum dari Masa Orde Baru Hingga Masa Reformasi

Tanggal 21 Mei 1998 merupakan salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal ini masa kepemimpinan Soeharto berakhir dan digantikan masa reformasi. Masa reformasi dilatarbelakangi oleh keinginan bangsa Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik yang dipimpin oleh BJ. Habibie sebagai perintis awal masa reformasi. Awal masa reformasi ini pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat diantaranya : ekonomi, kesehatan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), serta pendidikan (Klaudia & Wartha, 2020). Setelah diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 terkait otonomi daerah. Proses penyelenggaraan pendidikan juga mengalami proses reformasi. Hal ini dapat dilihat dari perubahan tujuan pendidikan nasional dari UU No 2 Tahun 1989 menjadi UU No 20 tahun 2003. Landasan yuridis lainnya terkait pengembangan kurikulum di era reformasi yaitu PP No 19 tahun 2005 terkait Standar Pendidikan Nasional serta Permendiknas No 22, 23, serta 24. Semenjak inilah proses penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan dengan dua metode utama yang terdiri dari: 1. Pengembangan kurikulum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. 2. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh satuan pendidikan (Loeziana Uce, 2016).

9.2.3. Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Sebagai Penyempurnaan Kurikulum 1994.

Penyempurnaan terhadap kurikulum 1994 menjadi kurikulum KBK 2004 dilandasi oleh proses evaluasi dari penerapan kurikulum sebelumnya yang terlalu bersifat

sentralistik dan terlalu fokus pada tujuan pembelajaran (Loeziana Uce, 2016). Penyempurnaan kurikulum ini juga dilatar belakangi oleh era reformasi serta pentingnya kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan abad 21 (Fitriani *et al.*, 2022).

Proses pembelajaran yang diselenggarakan dalam kurikulum KBK dengan mengembalikan posisi siswa sebagai subjek belajar. Mereka diberikan kebebasan melakukan kegiatan diskusi secara bersama-sama di kelas, dengan dipandu oleh guru. Sehingga peran guru dikembalikan sebagai fasilitator pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan mulai memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, contohnya penggunaan OHP (*overhead projector*) sebagai media pembelajaran di kelas (Hartono, 2016).

Kompetensi siswa yang ingin dikembangkan melalui penerapan kurikulum KBK 2004 terdiri dari sembilan prinsip utama yang terdiri dari: 1). Keimanan, budi pekerti serta nilai budaya. 2). Penguatan integritas nasional. 3). Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. 4). Kesamaan memperoleh kesempatan. 5). Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. 6). *Life skills*. 7). Menanamkan karakter *long life education*. 8). Berorientasi pada siswa. 9). Pendekatan yang menyeluruh dan bersifat kemitraan (Suteja, J., & Cirebon, 2017).

Arah pengembangan kurikulum KBK 2004 dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan siswa terkait bagaimana mereka belajar untuk terus belajar (*continuous learning*). Implementasi kurikulum KBK lebih menekankan pada capaian kompetensi tertentu yang harus dikuasai oleh siswa, sedangkan upaya untuk mencapai kompetensi tersebut diserahkan pada guru. Dari sinilah penerapan kurikulum KBK mulai mendapatkan kritikan dari masyarakat karena kurikulum ini dinilai terlalu bersifat sentralistik.

Perbedaan antara kurikulum 1994 dengan kurikulum KBK 2004 sebagai berikut: 1). Kurikulum 1994 penerapannya terlalu banyak materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. 2). Muatan yang terdapat dalam kurikulum 1994 saling tumpang tindih. 3). Kegiatan pembelajaran bersifat *teachers centered*.

Sedangkan kurikulum KBK 2004 disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1. KBK memberikan orientasi utama pendidikan pada kemampuan dan keterampilan dari pada kognitif. 2.) Pendekatan yang digunakan pada kurikulum KBK berorientasi terhadap penguasaan kompetensi tertentu yang harus dikuasai oleh siswa. 3). Muatan materi yang disajikan pada kurikulum KBK lebih mendalam dan luas. 4). Penyajian materi ajar yang kontekstual, komprehensif, dan berkelanjutan menjadi keunggulan tersendiri dari penerapan kurikulum KBK 2004 (Kwartolo, 2022).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1994 menuju kurikulum 2004 merupakan suatu keputusan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari landasan yuridis baik UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No 19 Tahun 2002 tentang asas desentralisasi, serta Permendiknas No 22, 23, dan 24 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat, dan satuan pendidikan untuk mengatur kurikulum yang diterapkan di sekolah.

Selain itu, proses penyempurnaan kurikulum 1994 menuju kurikulum 2004 juga dilatar belakangi oleh perkembangan IPTEK, di mana keunggulan ini dapat diamati dari orientasi kurikulum 2004 yang lebih menitik bertakan pada perwujudan kompetensi dan keterampilan pada siswa yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Fitriani *et al.*, 2022). Namun eksistensi dari kurikulum KBK ini tidaklah

lama, hal ini dikarenakan banyaknya kritikan yang terhadap kurikulum KBK 2004 yang masih bersifat sentralistik. Sehingga kurikulum KBK 2004 disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

9.2.4. Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 Sebagai Penyempurna Kurikulum KBK 2004

Penyempurnaan kurikulum KBK 2004 menjadi kurikulum KTSP 2006 bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat tentang kurikulum kepada guru. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah sebagai realisasi dari asas desentralisasi yang tidak hanya memberikan wewenang kebijakan kepada pusat terkait penerapan kurikulum.

Namun juga memberikan wewenang kepada masing-masing satuan pendidikan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Implikasi dari kebijakan pendidikan ini berakibat pada banyaknya variasi penerapan kurikulum pada masing-masing satuan pendidikan di setiap daerah.

Namun penerapan kurikulum KTSP tetap berpedoman pada PP No 19 Tahun 2005 tentang Satuan Nasional Pendidikan (SNP), yang terdiri dari delapan komponen pokok: 1. Standar isi. 2. Standar proses. 3. Standar kompetensi lulusan. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 5. Standar sarana dan prasarana. 6. Standar pengelolaan. 7. Standar pembiayaan. 8. Standar penilaian.



Gambar 9.1 SNP dalam PP No 19 Tahun 2005

(Sumber PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP))

Standar nasional pendidikan dibutuhkan guna meningkatkan kualitas penerapan kurikulum KTSP. Keberadaan standar nasional pendidikan ini, tidak akan menjadikan guru saling berbeda pendapat terkait kedalaman kompetensi dasar yang terdapat didalam kurikulum. Guru juga tidak akan disibukkan dengan urusan yang bersifat administrasi dalam menyusun kegiatan pembelajaran di kelas. Melainkan guru lebih fokus pada proses pembelajaran yang dilakukannya sehingga menghasilkan *output* pendidikan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk dipahami oleh guru, sebab implikasi dari penerapan kurikulum KTSP memberikan wewenang sepenuhnya pada satuan pendidikan untuk menyusun serta menerapkan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing (Herman, 2015). Sehingga penyusunan kurikulum KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang standar isi, serta Permendiknas No 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan (Muslich, 2007).

Secara garis besar kurikulum KTSP 2006 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan kurikulum KBK 2004. BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) menyebutkan ada tujuh

prinsip dasar yang harus diperhatikan ketika menerapkan kurikulum KTSP yang terdiri dari: 1). Berorientasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. 2). Memperhatikan aspek perkembangan siswa serta lingkungan sekitar siswa. 3). Bervariatif, dan mempunyai standarisasi yang jelas. 4). Adaptif terhadap kemajuan IPTEK. 5). Relevan dengan kehidupan sehari-hari. 6). Adanya motivasi untuk belajar secara terus menerus. 7). Memiliki keseimbangan terkait kepentingan pusat dan daerah (Mulyasa, 2013).

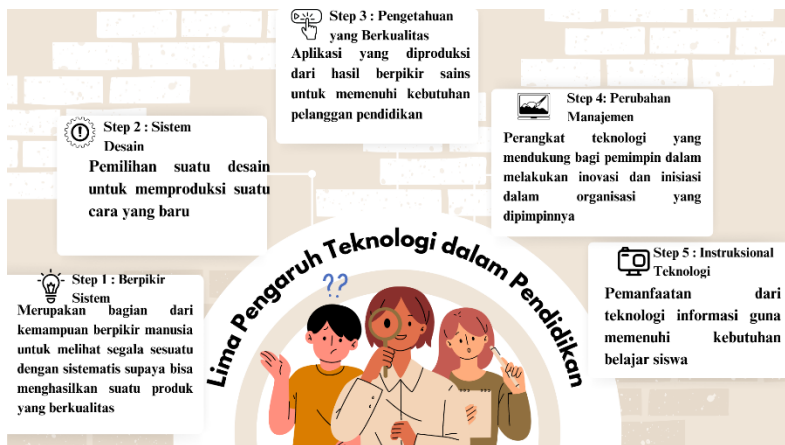
Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa proses penyempurnaan kurikulum dari kurikulum KBK 2004 menjadi kurikulum KTSP 2006 disebabkan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan asas desentralisasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi terhadap implementasi kurikulum KBK 2004 dinilai masih bersifat sentralistik. Sehingga guru mengalami kesulitan untuk menerapkan kurikulum KBK pada kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, penerapan kurikulum KTSP memberikan kesempatan kepada guru supaya lebih familiar dengan kurikulum nasional dengan menjadikan PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP sebagai pedoman pendidikan yang dilakukannya di kelas.

9.2.5. Penerapan Kurikulum 2013 Sebagai Penyempurnaan Kurikulum KTSP 2006

Setelah enam tahun pemerintah menerapkan kurikulum KTSP, maka tibalah waktu bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi atas penerapan kurikulum tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada beberapa kelemahan yang terdapat didalam muatan kurikulum KTSP diantaranya: 1). Muatan materi pelajaran yang termuat dalam kurikulum KTSP masih terlalu padat. 2). Pembelajaran yang dilakukan lebih cenderung untuk mengembangkan aspek pengetahuan peserta didik. 3). Asessmen yang dilakukan oleh guru belum optimal. Selain beberapa kelemahan yang telah dipaparkan tersebut, penerapan

kurikulum KTSP dinilai masih jauh dari kata ideal. Kondisi tersebut terlihat ketika masih dijumpainya satuan pendidikan yang menyusun kurikulum KTSP belum memperhatikan potensi daerah dan kebutuhan peserta didik serta pemerintah yang hanya terlibat sampai pada proses penyusunan standar isi mata pelajaran (Yuliani & Afriansyah, 2019).

Berdasarkan hasil evaluasi terkait kelemahan dari implementasi kurikulum KTSP 2006, maka pemerintah melakukan pergantian kurikulum dengan mengganti kurikulum KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013. Selain dilatar belakangi oleh kelemahan dari penerapan kurikulum KTSP 2006. Pergantian kurikulum ini juga dilatar belakangi oleh perubahan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga penyelenggaraan pendidikan nasional harus diselenggarakan sesuai dengan zaman yang dihadapinya. Berikut akan digambarkan terkait pengaruh teknologi dalam pendidikan:



Gambar 9.2 Pengaruh Teknologi dalam Dunia Pendidikan
(Sumber Artawan & Masiud, et.al, *Pengantar Ilmu Pendidikan*).

Berdasarkan gambar 9.2 perkembangan teknologi memberikan pengaruh signifikan terhadap proses pendidikan

dan pengajaran yang dilakukan yang dapat kita amati dari lima aspek yang terdiri dari: 1) Berpikir sistem yang melatih kemampuan berpikir manusia supaya terbiasa berpikir sistematis. 2). Sistem desain, melatih kemampuan berpikir manusia untuk menghasilkan suatu produk yang baru. 3). Pengetahuan yang berkualitas yaitu melatih manusia untuk menghasilkan suatu produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4). Perubahan manajemen merupakan seperangkat teknologi yang mendukung bagi pemimpin untuk melakukan berbagai inovasi dan inisiasi dalam organisasi yang dipimpinnya. 5). Instruksional teknologi yaitu pemanfaatan dari teknologi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa (Putu Artawan & Mas'ud Muhammadiyah, et.al 2023). Berdasarkan pada latar belakang hasil evaluasi terhadap kurikulum KTSP 2006 yang menunjukkan beberapa kelemahan serta perkembangan teknologi inilah kurikulum 2013 dikembangkan dan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2013/2014 (Hosnan, 2014).

Kurikulum 2013 dikembangkan oleh pemerintah dengan berlandaskan yuridis sebagai berikut:

1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP No 32 Tahun 2013 tentang Pembaruan dari PP No 19 Tahun 2005.
4. Permendikbud No 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan
5. Permendikbud No 64 Tahun 2013 tentang standar isi.
6. Permendikbud No 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian.
7. Permendikbud No 68 tahun 2013 tentang standar penilaian.

8. Permendikbud No 81 A tahun 2013 tentang Implementasi kurikulum 2013 (Saputro & Rachmandhani, et,al 2023: Putu Artawan & Mas'ud, at al2023).

Berdasarkan uraian diatas bisa diamati bahwa semangat pemerintah dalam menyempurnakan kurikulum nasional melalui penerapan kurikulum 2013 bertujuan untuk merelevankan sistem pendidikan nasional dengan zaman yang dihadapi oleh siswa. Harapan dari penerapan kurikulum ini *output* pendidikan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan zaman yang dihadapi serta menghasilkan siswa yang siap menghadapi tantangan zamannya. Dari uraian landasan yuridis juga dapat dipahami bahwa pemerintah berusaha untuk bisa mencapai tujuan instruksional yang termuat dalam UU No 20 tahun 2003 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia seutuhnya yang berupa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, berketerampilan, mandiri, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kepribadian yang mantap, bertanggung jawab, serta demokrasi (Ahmadi, 2013b). Sehingga pemerintah tidak hanya menjadikan PP No 19 Tahun 2005 sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan seperti waktu mengimplementasikan kurikulum KTSP 2006. Namun pemerintah ingin memperbaiki pendidikan dengan melengkapi seluruh elemen delapan standar pendidikan melalui aturan yang termuat dalam Permendikbud 54, 64, 66, 68, 81 A.

Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru ketika menerapkan kurikulum 2013 dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar sehingga siswa diwajibkan untuk aktif selama mengikuti proses pembelajaran di kelas. Posisi guru bergeser menjadi fasilitator pembelajaran, di mana guru

melakukan kegiatan pembelajaran melalui lima tahapan belajar yang terdiri dari: 1) Observasi. 2). Menanya. 3) Mengumpulkan. 4) Mengorganisasikan. 5) Mengkomunikasikan. Dari sinilah dapat mengetahui bahwa landasan filosofis yang melandasi kurikulum ini, adalah konstruktivisme sebab siswa diberikan kesempatan untuk membangun keterampilan dan pengetahuan mereka secara mandiri dan kelompok selama mengikuti proses pembelajaran di kelas.

Pada tahun 2017, pemerintah melakukan evaluasi atas penerapan kurikulum 2013 yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun. Hasil evaluasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa zaman ini tidak hanya dihadapkan pada perubahan IPTEK yang semakin masif. Namun zaman ini dunia juga dihadapkan pada kemampuan peserta didik untuk bisa berpikir tingkat tinggi (HOTS) agar mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ditemuinya. Sehingga kurikulum 2013 direvisi menjadi kurikulum 2013 edisi revisi 2017 (Saputro & Wijayanti, 2021).

Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 menekankan pada integrasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam kegiatan pembelajaran di kelas. PPK yang diperkuat disini terdiri dari lima nilai karakter utama yang terdiri dari: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kurikulum 2013 edisi revisi ini juga mengintegrasikan kemampuan literasi, serta keterampilan 4C (*creativity, collaborations, critical thinking, communications*). Tujuan dari pengintegrasian keempat elemen ini untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan yang sesuai dengan tuntutan abad 21 yaitu lulusan yang memiliki kecakapan literasi serta lulusan yang memiliki keterampilan dan kecakapan berpikir tingkat tinggi (Ridho Pradita & Lubis, 2018).

Membaca tantangan abad 21 yang mengharuskan kegiatan pembelajaran harus mengandung HOTS. Idealnya seorang guru menguasai taksonomi Bloom yang membuat peserta didik tidak hanya menguasai kemampuan mengingat (C1), memahami (C2),

mengaplikasikan (C3) saja namun peserta didik juga harus menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari: menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan menciptakan (C6) (Muh Syauqi Malik, 2020). Dengan demikian proses penyempurnaan kurikulum 2013 menuju kurikulum 2013 edisi revisi 2017 lebih ditujukan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki kecakapan abad 21. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ditemuinya. Mereka dibekali dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kecakapan literasi serta PPK supaya mereka memiliki kecakapan hidup untuk melanjutkan kehidupannya di abad ini. Kecakapan hidup yang dimaksud disini lebih dimaksudkan pada penguasaan keterampilan yang menjadikan peserta didik memiliki mental yang baik (*well being*) untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan bayangannya. Melalui *life skills* yang dibekalkan pada peserta didik inilah diharapkan mereka dapat bertarnsformasi menjadi pribadi yang lebih mandiri (Ahmadi, 2013b).

9.2.6. Penerapan Kurikulum Merdeka Sebagai Penyempurnaan Kurikulum 2013

Tahun 2019 masyarakat global dihebohkan dengan pandemi Covid-19. Peristiwa ini mengakibatkan kelumpuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga pendidikan. Instruksi untuk melakukan *social distancing* terus digelakkan oleh WHO untuk memutus mata rantai persebaran virus ini. Menindak lanjuti instruksi WHO tersebut pemerintah juga terus menggalakkan supaya masyarakat melakukan aktivitas dari rumah baik bekerja, belajar, hingga beribadah. Sehingga perangkat teknologi informasi menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. *Work form home (Wfh)*, *Teach from home (Tfh)* menjadi langkah ideal untuk

menjembatani kebutuhan masyarakat supaya semua sektor publik dapat terus berjalan meskipun dilakukan secara daring.

Pendidikan sebagai salah satu sektor utama kegiatan publik yang terkena dampak cukup signifikan sempat mengalami kebingungan untuk tetap menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, membahagiakan serta bermakna untuk semua jenjang pendidikan. Kemudian tahun 2020, pemerintah gencar melakukan sosialisasi untuk menyempurnakan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka..

Kebijakan penerapan kurikulum merdeka dilatar belakangi oleh kurang fleksibelnya kurikulum 2013 untuk tetap diterapkan ketika situasi dan lingkungan pembelajaran berubah. Muatan pelajaran yang terlalu padat juga menjadi sebuah kendala yang meyulitkan bagi guru untuk bisa menerapkan kegiatan pembelajaran yang optimal yang sesuai dengan juknis dan juklak implementasi kurikulum 2013 sehingga pembelajaran menjadi membosankan (Chaterine, 2022 : Saputra & Hadi, 2022).

Penerapan kurikulum merdeka juga dilatar belakangi oleh hasil penilaian PISA pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik yang tidak mengalami perubahan yang positif (OECD, 2018). Sehingga penerapan prototipe kurikulum merdeka diharapkan mampu memberikan perubahan positif pada kualitas pendidikan nasional. Kurikulum merdeka berorientasikan pada capaian pembelajaran yang dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas (Suryaman, 2020). Sehingga penyelenggaraan pembelajaran diharapkan mendukung kebebasan berkreasi, serta berinovasi bagi peserta didik maupun guru. Melalui penerapan kurikulum merdeka jugalah identitas pelajar Pancasila semakin diperkuat melalui Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang terdiri dari

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kritis, kreatif, berbhineeka global (*Mengenal Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*, 2022).

Pengembangan kurikulum merdeka dilandasi oleh filsafat konstruktivisme. Sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membentuk pengetahuan mereka sendiri. Sebenarnya kerangka falsafah yang dijadikan pedoman sebagai kerangka operasional pelaksanaan kurikulum merdeka ini sama dengan kurikulum K-13. Namun yang membedakan adalah tujuh tahapan pembelajaran yang harus dilalui peserta didik yang terdiri dari: 1) Mulai dari diri (M) disini peserta didik mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengkaitkan materi pelajaran dengan peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 2). Eksplorasi konsep (E), pada tahap ini peserta didik mulai untuk mencari tahu konsep dasar materi yang akan dipelajari melalui bahan ajar yang disediakan. 3). Ruang kolaborasi (R) peserta didik berdiskusi dengan teman sejawat untuk menemukan solusi dari masalah yang ditemuinya. 4). Demonstrasi kontekstual (D) peserta didik menunjukkan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya baik yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok. 5). Elaborasi pemahaman (E) peserta didik memperdalam materi yang telah didapatkannya. 6). Koneksi materi (K) peserta didik mengkaitkan materi yang diterimanya dengan materi lainnya. 7). Aksi nyata (A) peserta didik mengimplementasikan topik pelajaran yang didapatkannya dalam kehidupan sehari-hari (Artawan & Mas'ud, et.al 2023). Dengan demikian penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dilandasi oleh landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan IPTEK. Hal ini dapat ditemukan dari perubahan kurikulum yang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa, serta kepentingan politik yang melatarbelakangi perubahan arah pendidikan nasional.

Penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah juga didasarkan pada perubahan zaman yang terjadi, di mana komponen kurikulum disesuaikan dengan tujuan instruksional pendidikan nasional. Karakteristik peserta didik serta lingkungan sekolah juga menjadi perhatian utama pemerintah ketika merumuskan proses perubahan kurikulum sehingga paradigma filosofis pendidikan yang termuat dalam kurikulum sesuai dengan kerangka operasional kurikulum di sekolah. Harapannya guru dapat mengimplementasikan kurikulum yang telah ditetapkan dengan lebih mudah dan lebih praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeliya Putri Ananda, H. (2021) 'Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa Ke Masa', *Sindang*, 3(2), pp. 102–108.
- Ahmadi (2013a) *Manajemen Kurikulum Kecakapan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Asri, M. (2017) 'Dinamika Kurikulum di Indonesia', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2). Available at:
- Ayuhana, M. M. (2015) 'Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Di Indonesia (Analisis Tujuan dan Materi Ajar Kurikulum 1994, 2004, 2006, 2013)', *Jurnal Tarbawi*, 12(2), p. 171.
- Chaterine, R. N. (2022) *Nadiem Sebut Kurikulum 2013 Kaku, Padat, dan Membosankan*, *Kompas.com*. Available at:.
- Fadli, M. R. and Kumalasari, D. (2019) 'Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966)', *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 9(2), p. 157. doi: 10.25273/ajsp.v9i2.4168.
- Fitriani, D. *et al.* (2022) 'Inovasi Kurikulum: Konsep, Karakteristik dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)', *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 4(2), pp. 268–282.
- H.A.R Tilaar (2009) *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Hartono (2016) *Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)*, *Agastya*.
- Herman, Z. (2015) 'Karakteristik Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp)', *el-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 1(01), pp. 15–31.
- Hosnan, M. (2014) *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam*

Pembelajaran Abad 21. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Idi, A. (2014) *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imron, M. (2018) 'Pengembangan Kurikulum 1994', *Nuevos sistemas de comunicación e información*, 2(1), pp. 2013–2015.
- Insani, F. D. (2019) 'Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat ini', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), pp. 43–64.
- Junaidi, M. (2018) 'Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) (Pengajaran Aktif (Good & Grows); CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), Mastery Teaching (Hunter), dan Explicit Instruction (Rosenshine & Stevens) Mahbub', *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), pp. 42–55.
- Karsiwan, K. and Sari, L. R. (2021) 'Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung', *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 6(1), pp. 1–16.
- Klaudia, M. W. and Wartha, I. B. N. (2020) 'Perkembangan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999', *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 10(1), pp. 69–75.
- Kwartolo, Y. (2022) 'Catatan Kritis tentang Kurikulum', *Jurnal Pendidikan Penabur*, 1(1), pp. 106–116.
- Loeziana Uce (2016) 'Realitas Aktua Praksis Kurikulum: Analisis terhadap KBK, KTSP dan Kurikulum 2013', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 16(2), pp. 216–227.
- Marlina (2016) 'Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004', *Indonesian Journal of History Education*, 4(1), pp. 33–40.
- Mengenal Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila – Ruang Kolaborasi Mengajar Merdeka* (2022).
- Muh Syauqi Malik (2020) 'Analisis Hots, 4C, Literasi, Dan Pendidikan Karakter Dalam Seni Budaya Dan Prakarya

- Mi/Sd Kurikulum 2013', *Elementary*, 8, p. 73.
- Mulyasa, E. (2013) *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Muslich (2007) *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuris, A. (2010) 'Implementasi Management By Objectives (MBO) dalam Proses Pengambilan Keputusan di MTS Negeri 3 Surabaya'.
- OECD (2018) *PISA 2015 Results in Focus*. OECD.
- Putu Artawan, Mas'ud Muhammadiyah, Andi Hamsiah, E. a. (2023) *Pengantar Ilmu Pendidikan : Teori, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Son Pedia Publishing. Yogyakarta: Son Pedia Publishing.
- Rachmandhani, Muh Shulthon, M. M. (2020) 'Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo', *Edukasia*, 1(1), pp. 45–58.
- Raharjo, R. (2020) 'Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020', *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), p. 63.
- Ridho Pradita, M. and Lubis, F. (2018) 'Kelayakan Isi dan Bahasa Buku Ajar Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan', *Basastra*, 7(4).
- Safei, S. and Hudaidah, H. (2020) 'Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)', *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 7(1), pp. 1–13.
- Saputra, D. W. and Hadi, M. S. (2022) 'Persepsi Guru Sekolah Dasar Jakarta Utara Dan Kepulauan Seribu Tentang Kurikulum Merdeka', *Jurnal Holistika*, 6(1), p. 28.
- Saputro, A. D., Rachmandhani, M. S. and Laksana, S. D. (2023) 'Governance Policy and Education Financing Strategy to

- Improve National Education Development', *Good Governance*, 1(2), pp. 462–467..
- Saputro, A. and Wijayanti, O. (2021) 'Tantangan Guru Abad 21 dalam Mengajarkan Muatan SBdP di Sekolah Dasar', *Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran*, 1(3), pp. 51–59.
- Setyohutomo, G., Mudjijo, M. and Yuprapti, Y. (1991) 'Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum 1984 Sekolah Luar Biasa di Kotamadya Padang'..
- Silvia, B. (2019) *Dari Pendidikan Kewargaan Negara ke Pendidikan Moral Pancasila: Perubahan Muatan Materi Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia Tahun*.
- Sukmadinata (2009) *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryaman, M. (2020) *Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar, Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra*.
- Susanti, I., Hubeis, A. V. H. and Kuswanto, S. (2022) 'Perancangan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan Ancangan Management By Objectives (MBO) dan Perspektif Balanced Scorecard', *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 9(1), pp. 43–58.
- Suteja, J., & Cirebon, I. S. N. (2017) 'Model-model pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi KKNi di perguruan tinggi', *Jurnal Edueksos*, 6(1), pp. 81–100.
- Wahyuni, F. (2015) 'Kurikulum dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia)', *Al-Adabiya*, 10(2), pp. 231–242.
- Wardhana, I. P. (2021) 'Review Kurikulum Pendidikan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) Tahun 1984 dalam Pendidikan Indonesia', *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 3(1), p. 17.
- Yuliani, R. and Afriansyah, H. (2019) 'Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran', *Jurnal Artikel Padang*, (Tidak di terbitkan), pp. 1–2.

Zulkarnain, Z. (2017) 'Filosofis Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Lama', *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 1(1), p. 57.

BIODATA PENULIS



Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Penulis merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Memiliki Scopus ID 57216339245. Sinta ID 611284. Aktif dalam kegiatan menulis artikel dan menjadi reviewer pada jurnal nasional *“Academy of Education Journal”*. Aktif pada kegiatan alumni Resimen Mahasiswa/Menwa Pasopati Universitas Negeri Yogyakarta dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Mahakarta dan anggota Wira Mahakarta. Penulis merupakan anggota Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Se-Indonesia. Sebagai juga sebagai pengurus dalam organisasi Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI) Dewan Perwakilan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menulis buku kumpulan puisi yang berjudul *“Senandung Cita dan Cinta Kala Senja di Bumi Khatulistiwa”* yang diterbitkan pada tahun 2020. Menulis artikel Internasional yang berjudul *“The Role of Law Enforcement Agencies in the Effort of Corruption Prevention and Eradication in the Perspective of Progressive of Progressive Law in Indonesia”* tahun 2020 di *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. *“Developing Pancasila and Citizenship Education*

Lesson Plan Based on 2013 Curriculum in Senior High School” di *Journal of Educational Administration Research and Review* tahun 2021. “*Developing Pancasila and Citizenship Education Learning Model Based on Character Education Through Comprehensive Approach*” di *IJEMI (International Journal of Educational Management and Innovation)* tahun 2021. “*Anti-Corruption Education in The Family, Community, School and State*” di *Academy of Education Journal (AoEJ)* tahun 2021. “*The Mediating Role of Student Independence on Graduate Quality in Distributed Learning*” di *International Journal of Instruction* tahun 2022. Menulis buku bersama penulis lain di Bunga Rampai Pengantar Ilmu Pendidikan tentang Individu dan Masyarakat dalam Hukum pada penerbit CV Eureka Media Aksara tahun 2022. Sebagai penulis buku Pengantar Ilmu Pendidikan tentang Landasan Pendidikan pada Penerbit Lakeisha bulan Desember tahun 2022. Penulis buku *Dinamika Covid-19 “Dalam Bidang, Komunikasi, Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan”* tentang Strategi keluarga kecil bahagia sejahtera menghadapi masalah ekonomi serta hubungan sosial masyarakat pada masa pandemi Covid-19” tahun 2022. Menulis buku chapter Pendidikan Anti Korupsi tentang Korupsi dalam berbagai perspektif Politik, penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat, cetakan pertama, 11 Februari tahun 2023. Menulis buku Psikologi Pendidikan tentang “Teori & Inovasi dalam Pendekatan Pendidikan”, penerbit Echa Institute, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 14 Februari 2023. Penulis sedang menempuh S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Hobby korespondensi, olahraga, menari, *line dance*, jalan-jalan atau travelling serta suka menyanyi dan membaca buku. Motto hidup “Hidup yang terindah adalah hidup bahagia yang dijalani dengan sikap optimis dan antusias dengan orang-orang yang mendukung dan mencintai kita, semua halangan dan rintangan pastilah ada jalan menuju kesuksesan”. Nomor Whatsapp +6282265467826, Alamat email: intankusumawati1978@gmail.com

BIODATA PENULIS



Karten Halirat, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lelemuku Saumlaki

Penulis lahir di Kandar tanggal 21 April 1995. Penulis adalah dosen dan Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Lelemuku Saumlaki. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Fisika di Universitas Kristen Indonesia-Jakarta pada tahun 2017 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Administrasi/Manajemen Pendidikan di Universitas Kristen Indonesia-Jakarta pada tahun 2021.

BIODATA PENULIS



Siti Nur Fikriyah, M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtiaiyah
STIT Rakeyan Santang

Penulis lahir di Tasikmalaya tanggal 03 Mei 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtiaiyah. Menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtiaiyah. Selain menjadi dosen, ia juga mengajar di sekolah dasar islam terpadu Kasih Ibu.

BIODATA PENULIS



Khairul Hasni, S.H., M.A.

Khairul Hasni, Date of Birth: April 24, 1971 **Education & Qualifications**

- 2016 Graduate Student of Ritsumeikan University Kyoto Japan.
- 2007-2009 Ritsumeikan University Kyoto, Japan. Master of Arts Departement International Relation.
- 2005-2007 Kotobagakuin School Shizuoka: Japanese.
- 1999-2004 Unimal University Lhokseumawe, Aceh, main subject: Human Right Law.
- 1991-1999 STIEI University Banda Aceh, subject: Banking Administration.

Work Experience

- January 2011-present

Director of Jari Aceh (NGO)

Trainer, Facilitator, Resources Person on Various Gender Issues and Politic (a.q Reproduction Rights, UNSCR 1325, Social Conflict, Gender in Politics, and International Relation).

Researcher and Lecture at Almuslim University Aceh Bireun

Head of the Head of International Relations Study Program
2015-2016

- September 2010 – 2012

Lecture at USU University Medan

- March 2008 – February 2009

Assistance Research (Part time) of Ritsumeikan University
Kyoto, Japan.

- December 2000 - 2002

Jari Aceh NGO, Executive Director

Staff Team of dialog Aceh Hendric Dunant Center (HDC)

- March 2002 - 2004

Head of Coordinator Investigation of Komnas HAM Aceh

- 1996 – 2000

Yapda NGO

Responsibilities included: Manager Financial, Field Staff and
Deputy Director.

- **Work International Experience (Part time)**

Volunteer of English Teaching Assistance High School
Ritsumeikan, 2017-2018

Kyoto Educational Companion Volunteer kokoka 京都市国
際交流会館について (Kyoto City International Foundation) in
2017 -2019.

Teaching Indonesian and English at the Enhance Language
Center (ELC) Osaka Japan, 2018-2020.

Teaching Assistance (TA), ISA Tokyo Japan 2019 – 2022.

LbE Global Leader Team in Japan, 2020-2022.

Tour Leader Wak Japan, 2021-2022.

International Research

- Mercury and Public Health Conditions in Tanah Luas Sub-District” North Aceh, and Mercury Influence on Health in South Aceh and Aceh Jaya support by Takagi Fund Jepang 2 periode (2014-2015, 2015-2016).
- Research on Religion and sex workers in Aceh was support by Nagoya Gakuin University Japan, 2016-2017.

Books Publish

- Book Chapter; Pendidikan Keluarga (Pendidikan Gender dalam Keluarga), ISBN: 978-623-198-263-6 Publisher: PT.

Global Technology Executive Member of IKAPI No. 033/SBA/2022, May 9, 2023.

- Book Chapter; Kurikulum Merdeka (Pembaharuan Kurikulum) on proses. Publisher: PT. Global Technology Executive

Networking

- 2012 - present Member of N-Peace Indonesia.
- 2010 - present Member of Kontras Aceh.
- 2001- Alumni, International Visitor Leadership Program (IVLP) US Embassy.

BIODATA PENULIS



Dr. Epi Supriyani Siregar, M.Pd

Dosen Program Studi PJKR
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Penulis lahir di Marindal II pada tanggal 14 November 1975. Putri kandung pasangan ayah Alm. H. Syahrudin Siregar., SH., MM dan ibu Dra. Hj Nur'aini Harahap. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Suami Dolok Huwayan Harahap, S.Pd, M.Si. Penulis memiliki 4 orang anak, 1. Annisa Hidayah, 2. Harunur Rasyid Harahap, 3. Namira Ripdha Harahap, 4. Shava Yumna Harahap.

Riwayat pendidikan dimulai dari SD. Inpres No: 104212 Patumbak, Kabupaten Deli Serdang tamat tahun 1988, MTsN 1 Medan tamat tahun 1991, melanjutkan ke SMA Swasta Kesatria Medan tamat tahun 1994. Kuliah S1 Sarjana Pertanian UPMI Medan tamat tahun 1998, Akta Mengajar (Akta IV) Unimed tamat tahun 2005, Akta Mengajar II Ahli Muda Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak UT Medan tamat tahun 2008, Menyelesaikan Sarjana Pendidikan S.Pd. AUD UT Medan tamat tahun 2012, Tahun 2004 menyelesaikan S2 Teknologi Pendidikan Pascasarjana Unimed tamat tahun 2007 dan tahun 2014 melanjutkan ke S3 Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Unimed, tahun 2022 menyelesaikan S3

Penulis mulai bekerja sebagai guru di TK UPMI Medan pada tahun 1999, guru di SMP UPMI Medan pada tahun 2000,

dan menjadi Kepala Sekolah di TK UPMI pada tahun 2005. sebagai dosen di FKIP UPMI prodi PJKR pada tahun 2013.

Karya tulis ilmiah : judul A Study of the Implementation of Internalized Interactive Multimedia Learning Models In Life Skills Education of Student at Primary School of it Al-Fitrah Binjai. Judul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Keterampilan Membaca Peta Huruf Siswa Taman TK Nurul Azizi Medan. Judul Pengaruh Intelegensia Terhadap Kemampuan Membaca Peserta Didik Taman Kanak-Kanak

BIODATA PENULIS



Qiyadah Robbanyah, S.Pd.I, M.Pd.I

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

Penulis lahir di Yogyakarta tanggal 15 Agustus 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis aktif menulis terkait tema pendidikan dan manajemen pendidikan. Kegiatan penulis selain menjadi dosen adalah pengurus Pesantrean Islamic Center Bin Baz di Yogyakarta dan aktif dalam pendampingan remaja dan isu-isu lingkungan serta pengembangan ibu-ibu muda. Email: qrobbaniyah@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Nasarudin, S.Pd.I., M.Pd.

Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Mataram

Nasarudin Olah Saun, lahir di Lombok Timur tahun 1977, Dosen Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Mataram semenjak tahun 2010. Pendidikan: S1 di IAIN Mataram tahun 2001-2005 dengan meraih gelar S.Pd.I., S2 di UIN Malang tahun 2006-2008 meraih gelar M.Pd., dan S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015-2018 meraih gelar Doktor dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. Pelatihan: Daurah dosen bahasa Arab di Universitas Ummul Qura Mekah Saudi Arabia tahun 2013. Pernah mendapatkan hibah penelitian Kementrian Agama RI tahun 2013. Penulis beberapa buku: 1) *Pendidikan Karakter Dalam Hadis Nabawi Perspektif Semantik & Pragmatik* tahun 2018, 2) *Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab (Implementasi Menuju Mutu)* tahun 2022, 3) *Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab* tahun 2023, 4) *Buku chapter Evaluasi Kurikulan; Evaluasi Implementasi Kurikulum* tahun 2023. 5) *Buku Chapter Metodologi Penelitian kuantitatif: Teknik Pengumpulan Data* tahun 2023. Editor Buku Chapter Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab tahun 2023. Publish tiga artikel ilmiah pada jurnal terindeks sinta 2 tahun 2018, 2022, 2023. Dan publis jurnal Scopus Q2 tahun 2022 dengan ID Scopus 58180133100 & ID ORCID 0009-0003-2632-3991

. BIODATA PENULIS



Widiyanto, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

Penulis lahir di Tegal tanggal 20 Juni 1967. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Matematika IKIP Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Taman Siswa. Penulis menekuni bidang Menulis, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

BIODATA PENULIS



Muh. Shulthon Rachmandhani, S. Pd. I., M. Pd

Dosen Program Studi Agama Islam
Fakultas Pendidikan Agama Islam

Penulis lahir di Ponorogo, 09 Maret 1992 Penulis adalah seorang tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Prodi PGMI di IAIN Ponorogo dan melanjutkan S2 pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Ponorogo. Penulis menekuni bidang menulis dan mengajar. Bidang konsentrasi penulis adalah kebijakan pendidikan, kepemimpinan, serta mutu pendidikan. Alamat email penulis: muhammadshulthonrachman@gmail.com